

Drs. H. Mahmud, M. Si.

MUHAMMADIYAH

& Dualisme Pendidikan
DI INDONESIA



Pengantar: Prof. H. Ahmad Supardi

MUHAMMADIYAH
DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA

Drs. H. Mahmud, M. Msi

Penyunting: Tedi Priatna, M. Ag.

Setting & Lay Out : Ka' Dienan

Desain Sampul : De' Iyang


Cetakan I: Maret 2004

Penerbit: Azkia Pustaka Utama:

Pustaka Terpilih Masyarakat Pembelajar

Jln. Raya Cipadung Km. 13,5 No. 33 Bandung

Kode Pos 40614 Fax. (022) 7811821

 (022) 7831046 – 08122112149

ISBN: 979-98526-1-7

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

SEGALA puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya, shahabatnya serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada awalnya, risalah ini hanya merupakan lembaran-lembaran persiapan yang dipakai penulis guna proses pembelajaran pada mata kuliah *Ilmu Pendidikan Islam* dan *Sejarah Pendidikan Islam*; yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian pustaka. Alhamdulillah, setelah melalui penambahan dan pembetulan, dengan segenap keberanian, penulis sajikan risalah ini.

Sebagaimana judulnya: *Muhammadiyah dan Dualisme di Indonesia*, risalah ini mencoba mendeskripsi ulang bagaimana peranan Muhammadiyah dalam mengintegrasikan dualisme Pendidikan di Indonesia, dengan fokus masa kolonial Belanda.

Penulis menyadari bahwa teramat banyak kekhilafan dalam penyusunan risalah ini. Dengan kerendahan hati, semoga tanggapan yang disampaikan akan menjadi pemacu dan pemicu penulis untuk mengembangkan wawasan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah Swt. membalasnya dengan berlipat ganda.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Maret 2004
Penulis

Mahmud

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	iii
Pengantar Prof. H. Ahmad Supardi	v
Daftar Isi	xiv
Bab I Pendahuluan Muhammadiyah dan Dualisme Pendidikan di Indonesia	1
Bab II Ilmu Pendidikan Islam: Konsep Dasar sebagai Metode	11
Bab III Dualisme Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda	74
Bab IV Peranan Muhammadiyah dalam Mengintegrasikan Dualisme Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda	110
BAB V Penutup	146
Daftar Pustaka	xv

Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia menampilkan dualisme yang mencolok. Hal tersebut terlihat pada penyelenggaraan model pendidikan pesantren di satu sisi, dan model pendidikan gubernemen di pihak yang lain.

Buku ini mencoba menghadirkan telaahan tentang bagaimana upaya Muhammadiyah dalam mengintegrasikan dualisme pendidikan tersebut, sehingga sistem pendidikan Muhammadiyah menjadi semacam sintesis dari pendidikan pesantren tradisional dan pendidikan Belanda di Indonesia pada masa itu.

Mahmud, kelahiran Bandung, 1962, adalah staf pengajar pada fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau mendapatkan gelar ST Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan gelar S2 Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Lektor Kepala Ilmu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ini sekarang adalah Pembantu Dekan II Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

MUHAMMADIYAH
DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA

Drs. H. Mahmud, M. Si.

BANDUNG
2004

MUHAMMADIYAH
DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA

Drs. H. Mahmud, M. Msi

Penyunting: Tedi Priatna, M. Ag.

Setting & Lay Out : Ka' Dienan

Desain Sampul : De' Iyang


Cetakan I: Maret 2004

Penerbit: Azkia Pustaka Utama:

Pustaka Terpilih Masyarakat Pembelajar

Jln. Raya Cipadung Km. 13,5 No. 33 Bandung

Kode Pos 40614 Fax. (022) 7811821

 (022) 7831046 – 08122112149

ISBN: 979-98526-1-7

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

SEGALA puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya, shahabatnya serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada awalnya, risalah ini hanya merupakan lembaran-lembaran persiapan yang dipakai penulis guna proses pembelajaran pada mata kuliah *Ilmu Pendidikan Islam* dan *Sejarah Pendidikan Islam*; yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian pustaka. Alhamdulillah, setelah melalui penambahan dan pembetulan, dengan segenap keberanian, penulis sajikan risalah ini.

Sebagaimana judulnya: *Muhammadiyah dan Dualisme di Indonesia*, risalah ini mencoba mendeskripsi ulang bagaimana peranan Muhammadiyah dalam mengintegrasikan dualisme Pendidikan di Indonesia, dengan fokus masa kolonial Belanda.

Penulis menyadari bahwa teramat banyak kekhilafan dalam penyusunan risalah ini. Dengan kerendahan hati, semoga tanggapan yang disampaikan akan menjadi pemacu dan pemicu penulis untuk mengembangkan wawasan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah Swt. membalasnya dengan berlipat ganda.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Maret 2004
Penulis

Mahmud

PENGANTAR
PROF. H. AHMAD SUPARDI

PENDIDIKAN ISLAM yang berlangsung melalui proses operasional menuju tujuannya memerlukan model dan sistem yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral spiritual yang melandasinya. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan berdasarkan orientasi kebutuhan perkembangan fitrah murid (*Learner's potentials orientation*) yang dipadu dengan faktor lingkungan kultural yang ada. Oleh karena itu, manajemen kelembagaan pendidikan Islam memandang bahwa seluruh proses pendidikan dalam institusi adalah sistem yang berorientasi kepada perbuatan yang nyata (*action oriented system*) berdasarkan pendekatan sistemik.

Untuk memahami kelembagaan pendidikan Islam perlu dikaji pendekatan normatif tentang siapa yang bertanggung jawab dalam menangani dan mengembangkan pendidikan. Menurut Islam tanggung jawab pendidikan Islam itu dibebankan kepada tiga institusi pokok pendidikan, yaitu: a) Orang Tua; b) Sekolah; dan c) Masyarakat.

Menurut Sidi Gazalba yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan adalah :

1. *Rumah tangga*, yaitu pendidikan *primer* untuk fase bayi dan fase kanak-kanak sampai usia sekolah. Pendidiknya adalah orang tua, sanak kerabat, famili, saudara, teman sepermainan dan kenalan pergaulan.
2. *Sekolah* yaitu pendidikan *sekunder* yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut. Pendidiknya adalah guru yang profesional.
3. *Kesatuan sosial*, yaitu pendidikan *tertier* yang merupakan pendidikan yang terakhir tetapi bersifat permanen. Pendidiknya adalah kebudayaan, adat istiadat dan suasana masyarakat setempat.

Berkenaan dengan kelembagaan pendidikan Islam, perlu diketahui gambaran sejarah pendidikan Islam secara makro, yang menyajikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pernah ada pada konteks masyarakat Islam.

Sejak zaman Nabi, tugas dakwah agama secara aktif yang dilaksanakan di kota Makkah telah mempergunakan lembaga tempat Nabi memberikan pelajaran tentang agama Islam secara menyeluruh, baik di rumah-rumah maupun di masjid. Salah satu rumah yang terkenal dijadikan tempat berlangsungnya pendidikan Islam adalah Darul Arqam di Mekah dan masjid yang terkenal

yakni Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Tempat-tempat inilah yang sering digunakan untuk kegiatan belajar mengajar agama Islam baik secara langsung kepada Nabi atau melalui para sahabat yang sering disebut dengan istilah *halaqah* (berkelompok).

Sejalan dengan semakin berkembangnya pemeluk agama Islam yang semakin bertambah jumlahnya dan juga keinginan untuk memperoleh efektivitas belajar mengajar yang cukup memadai, serta sejalan dengan makin berkembangnya pemikiran baru tentang pendidikan, pada akhirnya para sahabat dan para tabi'in memikirkan bentuk pendidikan Islam alternatif. Maka setelah munculnya kerajaan Islam di Timur Tengah berdirilah berbagai model pendidikan Islam yang lebih teratur dan terarah dalam kegiatannya.

Maka muncullah pada tahap permulaan yang disebut dengan nama *al-Kuttab*, tempat belajar cara menulis dan membaca huruf-huruf al Qur'an. Juga diajarkan satu bidang disiplin ilmu agama yang terdapat dalam al Qur'an. Orang yang pertama belajar menulis dan membaca ialah Sufyan bin Kilab, sedangkan pengajarnya ialah Basyar ibn Abdul Malik yang pernah belajar dari ahli di Iraq. Dari sinilah mulai menyebarnya teknik belajar menulis dan membaca ke seluruh penjuru jazirah Arab. Motivasi utama dari kegiatan ini ialah ayat al-Qur'an yang mula-mula diturunkan, yaitu *al-Alaq*.

Dari kemampuan menulis dan membaca inilah umat Islam memperoleh sarana yang ampuh untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, karena itu membaca dan menulis dapat dipandang sebagai sumber ilmu pengetahuan manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan Islam dapat kita saksikan dari berbagai periode sejak Daulah Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyyah dan Usmaniyyah pada abad 4 Hijriyyah (10 sampai 14 Masehi). Pengaruhnya terhadap abad-abad kemudian nampak jelas sekali terbukti pada perkembangan peradaban bangsa-bangsa di negara-negara Barat, seperti Spanyol dan Perancis. Disamping itu pula bersamaan munculnya para pujangga Muslim dalam berbagai bidang ilmu, seperti falsafah, astronomi, aljabar, kedokteran, arsitektur dan lain sebagainya.

Sarjana sejarah Inggris dalam tulisannya menjelaskan salah satu fakta tentang kemajuan umat Islam pada abad pertengahan dengan perkataannya: “Yang diciptakan oleh bangsa Arab bukan hanya satu kerajaan, melainkan juga suatu kebudayaan. Mereka adalah pewaris dari kebudayaan lama yang berkembang di tepi sungai Tigris dan Efrat, di lembah sungai Nil dan Timur Laut Tengah. Sifat-sifat utama dari kebudayaan Yunani Romawi juga dipelajari dan dikembangkannya. Oleh karena itu, merekalah yang memberikan banyak pengaruh kebudayaan ini ke benua Eropa pada abad per-

tengahan sehingga Eropa terbangun dari tidurnya dan berkembanglah renaissance modern”.

Dalam permulaan abad pertengahan itu tidak ada suatu bangsa pun yang lebih besar sumbangannya untuk proses kemajuan manusia melebihi bangsa Arab (pemeluk agama Islam). Sementara itu mahasiswa Arab saat itu sudah asyik mempelajari falsafah Aristoteles, di sisi lain Karel Agung (Kaisar Perancis saat itu) beserta pembesar-pembesarnya asyik belajar menulis namanya sendiri. Para sarjana di kota Cordoba (Spanyol Islam); sebuah kota yang memiliki 17 buah perpustakaan dan salah satunya memiliki lebih dari 100.000 buah buku, gemar sekali mandi di pemandian yang indah-indah, padahal mahasiswa Universitas Oxford (Inggris) masih menganggap pekerjaan mandi itu sebagai kebiasaan yang berbahaya.

Kemajuan peradaban umat Islam pada masa itu sungguh merupakan hasil dari kemampuan membaca dan menulis yang pertama-tama diperintahkan oleh Allah melalui hamba-Nya yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. Dengan modal ilmu tersebut, umat Islam dalam menghadapi kehidupannya yang semakin kompleks menuntut adanya kemampuan untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Kesemuanya itu adalah dalam rangka upaya memenuhi tuntutan hidupnya.

Karenanya sistem *al Kuttab* tidak lagi mampu menampung aspirasi dari kebutuhan belajar umat pada saat itu. Maka dibentuklah sistem pendidikan

klasikal yang dikenal dengan istilah *madrasah* atau sekolah. Madrasah yang pertama kali didirikan adalah *madrasah al-Baihaqiyah* di kota Nesabur pada abad 1 Hijriyah. Akan tetapi madrasah yang cukup terkenal karena mutunya ialah *madrasah an-Nidhamiyah*, yaitu madrasah yang didirikan oleh Nidham al-Mulki, seorang menteri Sultan Malik Syah an-Seljuqi pada tahun 460-475 Hijriyah di Bagdad dan Naesabur. Imam al Ghazali pernah menjadi guru pada dua sekolah tersebut sekitar akhir abad ke 5 Hijriyah.

Kemudian disusul berdirinya madrasah-madrasah lainnya, seperti *madrasah al-Nasiriyah*, *madrasah al-Qumhiyah* dan *al-Saefiyah* dari daulah Ayyubiyah. Yang pada akhirnya bermunculanlah madrasah-madrasah besar di Timur Tengah, seperti di Syria yaitu *madrasah an-Nuriyah* yang didirikan oleh Nuruddin Zanky di Mesir, *madrasah al-Kamiliyah* yang didirikan oleh Malik al Kamil al Ayyub, *madrasah adh-Dhabiriyah* yang mempelajari fiqh asy Syafi'i dan Hanafi, *madrasah al-Mansuriyah* yang mempelajari fiqh dari empat mazhab, ilmu Hadits dan ilmu kedokteran, *madrasah an-Nashiriyah* yang mengajarkan fiqh yang empat mazhab, *madrasah Sultan Hasan* yang didirikan pada tahun 758 Masehi yang terkenal karena bangunannya yang besar, arsitekturnya yang indah serta bentuknya tidak ada yang menandinginya di seluruh dunia Islam. Madrasah ini didirikan pada jaman kerajaan Mamalik di Mesir. Pada setiap madrasah yang

didirikan itu senantiasa dilengkapi dengan perpustakaan yang terdapat di dalamnya berribu-ribu buku.

Kecuali sistem madrasah (sistem klasikal), pendidikan Islam berkembang pula dalam institusi pendidikan yang disebut dengan *Zawiyah*, yaitu suatu tempat belajar di sudut masjid (menurut asal-usulnya). Kemudian pada akhirnya berkembang terpisah dari masjid, dan berfungsi tidak berbeda seperti madrasah. Di tempat ini diajarkan al Qur'an dan ilmu dasar pengetahuan umum. Kondisi *Zawiyah* berfungsi seperti ini setelah sampai pada abad 8 Hijriyah, yakni negara-negara Maghribi (Afrika Utara).

Di samping itu, berkembang pula apa yang dikenal dengan *al-Maristan*, yaitu lembaga ilmiah dan tempat-tempat pengobatan bagi orang Islam yang sakit. Di lembaga ini diajarkan ilmu kedokteran secara praktis. Nama *al-Maristan* dikaitkan dengan kepemimpinan ar Razy (zaman al-Mukhtafa, tahun 311 Hijriyah) di balai bernama *Maristan*.

Pada saat inilah madrasah dan rumah-rumah sakit atau balai pengobatan berkembang bersamaan yang sekaligus berfungsi sebagai lembaga pendidikan seperti halnya masjid berfungsi sebagai *Zawiyah*.

Institusi pendidikan Islam pada akhirnya makin berkembang sampai pada puncaknya yaitu pada masa Bani Fathimiyah di Mesir dengan ditandai berdirinya sistem universitas yang dikenal dengan

nama *Universitas al Azhar*, dan disusul oleh universitas-universitas lainnya di kota-kota besar negara-negara Islam pada abad pertengahan.

Universitas al Azhar ialah salah satu perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu umum, seperti teknologi yang didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam tidak ketinggalan dan kalah oleh perguruan tinggi di negara-negara Barat. Karena di universitas ini didirikan fakultas-fakultas sosial lainnya yang menyangkut kepentingan hidup dunia dan akhirat. Demikian gambaran umum tentang sejarah lembaga pendidikan Islam.

Buku di tangan Anda ini mencoba menyajikan perspektif sejarah mengenai kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya yang ditangani oleh Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang terpanggil untuk turut serta dalam proses pendidikan. Hasil telaahan penulis mengenai hal tersebut penting untuk diketahui karena bagaimanapun memahami pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tema dikotomi dan dualisme pendidikan. Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia menampilkan dualisme yang mencolok. Hal tersebut terlihat pada penyelenggaraan model pendidikan pesantren dan gubernemen di pihak yang lain.

Buku ini mencoba menghadirkan telaahan tentang bagaimana upaya Muhammadiyah dalam mengintegrasikan dualisme pendidikan tersebut,

sehingga Muhammadiyah menjadi semacam sintesis dari pendidikan pesantren tradisional dan pendidikan gubernemen di Indonesia pada masa itu. Dan buku ini berhasil mengungkapkannya secara kronologis. Selamat kepada penulis dan semoga lahir kembali kajian-kajian lainnya.**

Bandung, Maret 2004

Prof. H. Ahmad Supardi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	iii
Pengantar Prof. H. Ahmad Supardi	v
Daftar Isi	xiv
Bab I Pendahuluan Muhammadiyah dan Dualisme Pendidikan di Indonesia	1
Bab II Ilmu Pendidikan Islam: Konsep Dasar sebagai Metode	11
Bab III Dualisme Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda	74
Bab IV Peranan Muhammadiyah dalam Mengintegrasikan Dualisme Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda	110
BAB V Penutup	146
Daftar Pustaka	xv

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, *Warisan Intelektual Kurikulum K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Usaha Muhammadiyah*, Percetakan Persatuan, Yogyakarta, 1990
- _____, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Bina Aksara, Jakarta., 1986
- _____, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan dakwah*, Sypress, Yogyakarta. 1993
- _____, dan Sukriatna, *Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah dari Masa ke Masa : Menyambut Muktamar ke-41*, Dua Dimensi Yogyakarta. 1985
- Ag. Soejono, *Aliran-aliran Baru dalam Pendidikan*, Jilid II, CV. Ilmu, Bandung, 1979
- Abdurrahman Wahid, **Pesantren Sebagai Sub-Kultur**, dalam Dawam raharjo (ed.) *Pesantren dan Pembaharuan*, LP3S, Jakarta., 1974
- Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Abdurrahman An-Nahlawy, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, CV. Diponegoro, Bandung., 1989
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung. 1993
- _____, **Muhammadiyah dan High Politics**, dalam Jurnal *Ulumul Qur'an* Nomor 2 Vol VI Tahun 1995, Insan Mitra Sahyamandiri, Jakarta. 1995
- Ahmad Tafsir, *Epistemologi Untuk Ilmu Pendidikan Islam* IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. 1995

- _____, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Remaja Karya, Bandung 1990
- _____, *Filsafat Umum*, Remaja Karya, Bandung. 1989
- Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung. 1995
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Al-Ma'rif, Bandung. 1989
- Alisy As'ad, *Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu*, Menara Kudus, Kudus. 1978
- Ali Saepulah, *Antara Filsafat dan Pendidikan : Pengantar Filsafat Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya. 1992
- Amin Rais, *Muhammadiyah Politik Berpayung Amal Shaleh*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an Nomor 2 vol IV Tahun 1995, Insan Mitra Sahyamandiri, Jakarta. 1995
- Amrullah Achmad, **Kerangka Dasar Masalah Pendidikan Islam**, dalam *Pendidikan Islam di Indonesia : Antara Cita dan Fakta*, Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991
- Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1993
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Pustaka Jaya, Jakarta. 1985
- Bahtiar Efendi, **Nilai-nilai Kaum Santri**, dalam *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Arus Bawah*, P3M, Jakarta. 1985
- Clifford Geert, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta. 1989
- Dadan Wildan Anas, *Sejarah Perjuangan Persis*, Gema Syahida, Bandung. 1993
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3S, Jakarta. 1993
- Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Percetakan Al-Qur'an raja Fadh, Madinah Munawarah. 991
- Dikbud R.I. *Ensiklopedi Nasional*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta. 1989

- Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-matahari Muhammadiyah : dari K.H. Ahmad Dahlan Sampai Dengan K.H. Mas Masur*, Jilid I PB. Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Fachry Ali dan Bachtiar Efendi, *Merambah Jalan Baru Islam : Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Mizan, Bandung. 1985
- G.F. Fijfer, *Fragmenta Islamica : Beberapa Studi Mengisi Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX*, UI Press, Jakarta. 1985
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintas Sejarah dan Perkembangannya*, LSIK, Jakarta 1993.
- Heru Sukardi dkk., *Sejarah Pendidikan Jawa Timur*, Proyek Penelitian Percetakan Kebudayaan Daerah, Surabaya.
- Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung. 1978
- _____, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta. 1985
- H.A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, Rajawali Press, Jakarta. 1989
- Harry Jindrich Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta. 1980
- H.S Prodjokusuma, *Muhammadiyah Membangun dan Berdakwah Sekarang dan Masa Yang Akan Datang*, Yayasan Amal Bhakti Masyarakat, Jakarta. 1990
- James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, Cipta Kreatif, Jakarta. 1986
- Jumhur dan Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, CV. Ilmu Bandung 1959
- Karel A. Steembrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah Modern Islam di Indonesia*, LP3S, Jakarta. 1994
- _____, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Bulan Bintang, Jakarta. 1994
- Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Panitia Penerbit, Jakarta. 1966
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bina Aksara, Jakarta. 1994
- _____, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bina Aksara,

- Jakarta. 1989
- _____, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah dalam Pendidikan*, Pustaka Jaya, Jakarta. 1985
- Muhamad Amin Abdullah, **Muhammadiyah Dan Tantangan Modernitas**, Dalam Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 2 Vol. IV, Tahun 1995, Insan Mitra Sahyamandiri, Jakarta. 1995
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi Islam Di Indonesia*, Mizan. Bandung. 1995
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Seri INIS XX, Jakarta. 1989
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Rida Karya Agung, Jakarta. 1978
- Mustafa Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Percetakan Persatuan, Yogyakarta, 1976.
- Mitsou Nakamura, *Bulan Sabit Muncul Dari Balik pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kota Gede*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 1978
- Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Bulan bintang, Jakarta. 1978
- Rusli Karim, **Pendidikan Islam di Indonesia Dalam Transformasi Sosial Budaya**, dalam *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cipta dan Fakta*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- S. Nasution, 1991, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jenmars, Bandung. 1987
- Saefudin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, PT. Al-Ma'arif. Bandung. 1981
- S.L. Van Der Wall, *Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, Jakarta. 1977
- Soekarno dan A. Supardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Angkasa, Bandung. 1989

Syamsul Arifin dan Thobroni, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi Untuk Aksi Dalam Keberagaman dan Pendidikan*, SI Press, Jakarta 1994
Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, LP3S, Jakarta.

Sinopsis Buku

MUHAMMADIYAH DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia menampilkan dualisme yang mencolok. Hal tersebut terlihat pada penyelenggaraan model pendidikan pesantren dan gubernemen di pihak yang lain.

Buku ini mencoba menghadirkan telaahan tentang bagaimana upaya Muhammadiyah dalam mengintegrasikan dualisme pendidikan tersebut, sehingga Muhammadiyah menjadi semacam sintesis dari pendidikan pesantren tradisional dan pendidikan gubernemen di Indonesia pada masa itu.

Mahmud, kelahiran Bekasi 10 April 1962, adalah staf pengajar pada fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau mendapatkan gelar S1 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan gelar S2 Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini, Lektor Kepala Ilmu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah Pembantu Dekan II Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB I

PENDAHULUAN:

MUHAMMADIYAH DAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA

PEMBAHARUAN dalam Islam atau sering disebut gerakan modern Islam pada awal kelahirannya merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam di akhir abad ke-18 masehi. Upaya tersebut paling tidak didukung dua faktor yang saling berkaitan, yaitu: **Pertama**, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam; dan **Kedua**, menimba gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat.

Faktor pertama tercermin dari upaya yang dilakukan oleh gerakan Wahhabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1787) di Arabia, Syah Waliyullah (1703-1762) di India, Gerakan Sanusiyyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Sayyid Muhammad Sanusi dari Aljazair. Sedangkan faktor kedua teridentifikasi dari pengiriman para pelajar muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa

untuk menuntut ilmu pengetahuan dan dilanjutkan dengan intensifikasi penterjemahan karya-karya Barat.

Dalam rentang ikhtiar tersebut, Mesir dengan sejumlah tokoh-tokoh pembaharunya memainkan peran strategis dan signifikan. Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, atau tokoh lainnya, telah hadir menjadi katalisator dari gerakan tersebut. Dalam bidang politik misalkan, gagasan Pan-Islamisme (persatuan Islam sedunia) yang lantang didengungkan al-Afghani mendapat respon positif. Apatah lagi gagasan nasionalismenya, telah menumbuhkan kesadaran mayoritas negara-negara Islam yang berada dalam kolonialisme penjajah untuk bangkit merebut kemerdekaan sejati. Diduga kuat beberapa negara yang penduduknya mayoritas Islam mendapat pengaruh dari gagasan Nasionalisme ini. Diawali dengan munculnya organisasi kemasyarakatan bernuansakan Islam pada masing-masing negara tersebut, pada awal abad ke-19 masehi negara-negara tersebut akhirnya merdeka dari kolonialisme tersebut. Kemerdekaan negara-negara Islam inilah yang kemudian terkenal dalam rentang sejarah sebagai awal kebangkitan dunia Islam.

Di dunia Islam kawasan Timur Tengah abad ke-13 Masehi telah muncul seorang tokoh besar yang bernama Ibnu Taimiyah. Pada masa hidupnya ia banyak bergerak dalam permbaharuan cara berpikir dan cara hidup secara Islami. Gerakan ini

dinamakan “*Muhyi atsaris Salaf*” atau menghidupkan kembali ajaran lama (L. Stoddard, 1996:297).

Gagasan ini diteruskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab. Dalam perjuangannya dia menunjukkan sikap yang keras, seperti menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syari`at Islam; memintaminta ke kuburan, meninggalkan ibadah, meminum minuman keras, merokok dan sebagainya.

Setelah mengalami kemandegan tidak lebih dari satu abad, gerakan ini dihidupkan kembali oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha di Mesir yang menitikberatkan pada reformasi ajaran agama murni serta mengharmoniskan pilar-pilar kemasyarakatan dan politik; sedang di India, dihidupkan oleh Sayyid Ahmad Khan dengan menggunakan cara berpikir dan cara hidup baru sesuai dengan ajaran salaf ((L. Stoddard, 1996:298).

Dengan berkembangnya gerakan tersebut, ternyata membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pembaharuan di Indonesia waktu itu. Hal ini terlihat dengan banyak berdirinya organisasi-organisasi Islam yang mendasarkan diri pada ajaran salaf yang dikembangkan oleh Abduh dan kawan-kawan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Jami`at Khair, al-Irsyad, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam dan Persatuan Islam.

Organisasi keislaman ini, sebagaimana gerakan dan ajaran Abduh, bertujuan untuk mengem-

balikan ajaran agama Islam kepada sumbernya yang murni, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul sekaligus meninggalkan pertengkaran madzhab dari segala bid'ah serta khurafat ke dalam ajaran Islam (L. Stoddard, 1996:298).

Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan reformasi mempunyai tujuan yang sama dengan gerakan tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya Muhammadiyah mesti berhadapan dengan umat Islam sendiri serta kaum penjajah waktu itu. Muhammadiyah berdiri di antara Islam *sinkretik* (ajaran Islam yang telah bercampur dengan ajaran lain, Hindu misalnya) dan Islam tradisional (Kuntowijoyo, 1991:268).

Sementara dengan kaum penjajah Belanda, Muhammadiyah berhadapan dengan kebijakan-kebijakan mereka yang menekan dan merugikan umat Islam Indonesia baik menyangkut hukum, politik, ekonomi, pendidikan serta masalah sosial lainnya yang berkaitan dengan Islam.

Dalam hal pendidikan, Belanda berhasil menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan gaya dan modelnya sendiri. Meskipun penyelenggaraan pendidikan hanya terbatas untuk kalangan masyarakat kelas bangsawan dan priyayi. Keberhasilan pendidikan kolonial terlihat dari jumlah sekolah yang dibangunnya, seperti tercantum dalam data statistik tahun 1898 terdapat 721 buah sekolah yang berhasil didirikan Belanda untuk rakyat Bumi Putera dan 146 buah untuk sekolah Erofa (M. Said, 1981:18).

Kendati Pemerintah Belanda mengadakan penyelenggaraan pendidikan bagi rakyat Bumi Putera, tapi yang dimaksud adalah kalangan bangsawan dan priyayi lainnya, sedangkan sekolah untuk rakyat kecil baru didirikan pada tahun 1907. Dan tahun 1939 jumlah sekolah yang berhasil didirikan, seperti sekolah (*Vervolg*) campuran, Sekolah Lanjutan Gadis, dan kursus Guru Desa tercatat 99 buah di Jawa Barat, 142 di Jawa Tengah dan 125 di Jawa Timur (S. L. Van der Wall, 1977:299). Jumlah sekolah ini belum termasuk sekolah yang didirikan di luar Jawa, juga sekolah yang didirikan oleh rakyat pribumi.

Jumlah yang banyak dalam penyelenggaraan pendidikan ini belum bisa dipastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan kolonial itu sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum, apalagi tentang kualitasnya. Namun kaitannya dengan hal ini adalah bahwa di sekolah-sekolah tipe kolonial tidak diajarkan pendidikan agama Islam, padahal mayoritas rakyat beragama Islam.

Pemerintah Belanda berpandangan, bahwa tidak adanya pengajaran agama Islam di sekolah, dimaksudkan agar tidak ada rasa iri dari penganut agama lain. Dari hal ini maka dilancarkanlah politik "Netral Agama" (Aqib Suminto, 1985:17). Meskipun kenyataannya mereka mengajarkan agama kepada murid-murid, tapi pengajaran Islam yang sudah disalah-tafsirkan (Mohamad Roem, 1982:20). Selain itu, bagi Sekolah Standar dan

Sekolah Lanjutan, pendidikan dalam arti yang sebenarnya tidak diajarkan. Murid hanya diberi pengajaran membaca, menulis dan berhitung (Jumhur, 1959:136).

Mungkin hal ini merupakan realisasi dari *Inlandsch Politiek* yang dilancarkan oleh Snouck Hurgronje. Menurutnya, untuk menguasai rakyat pribumi, kaum kolonialis perlu memahami mengenai seluk beluk rakyat pribumi, termasuk dalam pendidikan (Aqib Suminto, 1985:11). Maka pantaslah kalau Zuhairini (1992:146) berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kaum kolonial untuk kaum pribumi hanya merupakan usaha mereka dalam melakukan *westernisasi* dan kristenisasi.

Pada sisi yang lain, pesantren yang dianggap lembaga pendidikan yang tertua yang ada di Indonesia mendapat saingan dari sistem pendidikan baru (sistem pendidikan *gubernemen*), sehingga keberadaannya menjadi terisolasi dari keramaian orang, terutama sejak runtuhnya kerajaan Mataram sampai berakhirnya penjajahan Belanda. Akan tetapi, bagaimanapun pesantren mampu menancapkan akarnya sebagai basis pendidikan masyarakat, sehingga memiliki kemampuan untuk memobilisasi rakyat dalam melawan penjajah, bahkan mampu mengalahkan saingan gerakan modern, yaitu memiliki kemampuan dalam menggalang kekuatan dari segi solidaritas dan integritas para penganutnya (Zamakhsyari Dhofier, 1982:41).

Dalam hal lain tentang pesantren perlu juga diketahui bahwa dalam perkembangan pikir, pesantren mengalami kelambatan, seperti dikatakan Grounje bahwa: “Islam tradisional Jawa yang kelihatannya demikian, begitu kuat terbelenggu oleh pikiran-pikiran “ulama”. Pada abad pertengahan sebenarnya telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental; tetapi perubahan-perubahan tersebut demikian bertahap-tahap....” (Zamakhsyari Dhofier, 1982:2).

Selain itu, pesantren dengan kyai dan santrinya mempunyai sikap menutup diri dan non-kooperatif dengan para kolonialis Belanda dalam hal apapun. Belanda dipandang sebagai “setan”, “kafir Belanda”. Sebutan ini mengandung kebencian terhadap mereka, juga mengandung nilai permusuhan terhadap mereka (Deliar Noer, 1993:26). Oleh karenanya kaum santri memandang, bahwa segala apa yang datang dari Barat (Belanda) hukumnya haram untuk ditiru, karenanya barang siapa yang meniru perbuatan mereka sama artinya dengan golongan mereka. Hal ini disandarkan pada sebuah Hadits Nabi, yaitu “Barang siapa yang menyerupai suatu golongan maka ia termasuk golongan tersebut” (Zuhairini, 1991:150). Dan rupanya kaum santri memaknai hadits ini secara tekstual atau apa adanya.

Dengan hal tersebut, pesantren (kaum santri) menutup komunikasi dengan pihak Belanda tanpa kompromi, kendati dalam persoalan pendidikan. Padahal pemerintah kolonial pernah bermaksud

untuk mengadakan pembaharuan terhadap pesantren, yaitu dengan menggabungkan pesantren dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Akan tetapi, J.A. van der Chijs (Inspektur Pendidikan Pribumi, Pegawai Pemerintah Belanda) menolak adanya penyesuaian dengan pendidikan Islam (pesantren) karena alasan teknis pengajaran yang dianggapnya jelek (Karel A. Steembrink, 1994:3). Dari sejak itulah pendidikan Islam (pesantren) dengan pendidikan gubernemen berjalan sendiri-sendiri, bahkan di antara keduanya sangat bertolak belakang.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia tercatat akibat-akibat yang merugikan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, seperti dikatakan Ag. Soejono (1979:62) bahwa dengan adanya pengajaran yang bersifat Belanda sentris terhadap kaum pribumi mengakibatkan anantara lain: (1) terasingnya kaum terpelajar dari kebudayaan dan kepribadian nasionalnya; (2) terpisahnya kaum terpelajar dengan rakyat pada umumnya; (3) kepandaian para terpelajar hanya untuk kepentingan diri sendiri, yaitu dengan menjadi pegawai pemerintahan; dan (4) anak Indonesia tidak mampu berbahasa Belanda dan tidak boleh masuk sekolah menengah Belanda, meskipun pandai.

Lebih jauh lagi usaha differensiasi pendidikan ini, mengakibatkan terbentuknya kaum santri dan non-santri diantara sesama kaum muslimin (Kafrawi, 1978:10). Kaum santri adalah mereka yang belajar ilmu agama di pesantren. Sedang non-

santri adalah yang belajar di sekolah gubernemen. Menurut Clifford Geertz masyarakat Jawa terbagi atas kaum santri, priyayi dan abangan, tidak dalam satu klasifikasi karena santri dan abangan didasarkan atas ketaatan beragama sedang priyayi berdasarkan status sosial (Clifford Geert, 1989:12). Selanjutnya akibat yang ditanggung oleh Islam adalah retaknya *ukhummah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), bahkan hilangnya semangat di kalangan priyayi abangan untuk membela Islam.

Muhammadiyah merupakan organisasi reformasi waktu itu yang mempunyai pendirian bahwa keadaan umat Islam yang runtuh diakibatkan lemahnya pendidikan. Dan pendidikan yang penting itu bukan hanya sekedar pengajaran agama saja, tapi umat Islam perlu mempelajari pengajaran umum (ilmu pengetahuan). Sebagaimana Abduh, Muhammadiyah berpendapat bahwa pada dasarnya Islam tidak memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan kealaman, karena al-Qur'an berbicara bukan semata-mata kepada hati saja, tetapi juga kepada akalnya. Dengan akal inilah pengetahuan (sains) dapat digali dari fenomena alam ini (Nasution, 1992:65). Dengan prinsip sebagaimana Abduh dalam pendidikan itu, apakah Muhammadiyah mampu meletakkan pendidikan Islam sesuai yang dikehendaki al-Qur'an, baik menyangkut tujuan ataupun kurikulumnya?

Uraian di atas menunjukkan bahwa (1) pada akhir abad ke-19 di Indonesia telah ada dua corak pendidikan, yaitu pendidikan pesantren dan pen-

didikan gubernemen (2) keberhasilan pendidikan gubernemen nampak dalam jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding pesantren, sehingga telah menyedot siswa dari kaum pribumi kalangan bangsawan saja, sedang pesantren hanya bagi rakyat kecil (3) pesantren mempunyai sipat menutup diri dari pengaruh model pendidikan kolonial (gubernemen) serta bersifat non-kooperatif (tidak mau bekerja sama) dan (4) adanya usaha differensiasi pendidikan yang mengakibatkan terpecahnya masyarakat muslim dalam kelas sosial yang antara satu dengan yang lainnya saling tidak bekerja sama.

Dari pernyataan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah risalah yang berjudul “*Muhammadiyah dan Dualisme Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1912-1942*” (Analisis Ilmu Pendidikan Islam).

-----&&&-----

BAB II

ILMU PENDIDIKAN ISLAM: KONSEP DASAR SEBAGAI METODE

A. Pengertian, Dasar, dan Fungsi Ilmu Pendidikan Islam

Ilmu Pengetahuan

ILMU dapat berarti *knowledge* (pengetahuan), juga *science* (ilmu). Dalam pembahasan ini ilmu yang dimaksud adalah ilmu dalam arti *science* bukan ilmu dalam pengertian *knowledge*, sehingga bisa didefinisikan bahwa ilmu adalah sejenis pengetahuan manusia yang proses memperolehnya dengan jalan riset terhadap objek-objek yang empiris. Hal ini dipertegas Endang Saefuddin Anshari (1995:30) bahwa *science* adalah pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu, yang dengan sangat dasar menuntut kebenaran. Dari pengetahuan ke ilmu pengetahuan itu mengalami dan melalui proses. Kemudian mengenai arti ilmu dijelaskan oleh Nur Uhbiyati (1995:12) bahwa ilmu merupakan suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Memperhatikan uraian tersebut dapat dipahami bahwa *science* (ilmu pengetahuan) adalah uraian yang sistematis dan metodik mengenai sesuatu hal atau masalah. Sedangkan yang menjadi pembahasan ini, terutama persoalan ilmu pengetahuan (sains), Yusuf Amir Faisal mengemukakan tiga karakteristik yang harus ada, yaitu:

- a. Sains merupakan pencarian untuk pemahaman yang ditemukan melalui penjelasan suatu aspek realita;
- b. Pemahaman ini diperoleh melalui persyaratan prinsip-prinsip yang membentuk hukum yang dapat diterapkan dalam kemungkinan segala yang lebih luas;
- c. Hukum-hukum yang dapat diuji melalui eksperimen (Ahmad Tafsir, ed.,1995:104)

Sementara itu, Harsoyo yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendi (1994:76) mengemukakan bahwa ilmu itu harus bersifat: (1) rasional; (2) empirik; (3) umum; 4) akumulatif.

Dari beberapa pengertian, ciri dan sifat ilmu yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah.

Pendidikan Islam

Dalam perkembangan peradaban manusia, banyak pengertian, pandangan dan teori yang dikemukakan orang mengenai pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Pengertian, pandangan dan

teori-teori tersebut terumus secara berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan hidup yang dimiliki manusia bersangkutan, serta latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam hubungan ini, dikemukakan pengertian-pengertian pendidikan dan pendidikan Islam menurut beberapa pakar.

Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak untuk memajukan kehidupan anak didik selaras dengan dunia (Wasty Soemanti et. al., 1982:11-12).

Sedikit berbeda dengan di atas, Carter V. Good yang dikutip oleh M. Djumberansyah Indar (1994: 18) menyebutkan bahwa pendidikan mengandung arti sebagai:

- Suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku dalam masyarakat;
- Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang dipimpin (misalnya sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya.

Sejalan dengan persyaratan di atas, Jalaluddin Rakhmat (1993:14) menyebutkan bahwa, pendidikan adalah upaya mengubah pengetahuan, sikap dan prilaku orang secara progresif melalui lembaga-lembaga formal. Sementara, Sedang Amir Daien (1973:27) mengartikan bahwa pendidikan

adalah bantuan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani untuk mencapai tingkat kedewasaan. Juga Ali Hamdani Ali (1990:8) mengartikan bahwa pendidikan adalah usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkan melakukan fungsi hidup dalam pergaulan bersama, dengan sebaik-baiknya.

Dari beberapa pengertian pendidikan di atas, nampak bahwa pendidikan adalah suatu proses pengembangan dan pembinaan potensi manusia yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dari orang dewasa kepada anak didik untuk mencapai suatu kepribadian dalam rangka pewarisan kebudayaan demi kesinambungan identitas sosial.

Setelah memperhatikan secara umum dari pengertian di atas, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian pendidikan Islam. Kata Islam yang dikaitkan kepada kata pendidikan, telah menimbulkan pengertian yang baru di samping terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi karakteristik tertentu dari pendidikan Islam.

Menurut Sanusi Uwes (1996:34), pendidikan Islam adalah upaya mewariskan nilai (Islam) dan mengembangkan kepribadian terdidik sesuai dengan sifat dan tujuan ajaran Islam yang otentik. Otentisitas ajaran Islam bersifat menyeluruh (holistik). Sedang Ahmad Tafsir (1992:32) mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Muhammad Athiyah al-Abrasyi mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegak jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, harus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan (Ramayulis, 1994:3-4).

Sementara itu, M. Arifin (1993:10) mengartikan pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.

Mengacu pada uraian tersebut, dapat dilihat perbedaan antara pendidikan dalam arti umum dan pendidikan Islam. Perbedaan yang paling menonjol adalah pendidikan Islam tidak hanya mementingkan pembentukan pribadi demi kebahagiaan di dunia saja, akan tetapi mencakup juga kebahagiaan di akherat. Disamping itu, pendidikan Islam juga berupaya membentuk pribadi yang Islami, yaitu pribadi yang penuh dengan nilai-nilai agama, penuh keimanan kepada Allah, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad D. Marimba (1989:23) bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan kata lain,

terbentuknya kepribadian muslim yang memiliki kriteria insan kamil. Mengenai kriteria insan kamil ini Ahmad Tafsir (1992:41-44) merumuskan sebagai berikut: (1) Jasmani yang sehat dan kuat serta berketerampilan; (2) Cerdas dan pandai; (3) Rohani yang berkualitas tinggi.

Ilmu Pendidikan Islam

Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah, dan pendidikan Islam adalah bimbingan atau tuntunan dari pendidik kepada anak didik agar tumbuh secara wajar dan berkepribadian muslim. Oleh karena itu perlu diuraikan mengenai pengertian Ilmu Pendidikan Islam.

Menurut Ahmad Tafsir (1992:12) bahwa Ilmu Pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam (al-Qur'an, Hadits dan akal). Sedang Nur Uhbiyati (1995:13) mengemukakan bahwa Ilmu Pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas proses penyampaian materi-materi ajaran Islam kepada anak didik dalam proses pertumbuhannya. Ilmu Pendidikan Islam juga membicarakan bagaimana metode penyampaian ajaran Islam paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperoleh hasil yang memuaskan.

Dengan demikian Ilmu Pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu uraian ilmiah tentang bimbingan pendidikan kepada anak didik dalam perkembangannya agar tumbuh secara wajar sesuai

dengan ajaran Islam dalam rangka membentuk manusia sempurna (insan kamil).

Dasar Ilmu Pendidikan Islam

Mengetahui dasar pendidikan Islam sangatlah penting bagi para pendidik. Karena pendidikan Islam tidak akan bisa berkembang tanpa ada dasar yang kokoh sebagai tempat berpijak dalam melaksanakan pendidikan. Di bawah ini dikemukakan beberapa firman Allah SWT., diantaranya QS. Ali Imran:103, yang artinya:

“Dan janganlah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai” (Depag RI, 1992:93).

Selanjutnya dalam ayat lain Allah SWT berfirman, QS. An Nahl:64, yang berbunyi:

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) ini, melainkan kamu agar dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum ang beriman” (Depag RI, 1992:411).

Kedua ayat tersebut mengandung arti bahwa Allah memerintahkan kepada manusia (Umat Islam) supaya berpegang teguh kepada al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman dalam berbagai macam kegiatan untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Salah satu kegiatan itu adalah

melaksanakan pendidikan menurut ajaran Islam, yang bertujuan untuk keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berusaha menjaga dan menyelamatkan diri beserta keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah Swt. Qs.66, al-Tahrim:6, yang artinya :

“hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....(Depag RI, 1992:951).

Ayat di atas, merupakan dasar dan pedoman bahwa mendidik anak itu wajib bagi setiap orang tua, untuk menjaga diri dan keluarga dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Mendidik anak bagi orang tua bukan hanya menghindarkan anak dari siksa neraka, tapi juga untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu, orang tua wajib membimbing anaknya dengan jalan menyuruh agar selalu berbuat baik dan melarang perbuatan keji (tercela) dan menanamkan kepercayaan kepada Allah. Demikianlah ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Firman Allah Swt. QS. 3. Ali Imran:110, yang berbunyi :

“Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah manusia lainnya; kamu menyuruh kepada hal-hal yang ma`ruf dan mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah.....” (Depag RI, 1992:94).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa proses pendidikan Islam itu berpusat pada kegiatan amar ma'ruf nahi munkar yang didasari iman kepada Allah Swt. Kemudian kependidikan Islam pada hakikatnya ialah membimbing anak agar terbiasa bersikap, bertingkah laku dan beramal menurut aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Quran.

Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, menggariskan dan menjelaskan bahwa seorang muslim dalam kehidupan ini sebagai hamba Allah, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Dengan dasar itu diatur, diarahkan, dan dikendalikan cara berfikir, berbuat bertingkah laku seorang Muslim sebagai individu dalam hubungannya dengan Khalik dan hubungannya dengan makhluk, baik dengan sesama manusia maupun dengan makhluk lainnya.

Umat Islam disamping membimbing anak atau keluarga agar bersikap dan berbuat menurut nilai Islam yang bersumber kepada al-Quran, mereka juga harus mengajarkan dan mengenalkan al-Quran kepada anak mereka sejak usia dini. Mula-mula mengenalkan, kemudian membaca dan menghafalkan huruf-huruf serta ayat-ayat pendek sesuai dengan kemampuan daya berfikir mereka pada usianya. Pendidikan bagi usia kanak-kanak sebagian besar, berlangsung di rumah tangga. Jadi, jelaslah kewajiban mendasari pendidikan anak adalah orang tua dalam keluarga sebagai pendidik pertama dan utama.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa dasar utama pendidikan Islam adalah al-Quran. Al-Quran itu harus memberikan keterangan dan penjelasan supaya manusia memikirkan ayat-ayat itu, sebagaimana firman Allah dalam QS. 16 al-Nahl: 44, yang artinya :

“Dan kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerapkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan (Depag RI, 1992:408).

Ayat-ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah menugaskan kepada Rasulullah Saw, untuk menyampaikan wahyu (al-Quran) dan memberikan keterangan atau penjelasan tentang isi al-Quran kepada umat manusia, supaya mereka berfikir, yaitu memikirkan ayat-ayat Allah dan segala yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi, tugas Allah yang diperintahkan kepada Rasulullah untuk memahami ayat-ayat tersebut, maka Rasulullah dalam menyampaikannya selalu memberikan penjelasan-penjelasan, melalui kata-kata, perbuatan ataupun ketetapan. Semua penjelasan itu terdapat dalam sunnah Rasul. Sunnah Rasul menurut istilah Muhadtsiin (*ahlu al-hadits*) adalah “segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Saw baik berupa *taqrir*, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum nabi diangkat menjadi Rasul

maupun sesudahnya” (T.M. Hasby Ash Shiddiqeey, 1993:5)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa, sunnah sebagai sumber yang kedua yang berfungsi menafsirkan, menjelaskan dan memberikan keterangan tentang al-Quran sesuai dengan kenyataan, situasi dan kondisi sosial serta kebudayaan ketika Rasulullah masih hidup. Untuk itu Rasulullah sebagai guru sekaligus pendidik utama dalam rangka membentuk manusia Muslim dan masyarakat Islam, serta beliau adalah yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Setiap umat Islam hendaklah menjadikan dirinya sebagai guru dan pendidik sekaligus menjadi contoh anak mereka sebagai generasi penerus masyarakat muslim.

Situasi dan kondisi sosial serta kebudayaan selalu berubah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membawa perubahan kepada kehidupan manusia di berbagai aspek, diantaranya aspek pendidikan. Situasi dan kondisi masyarakat di masa Rasulullah masih hidup tentu tidak sama dengan situasi dan kondisi yang kita alami sekarang. Jadi jelaslah metode dan sistem pendidikan pun akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pendidik hendaklah meningkatkan ilmu pengetahuan agar mampu menciptakan metode dan sistem yang baik dalam melaksanakan pendidikan.

Usaha-usaha perbaikan yang diciptakan seseorang untuk perbaikan umat manusia dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan

ajaran Islam yang berpedoman kepada al-Quran dan al-Sunnah. Hal seperti itu disebut ijtihad, yang dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS.29, al-Ankabut:69, yang artinya :

“Dan orang-orang yang berjihad (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang baik (Depag RI, 1992:638).

Ijtihad sebagaimana dijelaskan oleh Zakiah Daradjat (1992:56) adalah istilah para fuqoha yang berarti berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki ilmuwan syari`at Islam untuk menetapkan sesuatu bukan syari`at Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Berdasarkan ayat dan pendapat di atas, maka ijtihad merupakan sistem berpikir ilmiah Islam, yang memberikan kemerdekaan berpikir; ijtihad merupakan sumber modernisasi dalam kebudayaan Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan kehidupan termasuk pendidikan, namun tetap berpedoman terhadap al-Quran dan al-Sunnah. Ijtihad dalam pendidikan harus dikaitkan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini termasuk ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.

Para pakar pendidikan yang mencurahkan pikirannya dengan seluruh ilmu yang dimilikinya untuk menentukan teori-teori, metode dan sistem pendidikan yang baik menurut jenjang pendidikan, mulai pendidikan pra sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi, perbuatan ini disebut ijtihad. Kemudian hasil ijtihad para ahli tersebut dijadikan pedoman dan pelaksanaan pendidikan oleh para pendidik, baik orang tua maupun guru. Jadi, jelaslah bahwa ijtihad termasuk dasar bagi pendidikan Islam. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan Islam itu terdiri dari al-Quran, al-Sunnah, dan ijtihad.

Fungsi Ilmu Pendidikan

Setelah menguraikan pengertian ilmu pendidikan Islam, perlu diuraikan mengenai fungsi dari Ilmu Pendidikan Islam. Menurut Nur Uhbiyati (1995:21) bahwa Ilmu Pendidikan Islam mempunyai tiga fungsi sebagai berikut :

- a. Ia melakukan pembuktian terhadap teori-teori pendidikan Islam yang merangkum aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtiarkan agar menjadi kenyataan.
- b. Ia memberikan bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspeknya bagi pengembangan pengetahuan ilmu pendidikan Islam. Ia memberikan bahan masukan yang berharga (input) kepada ilmu ini. Mekanisme proses kependidikan Islam dari segi operasional

dapat dipersamakan dengan proses mekanisme yang berasal dari penerimaan input (bahan masukan), lalu diproses dalam kegiatan pendidikan kemudian berakhir pada output (hasil yang diharapkan). Dari hasil yang diharapkan itu timbul umpan balik (*feed back*) yang mengoreksi bahan masukan (input). Mekanisme proses semacam ini terus berlangsung selama proses kependidikan terjadi. Semakin banyak yang diperoleh bahan masukan (input) dari pengalaman operasional itu, semakin berkembang pula Ilmu Pendidikan Islam.

- c. Di samping itu pula ia menjadi pengoreksi (korektor) terhadap kekurangan teori-teori yang dipegang oleh Ilmu Pendidikan Islam, sehingga memungkinkan pertemuan antara teori dan praktek semakin dekat, dan hubungan antara keduanya makin bersikap interaktif (saling mempengaruhi).

Mengacu pada pengertian di atas dapat dipahami bahwa pentingnya Ilmu Pendidikan Islam dipelajari oleh setiap Muslim yang berkeinginan agar pendidikan yang diselenggarakannya dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang ditargetkannya. Mengenai perlunya mempelajari Ilmu Pendidikan Islam dalam tulisan ini akan dikemukakan pendapat M. Arifin (1993:12-13) yang merumuskan sebagai berikut :

- a. Pendidikan sebagai usaha pembentukan pribadi Muslim harus melalui proses yang panjang,

dengan *resultat* (hasil) yang tidak dapat diketahui dengan segera, berbeda dengan membentuk benda mati yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan “pembuatnya”. Dalam proses pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dan berhati-hati berdasarkan pandangan dan pikiran-pikiran atau teori yang tepat, sehingga kegagalan atau kesalahan-kesalahan langkah pembentuknya terhadap anak didik dapat dihindarkan. Oleh karena lapangan tugas atau sasaran adalah makhluk hidup yang sedang berkembang dan bertumbuh yang mengandung berbagai kemungkinan. Bila kita salah bentuk, maka kita akan sulit memperbaikinya.

- b. Pendidikan Islam pada khususnya yang bersumberkan nilai-nilai agama Islam disamping menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya adalah proses ikhtiariyah yang secara paedagogik mampu mengembangkan hidup anak didik ke arah kedewasaan/kematangan yang menguntungkan dirinya. Oleh karena itu usaha ikhtiariyah tersebut dapat dilakukan hanya berdasarkan kemauan pendidik yang dilandasi dengan teori-teori kependidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah paedagogik.
- c. Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mensejahtera-

kan dan membahagiakan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, baru dapat mempunyai arti fungsional dan aktual dalam diri manusia bilamana dikembangkan melalui proses kependidikan yang sistematis. Oleh karena itu teori-teori pendidikan Islam yang disusun secara sistematis merupakan kompas bagi proses.

- d. Ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang kehidupan manusia di dunia di mana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih amaliah yang buahnya akan dipetik di akhirat nanti, maka pembentukan sikap dan amaliyah dalam pribadi manusia baru dapat efektif bilamana dilakukan melalui peroses kependidikan yang berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kependidikan.
- e. Teori-teori, hipotesis dan asumsi-asumsi kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam sampai kini masih belum terjelaskan secara ilmiah meskipun bahan-bahan bakunya telah tersedia, baik dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadits maupun *qaul* ulama. Untuk itu diperlukan secara sistematis introdusir ilmiah yang didukung dengan hasil penelitian yang luas.

Dengan demikian Ilmu pendidikan Islam berfungsi dalam rangka pembuktian terhadap teori-teori kependidikan Islam, juga memberikan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dan

pengembangannya, serta menjadi pengoreksi terhadap teori-teori Ilmu Pendidikan Islam.

B. Komponen-komponen Pendidikan Islam

SEBELUM lebih jauh membahas mengenai komponen-komponen dalam pendidikan Islam, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai pandangan dasar yang berhubungan dengan pendidikan Islam dan komponen-komponen menurut para ahli pendidikan Islam.

Pandangan dasar yang berhubungan dengan teorisasi dalam ilmu pendidikan Islam adalah mencakup masalah kependidikan. Hal ini, M. Arifin (1993:16-17) menjelaskan masalah pendidikan yang pada garis besarnya dapat dianalisis dari item konsepsional sebagai berikut :

- a. Hakikat pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik sehingga menjadi dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.
- b. Asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam perikehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohaniah, kehidupan materi dan mental, spiritual dan lain-lain.
- c. Modal dasar pendidikan Islam adalah kemampuan dasar atau fitrah untuk berkembang dari pribadi-pribadi manusia. Kemampuan dasar ini merupakan potensi fisik dan mental spiritual yang diberikan Allah.

- d. Sasaran strategi pendidikan Islam adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, yaitu mengintegrasikan iman dan takwa ke dalam pribadi manusia.
- e. Ruang lingkup pendidikan Islam mencakup kegiatan pendidikan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dalam bidang atau lapangan hidup manusia seperti keagamaan, kekeluargaan, ekonomi, sosial, politik, seni budaya, dan ilmu pengetahuan.
- f. Metode yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan Islam adalah metode yang didasarkan atas pendekatan-pendekatan *religijs*, *humanity* dan *scientific*. Sistem pendekatan ini dilakukan atas landasan nilai-nilai moral keagamaan.

Selanjutnya mengenai komponen pendidikan akan dikemukakan pendapat beberapa ahli pendidikan, seperti yang dikemukakan Nawawi (1993:106) bahwa dalam suatu sistem situasi pendidikan terdiri dari: Pendidik, anak didik, relasi (alat pendidikan), tujuan pendidikan, dan sosio kultural. Kemudian Bawani yang sejalan dengan pendapat tersebut mengemukakan bahwa dalam kegiatan pendidikan paling kurang harus ada tiga unsur: *yang mendidik, yang dididik, dan tujuan yang hendak dicapai* (Bawani, 1987:15). Lebih tegas lagi Ahmad D. Marimba (1989:19) merumuskan unsur-unsur pendidikan sebagai berikut:

1. Usaha (kegiatan) yang bersifat bimbingan secara sadar;
2. Adanya pendidik atau pembimbing atau penolong;
3. Ada yang dididik atau siterdidik;
4. Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan;
5. Dalam usaha itu ada alat-alat yang dipergunakan.

Pendapat lainnya dikemukakan Aminuddin Rosyad bahwa komponen-komponen esensial yang harus dibahas dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut :

1. Agama Islam (materi);
2. Manusia yang dididik (*homo educandum*) dan yang mendidik (*homo educandus*);
3. Tujuan pendidikan Islam;
4. Cara-cara mendidik;
5. Alat-alat pendidikan;
6. Lingkungan pendidikan;
7. Evaluasi pendidikan (Ahmad Tafsir, ed., 1995: 15).

Muhaimin dan Abdul Mujib (1993:167) mengemukakan bahwa komponen-komponen dasar pendidikan Islam adalah: pendidik, anak didik, kurikulum, metode dan evaluasi. Untuk lebih jelas mengenai komponen pendidikan tersebut di bawah ini akan dijelaskan komponen pendidikan tujuan, pendidik, anak didik, alat pendidikan dan lingkungan.

Tujuan

Pendidikan Islam mengarah pada pengembangan bakat-bakat manusia dan membangkitkan nilai-nilai kebajikan yang mulia dalam dirinya. Tujuan ini merupakan pondasi utama, tempat dibangunnya kepribadian manusia, masyarakat dan peradaban Islam. Oleh karenanya dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat pendidikan. Dalam hal ini Muhaimin dan Abdul Mujib (1993:153-154) merumuskan secara umum tujuan pendidikan Islam yang harus berorientasi pada hakikat pendidikan meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Tugas dan tujuan hidup manusia
Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu (QS.3:1991). Tujuan diciptakan manusia adalah hanya untuk Allah Swt. Indikasi tugasnya adalah untuk beribadah dan berfungsi sebagai wakil Allah di muka bumi yang harus memakmurkan dunia ini (Abdullah dan Khalifatullah);
- b. Memperhatikan sifat-sifat dasar manusia
Manusia yang diciptakan Allah dibekali dengan berbagai macam fitrah yang mempunyai kecenderungan pada kebenaran (*hanief*) yakni berupa agama Islam (QS. 18:29), sebatas kemampuan yang dimilikinya;

c. Tuntunan Masyarakat

Yang menjadi tuntunan masyarakat, dalam hal ini berkisar pada dua bidang yaitu berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, dan pemenuhan terhadap kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan selanjutnya di dunia.

d. Dimensi Kehidupan Ideal Islam

Nilai yang harus dikembangkan dari dimensi kehidupan ideal Islam adalah berupaya agar meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia dengan pengolahan dan pemanfaatan alam semesta ini yang dikaruniakan Allah dengan didasari sebagai bekal kehidupan kekal. Juga mengupayakan mendorong manusia agar berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang lebih membahagiakan.

Dari uraian tersebut, tampaklah bahwa tujuan pendidikan Islam senantiasa selaras dengan tujuan hidup manusia, sebagaimana firman Allah QS. 51:56 yang artinya :

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (Depag RI, 1992:862).

Dari ayat tersebut bila diaplikasikan pada kehidupan manusia, maka pendidikanpun harus

mempunyai tujuan yang sama, yaitu: mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan berdasarkan Islam. Dalam hal hubungan ini, Abdurrahman al-Nahlawi (1997:117) menyebutkan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Kemudian Syahmini Zaini (1986:48-49) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berjasmani kuat, sehat dan terampil, berotak cerdas dan berilmu banyak, berhati tunduk kepada Allah, serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi dan pendirian yang teguh.

Sementara itu, Abdurrahman Saleh yang dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Mujib (1993:159) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam empat macam yaitu:

- 1) Tujuan Pendidikan Jasmani
Yaitu persiapan diri menjadi pengemban tugas khalifah di muka bumi dengan sarana pelatihan keterampilan fisik.
- 2) Tujuan Pendidikan Rohani
Yaitu meningkatkan jiwa, demi kesetiaan hanya kepada Allah semata dan hanya melaksanakan moral Islam yang diteladani Rasulullah Saw., dengan berdasarkan pada al-Quran. Sehingga ia berupaya memurnikan dan mensucikan diri dari sikap negatif.

3) Tujuan Pendidikan Akal

Yaitu mengarahkan integrasi untuk menemukan kebenaran dari pesan-pesan ayat kekuasaan yang membawa iman kepada-Nya. Pendidikan akal ini dapat dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu :

- a. Pencapaian kebenaran ilmiah
- b. Pencapaian kebenaran empiris
- c. Pencapaian kebenaran meta empiris/
kebenaran filosofis

4) Tujuan Pendidikan Sosial

Yaitu pembentukan keperibadian yang utuh dari roh, tubuh dan akal.

Menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Hasan Sulaiman (1993:24), tujuan pendidikan Islam itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Terbentuknya insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Terbentuknya insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dari pendapat tersebut, tampaklah bahwa tujuan pendidikan Islam utama adalah taqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hubungan ini, M. Arifin (1993:236-237) merumuskan mengenai tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu: tujuan akhir pendidikan Islam adalah merealisasikan manusia yang beriman dan bertak-

wa serta berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan diri kepada khaliknya dengan sikap dan kepribadian yang bulat dengan merujuk kepada penyerahan diri kepada-nya dalam segala aspek kehidupannya, duniawiyah dan ukhrawiyah.

Memperhatikan uraian mengenai tujuan pendidikan Islam tersebut, tergambar bahwa tujuan adalah tujuan yang mengharapkan adanya pembaharuan yang sesuai dengan norma Islam, segala perilaku manusia juga didasarkan pada nilai iman dan takwa kepada Allah Swt. Takwa dalam arti ketaatan kepada kekuasaan Allah yang Mutlak dan mengandung penyerahan diri secara total kepada-Nya, serta menjadikan manusia menghambakan diri kepada Allah. Jadi, tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah membentuk bakat dan kemampuan manusia agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang diridhai Allah SWT.

2. Pendidik

Dalam melaksanakan pendidikan Islam, peran pendidik sangat penting artinya dalam proses pendidikan, karena ia memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghormati dan menghargai orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat dan memuliakan mereka melebihi daripada orang Islam lainnya yang bukan pendidik dan yang tidak ber-

ilmu pengetahuan. Penghormatan dan penghargaan Islam terhadap orang-orang berilmu terbukti dalam firman Allah QS. 58, Al-Mujadalah :11, yang artinya:

“... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag RI, 910-911).

Bagi orang-orang yang berpengetahuan dan mau mengamalkan atau mengajarkan ilmunya kepada siapa saja yang membutuhkan, akan disukai Allah SWT. serta didoakan oleh penghuni langit dan bumi. Sebagaimana hadits Nabi Saw. yang artinya:

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya dan semua penduduk langit dan bumi hingga semut yang di dalam lobangnya dan ikan-ikan selalu mendoakan kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan pada manusia” H.R Turmudzi (Salim Bahreisy, 1983:318)

Dari dalil-dalil tersebut, jelaslah bagi kita betapa beruntung orang-orang yang berilmu pengetahuan dan mau mengamalkan atau mengajarkan ilmunya kepada yang membutuhkan, sebaliknya merugilah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan namun menyembunyikan dan tidak mengamalkan atau mengajarkan kepada orang yang membutuhkan akan ilmu tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW., yang artinya :

“Abu Hurairah R.a. berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Siapa yang ditanyai suatu ilmu agama, lalu dia menyembuyikannya, maka akan dikembalikan mulutnya pada hari kiamat dengan kendali api neraka” H.R. Abu Dawud, dan Turmudzi (Salim Bahreisy, 1983:320).

Dalam hal ini, al-Ghazali yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman (1993:32) menyebutkan bahwa :

“Makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah sejenis manusia dan bagian yang paling mulia diantara substansi manusia adalah hatinya. Sedangkan guru adalah orang yang berusaha menyempurnakan, meningkatkan, mensucikan dan membimbing hati itu mendekati kepada Allah SWT., dan dari segi lain termasuk tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dikatakan khalifah Allah, karena Allah telah membuka hati seorang alim dengan ilmu, yang justru ilmu itu menjadi identitasnya. Karena itu, ia bagaikan bendahara bagi personalia-personalia di dalam khazanah Tuhan”.

Dalam konteks pendidikan Islam, “pendidik” disebut dengan “*Murobbi*”, *Mu`allim*, *Mu`addib*. Tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum adalah mendidik, baik potensi psikomotor, kognitif, maupun potensi afektif. Potensi ini harus dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat setinggi mungkin, menurut ajaran Islam (Ahmad Tafsir, 1992:74).

Pendidik pertama dan utama adalah orang tua sendiri yang bertanggung jawab penuh atas perkembangan anak-anaknya, karena sukses anaknya adalah sukses orang tuanya juga. Oleh karena itu pelaksana pendidikan Islam menurut Zakiah Daradjat yang dikutip oleh Team Dosen IAIN Sunan Ampel Malang (1996:181) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dibebankan kepada: “keluarga, sekolah dan masyarakat”.

Dalam kenyataan hidup, tuntutan terhadap orang tua semakin banyak, sehingga tak mengherankan jika orang tua menitipkan anaknya ke lembaga sekolah. Karena maksud definisi pendidik di sini adalah mereka yang memberikan pelajaran kepada peserta didik, yang memegang suatu pelajaran tertentu di sekolah. Penyerahan anak-anak di sekolah bukan berarti orang tua lepas dari tanggung jawabnya sebagai pendidik pertama dan utama, tetapi orang tua masih mempunyai andil dalam membina dan mendidik anak-anaknya.

Di sekolah, pendidik disebut guru (khususnya di Indonesia). Zakiah Daradjat dkk (1992:39) mengemukakan bahwa orang India dahulu menganggap guru itu sebagai orang suci dan sakti. Di Jepang, guru disebut *Sensei*, artinya yang lebih dahulu lahir, dan lebih tua. Di Inggris, guru disebut *Teacher* dan di Jerman guru disebut *der lehrer* keduanya berarti pengajar. Akan tetapi kata guru sebenarnya bukan saja mengandung arti pengajar melainkan juga pendidik, baik didalam maupun di

luar sekolah. Ia harus menjadi penyuluh masyarakat.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai tugas, syarat, dan sifat guru dalam pandangan Islam. Dalam hubungan ini, Muhaimin dan Abdul Mujib (1993:170) merumuskan beberapa tugas guru diantaranya :

- 1) Sebagai pengajar (*instruksional*) yang bertugas merencanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan.
- 2) Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan anak didik kepada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil seiring tujuan Tuhan menciptakannya.
- 3) Sebagai pemimpin (*manajerial*) yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, anak didik, dan masyarakat yang menyangkut upaya mengarahkan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan partisipasi atas program yang dilakukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, seorang pendidik dituntut untuk mempunyai seperangkat kemampuan keguruan yaitu:

- 1) Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan, kesediaan, kemampuan, pertumbuhan dan perbedaan anak didik.
- 2) Membangkitkan gairah anak didik.
- 3) Menumbuhkan bakat dan sikap anak didik yang baik

- 4) memperhatikan perubahan-perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses mengajar.
- 5) Adanya hubungan manusiawi dalam proses belajar mengajar (Muhamin dan Abdul Mujib 1993: 170).

Adapun mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru, Adang Hambali (1996:41) merumuskan sebagai berikut:

- 1) Mampu dalam hal ilmu dan metodologi
- 2) Baligh integratif, artinya dalam hal umur, kepribadian seperti ikhlas, kasih sayang, cinta jujur dan sebagainya.

Sementara itu, Munir Mursyi yang dikutip oleh Ahmad Tafsir (1992:81) merumuskan mengenai syarat guru sebagai berikut :

- 1) Umur harus sudah dewasa;
- 2) Kesehatan jasmani dan rohani;
- 3) Keahlian harus menguasai bidang yang diajarkan dan menguasai Ilmu Pendidikan (termasuk ilmu mengajar);
- 4) Harus berkepribadian Muslim.

Selanjutnya, mengenai sipat yang harus dimiliki oleh seorang guru, Nashih Ulwan (1992:174) merumuskan sebagai berikut :

- 1) Ikhlas;
- 2) Taqwa;
- 3) Berilmu;
- 4) Penyantun dan pemaaf;

5) Merasa bertanggung jawab.

Menurut al-Abrasi yang dikutip oleh Ahmad Tafsir (1992:82) mengemukakan sifat-sifat yang harus ada pada guru adalah :

- 1) *Jubud*: Tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karena mencari keridhaan Allah;
- 2) Bersih tubuhnya, penampilan lahiriyahnya menyenangkan ;
- 3) Bersih jiwanya, tidak mempunyai dosa besar;
- 4) Tidak riya yang akan menghilangkan keikhlasan;
- 5) Tidak mendendam rasa dengki dan iri hati;
- 6) Tidak menyenangi permusuhan;
- 7) Ikhlas dalam melaksanakan tugas;
- 8) Perkataan sesuai dengan perbuatan;
- 9) Tidak malu mengakui ketidak tahuan;
- 10) Bijaksana;
- 11) Tegas dalam perkataan dan perbuatan;
- 12) Rendah hati;
- 13) Lemah lembut;
- 14) Pemaaf;
- 15) Sabar, tidak marah karena hal-hal kecil;
- 16) Berkepribadian;
- 17) Tidak merasa rendah diri;
- 18) Bersifat kebapakan (mampu mencintai murid seperti mencintai anaknya sendiri);
- 19) Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan, perasaan dan pemikiran.

Dari uraian di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tugas sebagai guru sangatlah berat, tetapi sangatlah mulia. Dikatakan berat karena jabatan guru menuntut pengorbanan yang besar serta dedikasi yang tinggi. Disamping itu guru jualah yang membimbing orang untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelum-nya, orang bodoh menjadi pintar, orang yang semula dalam kegelapan menjadi berada dalam keadaan terang benderang dan seterusnya. Walhasil berkat jasa gurulah anak dapat berbuat dan mengetahui banyak hal.

Peserta Didik

Dalam pengertian pendidikan secara umum, bahwa yang disebut peserta didik adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Dalam arti sempit dan khusus, peserta didik dapat diartikan sebagai anak yang belum dewasa yang tanggung jawabnya diserahkan pada pendidik.

Dengan demikian dapat diambil satu kesimpulan bahwa anak didik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, adalah orang yang belum dewasa. *Kedua*, adalah orang yang menjadi tanggung jawab pendidik.

Dalam pendidikan Islam anak didik merupakan satu komponen yang sangat penting, karena tanpa ada komponen tersebut pendidikan berarti tidak ada, oleh karena itu komponen pendidikan tidak

dapat diganti dengan faktor-faktor yang lain, karena ia merupakan obyek dan subyek pertama dari pendidikan. Untuk mendapatkan kejelasan, terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa sudut pandang tentang peserta didik:

a. Dilihat dari segi Psikologi

Hakikat hidup manusia, bila dilihat dari sudut psikologi adalah makhluk yang terbentuk dari unsur fisik (jasmaniah) dan psikis (rohaniah) yang berkembang saling mempengaruhi; satu sama lain tidak terpisah (M. Arifin et.all., 1991:26). Menurut pandangan ini, manusia didik adalah makhluk yang sedang dan dalam proses perkembangan dan tumbuh menurut potensi masing-masing. Agar dapat berkembang secara optimal, maka manusia membutuhkan arahan dan bimbingan.

Secara psikologis, peserta didik yang berada dalam masa perkembangan, harus mengalami perubahan secara kualitatif dan kuantitatif. Contoh perubahan kualitatif seperti bertambah matang, dewasa dan sebagainya, dan contoh perubahan secara kuantitatif seperti ia harus mengalami perubahan tumbuh dimulai dari tinggi badan, berat badan, dan lain-lain (segala yang berhubungan dengan fisik).

b. Dilihat dari segi Paedagogis

Dalam pandangan ini, para ahli didik memandang bahwa manusia adalah sebagai

animal educandum: makhluk yang memerlukan pendidikan (Nur Uhbiyati, 1995:95). Manusia dengan segala potensinya dapat dididik ke arah yang diciptakan, setarap dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk bisa hidup dilingkungannya manusia sangat memerlukan bantuan dan penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini baru dapat dikembangkan dengan bantuan orang tua sebagai orang pertama yang dijumpai ketika ia baru dilahirkan dan merawatnya di lingkungan keluarga (M. Arifin et. all, 1991:221).

Bantuan lain yang dibutuhkan selain dari orang tua dan keluarga adalah bantuan akademik dari lingkungan sekolah. Hal ini sangat penting untuk pengembangan potensi yang dimilikinya. Kemudian, apabila potensi tersebut dididik dan dikembangkan ia akan menjadi manusia yang secara psikis fisik dan mentalnya memadai.

c. Dipandang dari segi religius

Menurut pandangan ini, peserta didik adalah manusia yang tergolong sebagai makhluk berketuhanan yang mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi manusia yang bertaqwa dan taat serta tunduk kepada Allah.

d. Dari pandangan Historis

Pandangan ini menyebutkan bahwa peserta didik harus diartikan sebagai makhluk belajar

yang memiliki kemampuan menangkap makna peristiwa-peristiwa historis sebagai satu fenomena kultural umat manusia sepanjang jaman. Dalam pribadi peserta didik ditanamkan sikap pandangan yang lebih berorientasi kepada peristiwa-peristiwa historis masa lampau peserta didik akan mendapatkan berbagai alternatif dalam memecahkan problem-problem hidup, baik secara pribadi, masyarakat, maupun bangsa.

Dari pandangan-pandangan di atas, dapatlah ditarik satu kesimpulan, yang menjadi peserta didik dalam pendidikan Islam setiap manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya dan masih membutuhkan bimbingan dan didikan orang lain untuk mencapai tujuan hidupnya yang berdasarkan pada hakikat dan fungsi hidupnya, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi.

Alat Pendidikan

Alat pendidikan menurut Sutari Imam Barnadib (1995:96) adalah tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedang menurut M. Ngalim Purwanto (1986:223) bahwa yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah segala usaha atau perbuatan dari sipendidik yang ditujukan untuk melaksanakan pendidikan.

Mengacu pada pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan alat pendidikan dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu, baik benda konkrit ataupun abstrak berupa tindakan yang dilakukan oleh pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam sangat membutuhkan alat, maka pendidik dituntut untuk pandai-pandai memilih dan mempergunakan alat, sebab apabila tidak bisa mempergunakan alat atau salah menggunakan alat, maka sulit untuk mencapai tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Quthb 1988:18) bahwa :

Alat itu merupakan satu-satunya sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita yakini. Ia harus mendapat perhatian kita yang sempurna, kita harus mengadakan studi yang mendalam. Oleh karena alat yang tidak baik akan menggagalkan tercapainya tujuan yang baik, dan membuat kita salah arah.

Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa alat merupakan suatu komponen terpenting dalam pendidikan dan yang menjadi subyek dari alat pendidikan itu adalah si pendidik.

Mengenai bentuk dari alat-alat pendidikan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagaimana telah dikemukakan yaitu, sarana yang termasuk dalam benda konkrit diantaranya adalah tempat atau ruangan yang memadai, buku atau kitab-kitab pelajaran, alat-alat praktek dan lain sebagainya. Sedang yang termasuk benda abstrak diantaranya adalah metode, evaluasi

pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis alat pendidikan yaitu: kurikulum, metode, evaluasi, dan sarana.

1. Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan tingkat sekolah (Sudirman N.et. all., 1991:8). Sedang menurut Nana Sudjana (1991:3), yang dimaksud dengan kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh guru di sekolah. Dan menurut Zakiyah Daradjat (1992:122) bahwa kurikulum dapat dipandang sebagai "satuan program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu".

Pendidikan akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan dan kemajuan zaman. Oleh karenanya dalam pengembangan pendidikan salah satunya ditentukan oleh kurikulum. Sedang kurikulum itu sendiri mengalami atau selalu berubah yang disesuaikan dengan keadaan siswa, zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi kurikulum itu bersifat dinamis (selalu berubah). Dalam hal ini perumusan kurikulum menurut beberapa ahli pendidikan harus mencerminkan tuntunan hidup, baik anak didik maupun masyarakat serta lingkungan. Dikemukakan H.

Herne yang dikutip oleh M. Arifin et. all (1991:80) bahwa dalam pendidikan, substansi (materi) yang harus dimasukan dalam kurikulum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) *The ability and needs of children* yaitu kecakapan yang diperoleh dari belajar dan kebutuhan-kebutuhan anak didik.
- 2) *The legitimate demands of society* yaitu, tuntutan yang sah dari masyarakat sekitar.
- 3) *The kind of universe in wich we life* yaitu, jenis-jenis jagad raya dimana kita hidup.

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak didik, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, Ahmad Tafsir (1992: 71) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus dimulai dari penyusunan dan perumusan tujuan pendidikan menurut Islam. Pada pembahasan mengenai tujuan, telah dibahas tentang tujuan pendidikan Islam dimana pada dasarnya mengharapkan adanya pembaharuan yang sesuai dengan norma Islam, segala prilaku manusia juga didasarkan pada nilai iman dan taqwa kepada Allah SWT. Taqwa dalam arti ketaatan kepada Allah SWT yang mutlak dan mengandung penyerahan diri secara total kepadanya; Menjadi manusia yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah SWT.

Dengan demikian inti dari tujuan pendidikan Islam adalah iman, maka seluruh mata pelajaran dan kegiatan belajar haruslah bertolak dari dan menuju kepada keimanan. Kemudian mengingat inti pendidikan agama (Islam) adalah iman, maka kurikulum pendidikan Islam hendaknya dapat mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam jiwa anak didik.

Dalam ilmu pendidikan Islam, kurikulum merupakan komponen yang amat penting, karena ia merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang diproses di dalam sistem pendidikan Islam. Selain itu kurikulum pun menjadi salah satu bagian dari bahan masukan yang mengandung fungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan Islam. Maka isi kurikulum pendidikan Islam harus membantu anak didik mengembangkan potensi dirinya mencapai kualitas pribadi muslim yang paripurna, yaitu pribadi yang pada domain kognitifnya menguasai ilmu-ilmu Islam, domain afektifnya menjwai akidah tauhid, dan domain psikomotoriknya beramal saleh sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan Islam dipandang sebagai cermin idealitas Islami yang tersusun dalam bentuk program dan berbentuk kurikulum.

2. Metode

Metode berasal dari bahasa latin “*meta*” yang berarti melalui dan “*hodos*” yang berarti jalan. Dalam bahasa Arab metode disebut “*thariqah*” artinya jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam menjalankan sesuatu, sedang menurut istilah metode adalah suatu sistem atau cara yang mengatur cita-cita (Nur Uhbiyati, 1995:136). Selanjutnya, Winarno Surakhmad (1980:75) berpendapat bahwa: Metode adalah cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai satu tujuan. Makin baik metode itu makin efektif pula pencapaian tujuan.

Untuk menetapkan apakah sebuah metode disebut baik, diperlukan patokan yang bersumber dari beberapa faktor. Faktor utama yang akan menentukan adalah tujuan yang akan dicapai. Khusus mengenai metode mengajar di kelas, selain dari faktor tujuan juga murid, faktor situasi dan juga guru ikut menentukan efektif tidaknya sebuah metode.

Senada juga dilontarkan oleh pakar pendidikan Islam asy-Syaibani (1984:553) bahwa :

Metode mengajar bermakna segala segi yang terarah dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian-kemestian mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan muridnya, dan suasana dalam sekitarnya dan tujuan menolong muridnya untuk mencapai belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki

pada tingkah laku mereka. Selanjutnya menolong mereka memahami, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, minat, dan nilai-nilai yang diinginkan.

Dengan demikian metode pendidikan Islam adalah segala cara yang tertentu, digunakan untuk mencapai tujuannya yaitu membentuk pribadi muslim. Di dalam Ilmu Pendidikan Islam, metode yang bisa dipergunakan membentuk pribadi muslim itu memang banyak. Karena suatu metode itu tidak bersifat universal, bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi, efektifitas metode pendidikan juga tergantung pada situasi dan kondisi kapan dan metode pendidikan itu berlangsung. Di antara metode pendidikan Islam itu adalah :

a. Pembiasaan

Menurut Ibnu Jauzy yang dikutip al-Abrasy (1984:106) bahwa pembentukan yang utama adalah di waktu kecil, maka apabila seorang anak dibiarkan melakukan sesuatu (yang kurang baik), dan itu menjadi kebiasaannya, maka sukarlah meluruskannya.

Dengan demikian agar pembiasaan itu bisa terlaksana dengan baik, maka harus dimulai sebelum terlambat, sebelum anak mempunyai kebiasaan lain yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Sebab itu untuk mendidik agar

biasa menjalankan shalat harus dimulai sejak dini. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dalam haditsnya yang berbunyi:

“Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak shalat) ketika sudah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di dalam tidur dengan saudara perempuan” (H. R. Hakim dan Abu Dawud, dikutip dari as-Syuyuthi, 1967:291).

Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak anak-anak, dan juga terus akan berpengaruh sampai di hari tuanya. Muhammad Quthb, (1988:263) mengatakan bahwa Islam mempergunakan kebiasaan itu tanpa susah payah, tanpa banyak kehilangan dan kesulitan. Jadi, kebiasaan itulah yang pada akhirnya menjadi watak dan kepribadian anak di hari tuanya. Sebagai ungkapan kata mutiara Arab mengatakan: “siapa yang membiasakan sesuatu diwaktu mudanya, maka di waktu tua akan menjadi kebiasaannya (Al-Abrasy, 1984: 112). Demikian pula Nabi Saw. bersabda:

“Lazimlah olehmu berbuat jujur, karena kejujuran itu membawa kebajikan, sedang kebajikan itu membawa ke sorga, dan tidak henti-hentinya seorang berbuat jujur dan berusaha ingin jujur, sehingga iapun dicatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur” (H.R. Ahmad, Muslim dan Turmudzi, dikutip dari As-Syuyuthi, 1967:205).

Metode pembiasaan ini sangat efektif bagi anak-anak dalam pendidikan Akhlak, sebab itu harus dimulai sebelum anak mempunyai akhlak yang tercela.

b. Keteladanan (Uswatun Hasanah)

Pengaruh keteladanan memang besar sekali bagi perkembangan kepribadian anak, terutama bagi anak yang belum memahami baik dan buruk dalam arti susila. Oleh karena itu, menurut Muhammad Quthb (1988:325) bahwa metode yang efektif dan sukses, sebagai berikut:

Mengarang buku mengenai pendidikan adalah mudah, begitu juga menyusun metode pendidikan, kendati membutuhkan ketelitian, keberanian dan pendekatan yang menyeluruh. Namun hal itu tetap masih merupakan yang dikertas, tergantung di awang-awang, selama tidak bisa terjamah menjadi kenyataan yang hidup di dunia nyata, bila tidak bisa menjamah manusia yang menterjemahkannya, dengan tingkah laku dan tindak tanduk, ungkapan-ungkapan rasa dan pikiran: menjadi dasar-dasar dan arti suatu metodologi.

Keteladanan merupakan *Lisanu al-bal* yang tanpa banyak bicara namun dapat menggerakkan hati anak didik untuk melakukan hal-hal yang baik. Pengaruh keteladanan memang sangat besar pada anak, sebagaimana diungkapkan oleh al-Jamali (1986:90) bahwa :

Diantara faktor-faktor yang mempunyai pengaruh dalam pendidikan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari adalah contoh dan suri tauladan yang diikuti oleh anak-anak dan orang dewasa. Al-Qur`an telah menandakan dengan tegas pentingnya contoh/teladan dan pergaulan yang baik dalam usaha yang baik dalam usaha membentuk kepribadian seseorang.

Dalam hubungan ini, firman Allah SWT Swt. dalam al-Qur`an surat al-Ahjab ayat 21, yang artinya :

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah SWT dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah SWT” (Depag RI, 1992: 670).

Mengacu pada uraian tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya seorang guru merupakan contoh dari anak didiknya, jika benar ia bisa menyantuni dan memberi teladan yang baik. Tetapi ia juga bisa menjadi sarana yang jelek dan merusak, bila menyesatkan dan menggiring mereka ke lembah duka, karena tidak bisa menjadi teladan yang baik. Sebab itu metode keteladanan ini harus diperhatikan, dan sebagaimana dikatakan Ki Hajar Dewantara, guru harus bisa *ing Nyarso Sun Tulodo*. Metode inilah yang banyak digunakan Rasulullah SAW., dalam mendidik umatnya.

c. Pemberian Nasihat

Metode ini merupakan metode yang sudah umum dilakukan dalam pendidikan. Menurut Muhammad Quthb (1988:334) bahwa dalam jiwa manusia terdapat pembawaan yang dapat terpengaruh oleh kata-kata yang didengar. Pembawaan itu biasanya tidak tetap, karena itu kata-kata harus diulang-ulang. Sedang al-Jamali (1986:87) mengatakan bahwa :

“Seseorang kadang-kadang lebih senang mendengarkan/memperhatikan orang-orang yang dicintai dan ia jadikan tempat mengadukan segala permasalahannya. Dalam situasi demikian pelajaran atau nasihat akan benar-benar mempunyai pengaruh yang mendalam pada dirinya, lebih-lebih kalau nasihat itu disampaikan dengan penuh perasaan kasih sayang dari hati ke hati.

Dalam pendidikan memang tak cukup dengan keteladanan yang baik saja, sebab anak didik melakukan perbuatan-perbuatan buruk, karena dorongan diri sendiri tanpa contoh. Dalam hubungan ini, Muhammad Quthb (198:335) menyatakan:

“Ayah atau ibu tak pernah mencuri, tetapi anak kadang bisa tergerak untuk mencuri karena berbagai faktor di dalam dirinya. Oleh karena itu anak memerlukan nasihat yang lembut, halus tetapi berbekas yang bisa membuat anak kembali baik dan tetap berakhlak mulia. Manusia kadang-kadang tidak bisa mengambil teladan itu

saja kadang belum bisa membuat orang menjadi baik.

Dalam hubungan ini, banyak sekali ayat-ayat al-Qur`an yang merupakan nasihat dan pelajaran bagi manusia, bahkan bila diteliti semua ayat merupakan nasihat dan pelajaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT SWT. QS. 4, al-Nisa:58, yang artinya :

“Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kamu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak; dan (Ia perintahkan) agar menghukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT menasihati kamu sebaik-baiknya kamu dengan sebaik-baiknya perkara, karena sesungguhnya Allah SWT itu maha pendengar, maha pelihat” (Depag RI, 1992:128).

Qur`an Surat 16, al-Nahl:125, artinya:

“Serulah ke jalan Tuhan-mu dengan bijaksana dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan-mu adalah yang lebih mengetahui orang yang sesat dari jalan-Nya (Depag RI, 1992:421).

d. Merangsang Berfikir

Banyak ayat-ayat al-Qur`an yang merangsang manusia untuk berfikir, sehingga ia dapat mencapai suatu kebenaran. Dalam pendidikan, metode ini bisa digunakan untuk mengembangkan segi kognitif anak sehingga menumbuhkan

iman yang kuat kepada Allah Maha Pencipta. Sebagaimana Firman-nya dalam QS. al-Waqi`ah:63-65, yang artinya:

“Maka sudah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Kamukah yang menanamkannya atau Kami penanamnya? Jika Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan racikan-racikan kayu, maka kamu berduka cita” (Depag RI, 1992:896).

Dalam kaitan ini Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Pikirkanlah tentang ciptaan Allah SWT dan jangan engkau pikirkan zat Allah SWT agar tidak sesat”.

Dengan demikian banyak metode pendidikan yang dapat digali dari ayat-ayat al-Qur`an maupun Hadits-Hadits Rasulullah. Dalam risalah yang terbatas ini tidak mungkin penulis dapat mengungkapkan secara keseluruhan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode-metode yang kan digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu tujuan yang hendak dicapai, materi yang disajikan, keadaan anak didik, kemauan pendidik, dan juga situasi pendidikan yang sedang berlangsung. Sehingga metode yang digunakan akan menjadi efektif dan berdaya guna dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

3. Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *'to evaluate'* yang berarti 'menilai', penilaian, atau evaluasi. Menurut Edwind Wand dan Gerald W. Brown yang dikutip oleh Ramayulis (1994:97) menyatakan bahwa evaluasi adalah *'the act or process to determinating the value of some thing'*. (Penilaian dalam pendidikan berarti seperangkat tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan). Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan agama (Islam) adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama Islam (Zuhairini, 1983:154).

Sementara itu, Ramayulis (1994:97-98) menyebutkan bahwa penilaian dalam pendidikan Islam bertujuan agar keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang Islami sehingga tujuan pendidikan Islam yang direncanakan dapat dicapai.

Adapun mengenai fungsi evaluasi pendidikan, Ahmad Tafsir (1992:77-78) mengemukakan bahwa secara umum evaluasi dapat membantu perhitungan potensi murid dalam belajar. Evaluasi dapat memberikan informasi paling akurat mengenai kemampuan akademik siswa. Evaluasi dapat juga menunjukkan bagaimana murid tumbuh, karena itu evaluasi dapat meningkatkan efektivitas pengajaran.

4. Sarana

Sarana atau media pendidikan meliputi segala sesuatu yang dapat membantu proses pencapaian tujuan pendidikan. Pentingnya sarana dalam pendidikan termasuk dalam pendidikan Islam adalah untuk menunjang keberhasilan pendidikan, karena tanpa sarana proses pendidikan tak akan berlangsung dengan baik dan lancar (M. Arifin, 1993:ix).

Sementara itu, Kartini Kartono (1992:252) mengemukakan sarana dalam pendidikan yaitu:

- a) Semua pribadi dan perbuatannya –termasuk perbuatan hasil kewibawaan dan hasil kegiatan mendidik; antara lain pendidik, guru, pembimbing, orang tua, orang dewasa yang sengaja difungsikan pada kegiatan mendidik;
- b) Semua situasi dan kondisi pendidikan yang secara intensional dan sistematis diadakan untuk mendukung perbuatan mendidik, diterjunkan untuk memberikan pengaruh negatif;
- c) Segala macam lembaga, sistem peralatan, dan alat-alat bantu yang sengaja diadakan untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa apabila suatu pendidikan ingin berhasil, maka banyak hal yang harus ditingkatkan atau dikembangkan diantaranya sarana, sebagaimana

dikemukakan Yuusuf Amir Feisal (1995:36) perlunya pendanaan, peningkatan dan pengembangan sarana dalam pendidikan meliputi:

- a) Sarana personal, yang mencakup:
 - 1) tenaga pengajar;
 - 2) tenaga peneliti;
 - 3) tenaga pelayanan dan pendidikan;
 - 4) tenaga administrasi;
 - 5) tenaga pelayanan umum.
- b) Sarana fisik, yang mencakup:
 - 1) buku;
 - 2) laboratorium;
 - 3) bahan baru;
 - 4) teknologi pendidikan (alat teknis pendidikan)
 - 5) bangunan;
 - 6) tanah dan sebagainya.

Menurut Zakiah Daradjat (1992:81) mengemukakan sarana pendidikan yang dapat digunakan dalam pendidikan agama misalnya di sekolah diantaranya:

- a) Media tulis atau cetak seperti al-Al-Qur'an, Hadis, Tauhid, Fiqh, Sejarah dan sebagainya.
- b) Benda-benda alam seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan-zat padat, zat cair, zat gas dan sebagainya.
- c) Gambar-gambar, lukisan dan diagram, peta dan grafik.
- d) Gambar yang dapat diproyeksi, baik dengan alat ataupun dengan suara seperti

- foto, slide, film, dan lain-lain.
- e) Audio recording (alat untuk didengar) seperti kaset radio dan lainnya.

Lingkungan

Lingkungan mempunyai peranan yang penting terhadap keberhasilan pendidikan Islam. Karena perkembangan jiwa anak itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Sedang yang dimaksud dengan lingkungan menurut Nur Uhbiyati (1995:234) adalah sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya. Hal senada dikemukakan oleh Ramayulis (1994:147) bahwa yang disebut lingkungan adalah segala yang ada di sekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi, maupun kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap anak yaitu lingkungan dimana proses pendidikan berlangsung dan dimana anak bergaul sehari-hari.

Pengaruh lingkungan terhadap anak didik dapat positif dan dapat pula negatif, maka penjagaan dan pengawasan sangatlah penting, sebab dengan langkah tersebut akan dapat mencegah dan menghalangi manakala terjadi hal-hal yang negatif, dan sebaliknya akan menyalurkan seluas-luasnya manakala terjadi hal-hal yang positif. Dalam hubungan ini Nur Uhbiyati (1995:236) merumuskan tiga macam lingkungan, yaitu:

- a. Pengaruh lingkungan positif, yaitu lingkungan yang memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk menerima, meyakini serta mengamalkan ajaran Islam.
- b. Pengaruh lingkungan negatif, yaitu lingkungan yang menghalangi atau kurang menunjang kepada anak untuk menerima, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam.
- c. Pengaruh netral adalah yang tidak memberikan dorongan untuk meyakini atau mengamalkan agama, demikian pula tidak melarang atau menghalangi anak-anak untuk meyakini dan mengamalkan ajaran Islam.

Selanjutnya dalam bahasan ini akan diuraikan beberapa lembaga yang tumbuh di masyarakat serta mempunyai pengaruh luas bagi perkembangan anak.

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai keimanan serta dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan perilaku anak, karena perilaku seseorang tumbuh dan berkembang dari pengalaman yang dilalui sejak kecil. Penanaman keimanan serta perilaku yang baik (akhlak) merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena nilai-nilai keimanan dan perilaku senantiasa langgeng dan lestari tidak berubah oleh zaman dan tempat. Jika nilai-nilai

keimanan dan akhlak diterapkan dalam lingkungan keluarga sedini mungkin, maka akan terbentuk akhlak dan tingkah laku anak yang baik.

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan membawa potensi yang sangat berkembang, bersih dari pengaruh yang merusak. Jika anak tersebut mempunyai akhlak yang tidak terpuji karena pengaruh lingkungan. Lingkungan yang pertama dekat dengan anak adalah rumah tangga (keluarga), sedang pemimpin atau penguasa rumah tangga adalah orang tua, maka orang tua merupakan penyebab utama dan pertama atas kerusakan anak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw., yang artinya :

”Setiap anak yang dilahirkan itu telah membawa fitrah beragama (perasaan percaya kepada Allah SWT) maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nashrani ataupun Majusi” H. R. Baihaqi.

Dari hadits tersebut dapat ditafsirkan bahwa lingkungan keluarga yang pertama kali menanamkan nilai-nilai keimanan serta yang mempengaruhi kepribadian dan perkembangan akhlak anak.

b. Sekolah

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, juga merupakan lingkungan yang pen-

ting setelah keluarga dalam pembinaan akhlak anak. Di sekolah anak didik, diajar dan dibina kepribadiannya, juga diberi ilmu dan ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini yang memegang peranan penting dalam guru, terutama guru agama disamping sesama peserta didik, serta lingkungan sekolah. Guru adalah pengajar dan pendidik ilmu dan tingkah laku, ia akan diikuti dan diteladani peserta didiknya, karena situasi, kondisi disekolah dan guru akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan akhlak siswa.

Sebagai pendidik, guru dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan sesuai dengan syariat Islam. Apabila sikap, tingkah laku serta perkataan guru tidak sesuai dengan norma-norma agama, maka secara tidak langsung guru tersebut telah menghancurkan pembinaannya, sehingga peserta didik tidak akan menghormati dan meneladaninya. Sebagaimana Utbah bin Abi Sofyan berkata kepada guru yang mengajar anaknya sebagai berikut: "Sebelum engkau memperbaiki anakku, hendaklah engkau memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Karena mata mereka terpaku pada matamu, yang baik disisi mereka mengukatakan. Dari perkataan Utbah tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidik hendaklah memperbaiki dirinya sebelum memberikan bimbingan terhadap anak didiknya,

sehingga pembinaannya dapat mem-pengaruhi akhlak dan kepribadian anak didiknya.

Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga benar-benar menjadi bagian dari kepribadiannya yang menjadi pengendali dalam kehidupannya di kemudian hari. Untuk pembinaan pribadi itu, maka pendidikan agama hendaklah diberikan oleh guru yang benar-benar tercermin agama itu dalam sikap, tingkah laku, gerak-gerik, cara berpakaian, cara berbicara, cara menghadapi persoalan dan dalam keseluruhan pribadinya.

Dalam hubungan ini, Zakiah Daradjat (1989:44) menyatakan bahwa faktor guru amat penting bagi perkembangan kepribadian anak, sebab anak didik akan menyerap segala sikap dan perbuatan guru (Majalah Perkawinan No. 207 Th XVII). Jadi jelaslah sikap dan tingkah laku guru sangat mempengaruhi akhlak dan kepribadian anak didiknya.

c. Lingkungan Masyarakat

Selain dari kedua lingkungan tersebut yang dapat mempengaruhi akhlak dan kepribadian anak didik, ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya, faktor tersebut adalah lingkungan masyarakat. Oleh karena itu lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang positif dan negatif terhadap pertumbuhan mental dan akhlak anak didik, pengaruh tersebut bisa datang dari teman-teman sebaya dan

masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini Mukhtar Yahya yang dikutip oleh Zuhairini et. all., (1983:25) berpendapat bahwa :

“Saling meniru diantara anak dengan temannya sangat cepat dan sangat kuat, pengaruh kawan adalah sangat besar terhadap akal dan akhlaknya sehingga dengan demikian kita dapat memastikan bahwa hari depan anak tergantung kepada keadaan masyarakat dimana anak itu bergaul. Anak yang hidup diantara tetangga-tetangga yang baik, akan menjadi baiklah ia, sebaliknya anak yang hidup diantara orang-orang yang buruk akhlaknya akan buruk pulalah ia”.

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa lingkungan masyarakat dimana anak tinggal akan memberikan pengaruh terhadap pembentukan akhlak dan pembentukan pribadinya. Sebagai contoh: seseorang anak di sekolah ia mendapatkan pendidikan agama dengan baik dan di rumahnya selalu mendapat bimbingan yang baik pula dari kedua orang tuanya serta lingkungan yang baik, besar kemungkinan anak tersebut akan rajin menjalankan agamanya. Sebaliknya jika anak bergaul dan berbaur dengan lingkungan masyarakat yang terdapat unsur-unsur kenegatifan, misalnya: kurang kegiatan keagamaan, banyak hiburan atau permainan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka tidak menutup

kemungkinan akan menurunkan nilai akhlak yang telah diperolehnya.

Dengan demikian ketiga lingkungan yang dapat mempengaruhi akhlak dan kepribadian anak tersebut di atas, kiranya saling mempengaruhi. Karena ketiga lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia pada umumnya dan pada anak didik khususnya.

C. Implementasi Ilmu Pendidikan Islam

Agama Islam yang universal mengajarkan kepada manusia berbagai aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat, jasmaniah dan rohaniah. Salah satu aspek ajaran adalah kewajiban melaksanakan pendidikan. Menurut ajaran Islam, pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Karena dengan pendidikan, manusia akan mendapatkan berbagai pengetahuan.

Dalam hubungan ini, melalui ilmu pengetahuan yang diperolehnya, manusia dapat dengan mudah:

1. Mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, terutama potensi fitrah bertauhid kepada Allah SWT.
2. Mencapai keseimbangan fisik dan mental, jasmani dan rohani.
3. Mencapai keseimbangan dunia dan akhirat.

Tentu pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan Islam. Lebih jelas lagi adalah pendidikan yang Islami. Dalam Islam terdapat persepsi yang *balance* tentang pengembangan potensi manusia. Islam mengakui bahwa faktor lingkungan cukup dominan dalam menentukan apakah seseorang akan menjadi “Yahudi” maupun “Nasrani”. Yahudi dan Nasrani dalam tulisan ini dimaksudkan dalam term perkembangan yang terakhir, yang sudah tidak murni lagi, atau bahkan seseorang itu akan menjadi Majusi di satu sisi. Dan pada sisi lain, Islam juga tidak menafikan faktor bawaan “alamiah” memandang penting pengembangan potensi bagi manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Inilah makna sabda Nabi Muhammad Saw yang artinya:

“Setiap anak yang dilahirkan itu telah membawa fitrah beragama (perasaan percaya kepada Allah SWT) maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi (H.R. Baihaqi).

Adapun mengenai mengapa pendidikan yang harus diberikan itu pendidikan yang Islami? Karena pendidikan yang Islami dengan segala konsepnya mampu melahirkan pribadi-pribadi muslim sesuai dengan cita-cita ideal pendidikan Islam.

Pendidikan yang Islami menghendaki komponen, sistem dan operasionalnya berlangsung secara Islami. Dus, ini berarti bahwa dasarnya harus

bersumberkan kepada nilai-nilai yang Islami, baik tujuan umum maupun tujuan khusus (sementara dan akhir): kurikulumnya harus mampu menyiapkan lahirnya pribadi-pribadi yang Islami; pendidikannya harus Islami, metode yang mampu mewujudkan tujuan yang Islami, serta lingkungan yang Islami, baik lingkungan pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Pendidikan hendaknya merupakan proses penanaman nilai-nilai secara sadar dari orang “dewasa” terhadap perkembangan jasmani dan ruhani anak didik dengan cara mentransferkan berbagai aspek kehidupan, baik jasmani maupun ruhani, berupa pengetahuan, kecakapan atau keterampilan sehingga membawa perubahan kepada kepribadian (*personality*) yang akhirnya dapat hidup bahagia (lahir dan batin), baik individu maupun dalam kehidupan masyarakat serta tunduk dan patuh terhadap Allah SWT sesuai dengan ajaran Islam.

Konsep pendidikan anak yang islami, menurut penulis merupakan dasar bagi pembentukan identitas muslim bagi anak, oleh karenanya komponen-komponen pendidikan Islam tersebut, merupakan suatu sistem yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik, agar berhasil dan dapat melahirkan generasi yang diharapkan, cara menumbuhkan identitas muslim tersebut adalah dengan menerapkan konsep pendidikan yang islami, yakni konsep pendidikan Islam yang bersumber dan digali dari al-Quran dan sunnah. Hal ini Islam dalam sumber

ajarannya telah menegaskan dirinya sebagai agama yang sempurna. Qs. 5, al-Maidah : 3, yang artinya :

“... Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu” (Depag. RI, 1992: 157).

Islam yang kosmopolit dan universal ini, mengatur segala kehidupan dan penghidupan manusia dalam segala dimensi dan aspeknya, duniawi dan ukhrowi. Sedang esensi ajarannya adalah masalah keimanan berupa ajaran tauhid kepada Allah SWT. Untuk itu pula dalam pendidikan Islam pendidikan keimanan semestinya menjadi prioritas utama dan pertama sebelum yang lainnya, seperti ibadah, akhlak dan sosial. Ini sejalan dengan hakikat Islam, yaitu perintah bertauhid kepada Allah SWT.

Pendidikan keimanan dapat diberikan kepada anak melalui lingkungan keluarga (lingkungan pendidikan informal), masyarakat (nonformal) dan sekolah (formal). Dalam lingkungan keluarga pendidikan keimanan bagi anak harus dimulai sedini mungkin. Anak harus diberi sentuhan tauhid. Keluarga harus mampu menciptakan suasana yang Islami, sehingga anak dapat merasakan kehadiran Allah SWT dalam dirinya. Sedang dalam lingkungan masyarakat, orang tua serta keluarga harus bisa mengontrol dan mengarahkan anak agar tidak menyalahi fitrahnya (kemampuan dasar untuk beragama yang pada intinya terletak pada ke-

imanan), hal ini dimulai ketika anak berada di masyarakat. Jadi, pendidikan yang diberikan di lembaga pendidikan formal, khususnya di Indonesia dapat dimulai dari anak yang berusia 4-6 tahun.

Pendidikan Islam juga tidak hanya memberikan dasar-dasar keimanan. Di dalamnya juga diberikan pendidikan jasmani, rohani, akal, dan pendidikan sosial. Dalam hubungannya dengan ini terdapat komponen-komponen dalam pendidikan Islam yang diupayakan mampu memnuhi tujuan pendidikan Islam sebagai salah satu komponen di dalamnya. Oleh karenanya, keseluruhan usaha serta kesatuan komponen-komponen dalam pendidikan Islam diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yaitu anak yang shaleh dalam arti yang luas seperti cerdas, aktif, kritis, kreatif, sehat jasmani, rohani, serta sopan, taat beribadah, penyayang dan yang lainnya atau membentuk pribadi muslim yang sempurna beriman, bertakwa, dan diridhai Allah SWT Swt. serta dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada pada dirinya, sehingga berguna bagi dirinya sendiri dan menjadi *rahmatan li al'alam* sebagai suatu wujud nyata dari tugas sebagai *kebalifatullah* dan *'abdullah* di muka bumi untuk menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Semua usaha dan aktifitas dan komponen-komponen dalam pendidikan Islam diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut. Juga dalam pendidikan keimanan ini, tentunya komponen-komponen yang lainnya selain tujuan

mampu menciptakan suasana keberlangsungan pendidikan yang islami. Oleh karena itu dasarnya sesuai dengan dasar ajaran Islam, selain dasar pendidikan Nasional, kurikulum, materinya harus terpadu dan integratif tidak mengenal dikotomi ilmu. Jadi dengan pendidikan yang Islami, metode yang terpilih/tepat dan cepat, serta lingkungannya yang Islami sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai.

D. Teknik Analisis Ilmu Pendidikan Islam

Penganalisaan terhadap bahan-bahan yang diperoleh dari kegiatan empirik melalui data dalam penelitian sangatlah penting bagi pendalaman dan penguasaan teori pendidikan Islam yang dikembangkan. Oleh karena itu, antara teori dalam Ilmu Pendidikan Islam dengan fakta yang berkembang dalam lapangan empirik harus saling berkaitan. Dalam hubungan ini, M. Arifin. (1994:21) merumuskan bahwa

1. Teori menetapkan adanya hubungan dari fakta yang ada.
2. Mengembangkan sistem klasifikasi dan struktur dari konsep-konsep.
3. Teori harus dapat mengikhtiarkan fakta-fakta. Maka dari itu semua teori harus mampu menerangkan sejumlah besar fakta.
4. Teori harus dapat meramalkan fakta.
5. Disamping itu suatu teori harus pula dapat menunjukkan kebutuhan-kebutuhan untuk dapat

dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan teori tersebut.

Dengan demikian, teknik analisis Ilmu Pendidikan Islam yang digunakan disini di antaranya:

a. Deduksi

Teknik deduksi adalah cara yang digunakan dalam berfikir dengan menggunakan premis dari fakta yang bersifat khusus kepada fakta yang bersifat umum dalam pengambilan kesimpulan (Sutrisno Hadi, 1990:36).

b. Induksi

Teknik ini adalah cara yang digunakan dalam berfikir dengan menggunakan premis dari fakta yang bersifat umum pada fakta yang bersifat khusus dalam pengambilan kesimpulan (Sutrisno Hadi, 1990:42).

c. Konvergensi

Teknik konvergensi adalah cara yang dipergunakan dalam berfikir ilmiah dengan jalan mengkombinasikan teknik berfikir deduksi dan induksi (Sutrisno Hadi, 1990:46).

d. Teknik Tipologi

Taufik Abdullah dalam tulisannya yang berjudul "*Agama Sebagai Kekuatan Sosial: sebuah ekskursi di wilayah metodologi penelitian*" mengatakan bahwa teknik tipologi ini digunakan untuk

mengklasifikasikan topik dan tema sesuai dengan tipe yang sama (Taufik Abdullah, 1991: 34).

Setelah melalui teknik-teknik tersebut dapat diambil tafsiran dari pembahasan atau analisis informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian.

-----&&&-----

BAB III

DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA

SEBELUM abad ke-19 di Indonesia telah ada lembaga pendidikan Islam yang sekarang disebut pesantren. Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga setelah pengajian al-Qur'an di langgar-langgar. Akan tetapi, kedatangan para kolonialis di Indonesia telah memberikan suasana baru yaitu dengan mendirikan sekolah yang bermodelkan kolonial sendiri. Kedua lembaga ini satu sama lain tidak saling tegur sapa dan antara keduanya tidak ada kaitan sama sekali, maka sejak abad ke-19 telah terjadi dualisme pendidikan di Indonesia (Karel A. Steembrink, 1984:159).

Terjadinya dualisme dalam pendidikan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu persoalan politik dan persoalan teknis. Belanda sebagai penjajah dan ingin bercokol lama di Indonesia, tidak mungkin menginginkan penduduk jajahannya menjadi orang-orang yang pintar, apalagi dengan dengan memberikan pengajaran umum kepada santri yang sudah mempunyai basic keagamaan yang kuat.

Selain itu, dari pihak santripun tidak mempunyai keinginan untuk bekerjasama dengan para penjajah kafir yang harus dimusuhi. Sedangkan persoalan teknis menyangkut cara pengajaran yang dipakai di pesantren dianggap jelek dan tidak mempunyai unsur pengembangan kemampuan.

Dua sistem pendidikan tersebut bermuara dari induk yang saling terpisah; pesantren berinduk pada legitimasi masyarakat dan komunitas Islam, pendidikan kolonial berinduk pada legitimasi pemerintah (M.T. Arifin, 1987:183). Kedua sistem pendidikan itu masing-masing mempunyai prinsip dan motif moral yang berbeda. Oleh karenanya persoalan ini berimbas kepada persoalan perbedaan yang nampak dalam pendidikannya. Perbedaan ini nampak baik dalam tujuan, metode ataupun kurikulumnya (Karel A. Stembrink, 1994: 24).

Sistem Pendidikan Pesantren

ISTILAH “pesantren” berasal dari kata “santri”, telah diberi awalan *pe* dan akhiran *an*, yang berarti tempat tinggal santri. John berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa tamil yang berarti guru ngaji, sedangkan C.C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci (Zamakhsyari Dhofier, 1982:18). Tentang hal ini, Abu Hamid berpendapat, bahwa kata

“santri” berasal dari kata *sant* berarti orang baik dan suka menolong (M.T. Arifin, 1987:184).

Secara praktis di kalangan penelaah Islam telah ada kesepakatan bahwa pesantren berasal dari kata santri dan merupakan tempat tinggal santri selama belajar di pesantren itu. Namun, meskipun hal itu telah disepakati, ada persoalan kapan istilah pesantren mulai dikenal. Tentang hal ini memang tidak banyak buku yang menjelaskan, hanya Pigeaud dan de Graaf pernah menyatakan bahwa pesantren merupakan jenis Pusat Islam penting kedua, disamping mesjid, pada periode awal abad ke-16. Mereka menyangka pesantren adalah sebuah komunitas yang tempatnya jauh, di pegunungan, berasal dari lembaga sejenis zaman pra-Islam, *mandala* dan *asyrama* (Martin van Bruinessen, 1994:24). Memang terdapat indikasi bahwa tempat-tempat pertapaan pra-Islam tetap bertahan beberapa waktu setelah tanah Jawa di-Islamkan. Namun tidak jelas, apakah semua itu merupakan lembaga pendidikan tempat pengajaran intelektual berlangsung. Karena itu, menurutnya istilah pesantren baru muncul belakangan (Martin van Bruinessen, 1994:24).

Pendapat lain mengatakan bahwa pesantren di Indonesia sama halnya dengan lembaga pendidikan Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah, yaitu Kutab (Hasbullah, 1995:24). Sisi lain mengatakan bahwa pesantren merupakan warisan dari sistem “guru kula”. Dalam sistem ini, para cantrik yang belajar sebagai “kula warga” yang terdiri dari

tiga kasta tertinggi dengan gurunya berasal dari kasta Brahmana. Kemudian sistem ini dituruti oleh Syekh Malik Ibrahim dalam mengajarkan agama Islam (M. Said dan Junair Affan, 1974:86).

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, namun setidaknya ada beberapa hal yang disepakati bahwa pengajaran Islam di Indonesia telah dilakukan sejak hadirnya Islam ke Indonesia baik dilanggar, di mesjid atau sejenis pesantren yang dikenal sekarang. Namun untuk keperluan penelitian ini pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah diakui sejak dulu.

Dalam istilah umum, pesantren seringkali disamakan dengan pondok. Istilah ini diambil dari bahasa Arab, yaitu "*al-funduk*", yang berarti tempat bermalam atau penginapan. Namun dalam penggunaannya kedua istilah itu (pesantren dan pondok) seringkali dirangkaikan menjadi kalimat majemuk, yaitu pondok pesantren.

Pesantren sebagai suatu sistem pendidikan memiliki beberapa elemen antara lain: pondok, mesjid, pengajaran kitab klasik, santri dan kyai (Zamakhsyari Dhofier, 1982: 44-60). Kelima elemen ini antara satu dengan yang lainnya saling menunjang untuk mencapai tujuan pesantren sebagai lembaga keagamaan.

Pondok adalah tempat tinggal santri yang berwujud suatu bangunan semacam barak yang di kapling-kapling atau berupa ruangan besar secara terbuka dengan setiap sudut ditempati oleh beberapa orang santri. Pondok ini biasanya terletak tidak

jauh dari mesjid kadang bersampingan dengan rumah kyai. Pondok untuk laki-laki dan perempuan terpisah, tetapi tidak terlalu jauh dari pengawasan kyai.

Mesjid bagi sistem pendidikan pesantren merupakan tempat kegiatan yang utama. Oleh karena itu bila seseorang ingin mendirikan sebuah pesantren maka yang pertama dibangun adalah mesjid. Demikian pula dengan kyai yang ingin mendirikan pesantren menjadikan mesjid sebagai pusatnya. Biasanya pengajian dilakukan di mesjid setelah shalat berjama'ah ataupun sebelumnya (Hasbullah, 1994:143). Jadi mesjid dalam pesantren mempunyai dua fungsi, yaitu: fungsi pertama mesjid sebagai tempat shalat dan fungsi kedua mesjid sebagai tempat belajar santri. Pada sebagian pesantren, mesjid juga berfungsi sebagai tempat `itikaf dan melaksanakan latihan-latihan, atau suluk dan dzikir, maupun amalan-amalan lainnya dalam kehidupan tarekat dan sufi (Zamakhsyari Dhofier, 1982:136).

Komponen ketiga dari pesantren adalah kitab-kitab klasik. Sebagai salah satu yang membedakan antara pesantren dengan pendidikan modern adalah adanya kitab-kitab klasik (Martin, 1995:19). Pesantren tanpa kitab klasik dipandang belum lengkap atau kitab klasik (kitab kuning) dengan pesantren tidak bisa dipisahkan keberadaannya.

Kitab-kitab yang dipelajari di pesantren pada umumnya merupakan karya-karya ulama Timur Tengah terdahulu atau karya ulama lokal dalam

bentuk syarah. Isi kitab ini hanya mengandung ajaran fiqh, tarekat dan amalan-amalan lainnya, akan tetapi materi tafsir dan hadits tidak begitu ditonjolkan pengajarannya dalam arti kitab tafsir dan hadits tidak menggunakan kitab induknya (Martin, 1995: 18). Tentang pengajaran kitab klasik ini akan dibahas dalam sub tersendiri.

Komponen keempat pesantren ini adalah santri. Menurut tradisi pesantren, biasanya santri ini terbagi dua bagian, yaitu santri mukim dan santri kalong (Zamakhsyari Dhofier, 1982:51). Santri mukim adalah murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Sedangkan santri kalong adalah murid-murid yang berasal dari desa-desa yang jaraknya tidak jauh dari pesantren.

Dalam kesehariannya, para santri hidup di bawah bimbingan kyai. Mereka hidup secara mandiri. Mereka harus memasak makanan sendiri-sendiri dengan bekal dari rumah masing-masing; berupa beras, uang ataupun alat menanak nasi (Jumhur dan Danasaputra, 1976:113). Selain dengan cara membantu masyarakat dekat untuk dapat melangsungkan pendidikannya.

Ketaatan kepada kyai merupakan suatu hal yang mutlak yang dipandang sebagai ibadah, juga kecintaan kepada pengetahuan dan keikhlasan yang membuat mereka mau belajar pada seorang kyai meskipun lama (Bachtiar Effendy, 1985:50). Mereka tidak boleh menolak atau menyanggah terhadap sesuatu yang datang dari kyai dalam hal

pengajaran. Dengan sikap seperti inilah ada suatu keyakinan bahwa ilmu yang dimiliki kyai mudah dapat diterima (Aliy As`ad, 1978:22-25).

Seorang santri dikatakan berhasil, diukur dari berapa banyak kitab yang telah selesai dipelajari. Bagi mereka yang sudah mencapai seperti itu oleh kyai diberi ijazah dengan lisan bisa memilih beberapa alternatif. Bisa dengan menjadi asisten kyai di pesantren itu dan biasanya kalau santri ini terpakai olehnya. Kalau kyai mempunyai anak kadang langsung dinikahkan kepadanya, bisa melanjutkan pendidikannya ke pesantren lain untuk lebih mengetahui ilmu yang lainnya, karena setiap pesantren memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai oleh masing-masing kyai di setiap pesantrennya (Said dan Junair, 1974:86). Alternatif lainnya, santri tersebut pulang ke kampungnya untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat atau bahkan mendirikan pesantren baru dengan menginduk kepada pesantren almamaternya.

Elemen yang lain adalah kyai. Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren, karena kyai adalah sumber mutlak dari kekuasaan dan wewenang yang berlaku di dalam pesantren (Abdurrahman Wahid, 1974:49). Karena itu peranan kyai dalam pesantren sangat besar, sebab ketundukan kepada kyai merupakan syarat pertama untuk memperoleh ilmu. Hal tersebut dapat dilaksanakan karena pada umumnya para kyai di pesantren memiliki kepribadian yang sangat kuat, terutama dalam ketekunan dan penguasaan diri.

Dan ini dapat menimbulkan kharisma kyai di hadapan para santri, sehingga kyai merupakan tokoh panutan dalam pesantren dan dalam masyarakat sekitarnya.

Pada abad ke-19, kyai dalam arti guru ngaji dibagi dalam lima golongan, yaitu: guru ngaji Qur'an, guru kitab, guru tarekat, guru untuk ilmu gaib, penjual jimat dan lain-lain dan guru yang tidak menetap kepada suatu tempat (Karel A. Steembrink, 1984:152). Sampai abad ke-20, tipe-tipe guru seperti ini di beberapa daerah tertentu masih ditemukan, bahkan awal abad ke 20 secara esensial masih ada. Namun yang paling penting tentang kepiawaian kyai atau guru ngaji ini terletak pada hak otoritasnya yang mutlak.

Kharisma kyai didasarkan pada kekuatan spiritual dan kemampuan memberi berkah karena hubungan dengan alam gaib. Kuburannya pun dipercayai dapat memberi berkah, sehingga sampai sekarang hal seperti ini dapat ditemukan di daerah-daerah tertentu. Tentang ini, kaum tradisionalis menganggapnya sebagai bagian integral dari konsep wasilah, keperantaraan spiritual. Mata rantai kehidupan dengan kyai tidak putus meskipun sudah mati. Oleh karenanyalah, sebagaimana dikatakan Abdurrahman Wahid (Ketua PB NU), keanggotaan kyai NU tidak dianggap berakhir karena kematiannya (Martin van Bruinessen, 1994:20).

1. Tujuan Pendidikan Pesantren

Salah satu yang membedakan lembaga pendidikan pesantren dengan pendidikan lainnya adalah terletak pada cara pengadministrasian lembaga itu. Di pesantren sistem administrasi dipegang oleh kyai sendiri atau bahkan tidak mendasarkan kepada teori-teori kependidikan yang diakui. Sedangkan pendidikan pada umumnya, pengadministrasiannya didasarkan pada teori-teori, juga penanganannya diserahkan pada ahlinya. Sebagai salah satu bukti, contohnya dalam perumusan tujuan pesantren.

Sebenarnya tidak ada hal rumusan tujuan yang pernah dibuat secara sengaja oleh lembaga pendidikan pesantren waktu dulu. Kendati itu hanya merupakan sebuah interpretasi seorang peneliti terhadap pesantren yang diteliti atau hasil sebuah wawancara antara peneliti dengan kyai tentang pesantren dalam tujuannya. Terlepas dari persoalan itu setidaknya ada satu hal yang disepakati bahwa secara *de facto* pesantren mempunyai orientasi hidup yang dicerminkan dalam budaya pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam mencapai tujuannya, tetapi secara formal (secara tertulis) tujuan pesantren itu tidak ditemukan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui tujuan pendidikan pesantren, dalam penelitian ini penulis merujuk dari apa yang pernah ditulis oleh para peneliti tentang pesantren atau para penulis yang membahasnya pula. Seperti halnya Mastuhu (1994:5), menurut rangkuman hasil

wawancara dengan para pengasuh pesantren, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah sebagai berikut :

“Menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, tetapi Rasul (seperti rasul, pendidikan.), yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti sunah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat (izzul Islam wal Muslimin), dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian muhsin, bukan sekedar muslim”.

Dari rumusan tujuan pendidikan pesantren menurut Mastuhu tersebut nampaknya cukup memadai bahkan ideal. Namun bila dilihat lebih bahwa rumusan tujuan pesantren tersebut nampaknya tidak ada keserasian sejarah dengan fakta pesantren tempo dulu. Pesantren pada zaman Belanda pada umumnya benci kepada ilmu pengetahuan yang berbau kebarat-baratan, misalnya dari rumusan itu. Jadi, ironis sekali ajaran fiqh sufistik (penafsiran dulu) dapat

bersatu dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

M.T. Arifin (1987: 191) mengatakan bahwa tujuan pesantren itu adalah untuk “mentransformasikan kebudayaan dari generasi yang lebih dahulu kepada generasi yang lebih muda”. Rumusan lainnya yang tidak kalah kakunya dengan tujuan pesantren di atas menjelaskan bahwa tujuan pesantren adalah mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis pada abad-abad yang lalu (Martin van Bruinessen, 1994:17).

Tujuan tersebut di atas mencerminkan kesederhanaan sebuah pesantren, baik kyai ataupun santrinya dalam proses belajar mengajar. Juga karena orientasi hidup fiqih sufistik, sehingga tujuan pesantren ini tidak dihubungkan dengan lapangan kehidupan atau tingkat jabatan dalam hierarki sosial atau birokrasi kepegawaian. Selain itu, dapat ditemukan dalam pendidikan pesantren sangat menekankan pada usaha menegakkan Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai sumber utama sosial moral atau akhlak mulia. Dengan kata lain orientasi tujuan pendidikan pesantren masih lebih banyak bersifat *inward looking* daripada *outward looking*, atau masih lebih banyak melihat ke dalam daripada keluar. “pandangan ke dalam melihat bahwa dengan tegaknya dan tersebarnya agama Islam di tengah-tengah kehidupan, maka kehidupan itu akan menjadi baik atau melahir-

kan efek moral baik. Dengan demikian, pandangan ke dalam itu berfikir alternatif dan otomatis tidak seperti halnya pandangan keluar yang hanya melengkapi kekurangan meluruskan dan memberikan sesuatu yang baru yang belum ada dan diperlukan (Mastuhu, 1989:68).

Walau begitu, orientasi fiqh Imam Syafi'i dan ajaran akhlak tasawuf al-Ghazali lebih dominan mempengaruhi pola pikir di pesantren, sehingga tujuan pendidikan pesantren lebih bersifat *akhirat oriented* dan tidak peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan (sains).

2. Kurikulum Pendidikan Pesantren

Istilah kurikulum bagi pesantren baik praktek atau pun teorinya pada masa kolonial Hindia Belanda adalah suatu yang amat asing, bahkan tidak dikenal sama sekali. Bagi masyarakat pesantren pertimbangan pemberian materi lebih didasarkan atas apa yang telah dilakukan dan yang ada dari ulama terdahulunya. Untuk berfikir tentang bagaimana pengajaran pesantren serasi dan sepadan dengan kebutuhan material sepertinya tidak ada, hanya para santri kadang ada yang secara praktis terjun ke dunia pertanian atau membantu masyarakat setempat untuk bisa melangsungkan keberadaannya di pesantren itu, tapi apakah itu bagian kurikulum (pengajaran) di pesantren atau bukan. Yang jelas dapat dilihat dari kandungan intelektual yang ditonjolkan di pesantren berkisar pada paham

akidah Asy'ari (khususnya melalui karya-karya al-Sanusi), madzhab fiqh Syafi'i (dengan sedikit menerima madzhab lain) dan ajaran-ajaran akhlak tasawuf al-Ghazali (Martin van Bruinessen, 1994: 195). Oleh karena sudah dapat dipastikan bahan ajaran yang dipakai di pesantren berkisar pada tiga katagori tersebut. Ketiga indikator pengajaran di pesantren ini semuanya terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis dalam tulisan arab *gondil* (tanpa baris) atau sering disebut dengan kitab kuning.

Menurut hasil penelitian L.W.C. van der Berg, bahwa di pesantren diajarkan beberapa kitab tentang fiqh ibadah, fiqh umum, tata bahasa arab, ushuludin dan tasawuf (Karel A. Steembrink, 1984: 155-157). Selanjutnya ia mengatakan, bahwa meskipun kitab-kitab klasik yang ditulis dalam bahasa arab, tapi al-Qur'an (tafsir) dan hadits sebagai sumber utama agama Islam tidak diajarkan. Hanya kitab *Jalalain* satu-satunya kitab tafsir al-Qur'an yang diajarkan, sementara kitab-kitab hadits induk sama sekali tidak diajarkan.

Hal di atas dapat dijadikan suatu bukti bahwa pendekatan terhadap al-Quran dan hadits tidak terjadi secara langsung, tetapi hanya melalui seleksi yang sudah diadakan oleh kitab-kitab lain, khususnya kitab fiqh. Pada umumnya kurikulum yang digunakan di pesantren daerah Jawa dan Madura adalah sama, karena para kyai pada umumnya berasal dari sumber yang sama,

berkat kesamaan tempat belajar di Mekah atau berdasarkan tradisi belajar di pesantren, atau atas adanya geneologis yang melekat di kalangan kaum santri yang ada di pesantren.

Dari hal tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa pengajaran pesantren hampir dipastikan 100% dalam persoalan keagamaan dan itupun bukan dari sumbernya yang asli (al-Qur'an dan Hadits). Pengajaran umum bagi mereka identik dengan kebudayaan penjajah yang kafir dan wajib dimusuhi. Oleh karenanya, pengajaran umum seperti itu harus dihindari.

Kitab-kitab klasik itu diajarkan oleh kyai kepada para santrinya dengan klasikal atau *bandongan*, yaitu santri duduk melingkar menghadapi kyai, kemudian kyai membacakan kitab secara kata demi kata, sementara santri mendengarkan dan memberi *sakal* (baris) pada kitab yang sama dengan yang dipegang. Metode lain yang dipakai adalah metode *sorogan*, yaitu metode yang para santrinya datang secara individual kepada kyai kemudian membacakan kitab, kadang dengan menterjemahkan, sementara kyai hanya memperhatikannya saja. Tapi, apabila ada kekeliruan baca atau terjemahan santri, maka kyai meluruskannya.

Tentang cara mengajar (metode yang digunakan tersebut), Mahmud Yunus (1985:233) menjelaskan:

“Pada tingkat rendah pelajaran diberikan kepada murid-murid seorang demi seorang dengan bergantian. Diberikan oleh guru-guru bantu dan mahasiswa (santri senior yang ditunjuk, pendidikan.) di pesantren pada tingkat tinggi yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa pelajaran diberikan dengan cara berhalqah oleh kyai”.

Dari hal di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa pada umumnya pesantren-pesantren yang ada sampai akhir abad ke-19, bahan ajar hanya diberikan materi-materi keagamaan yang cenderung bersifat fiqih sufistik, sementara sentuhan sosial dalam pengajaran tidak diberikan, apalagi ilmu-ilmu pengetahuan. Bahkan cenderung menutup diri dari perkembangan intelektual seperti halnya pemikiran al-Ghazali (Syafi`i Ma`rif, 1993:57-60).

Sistem Pendidikan Kolonial Belanda

Lahirnya pendidikan kolonial Belanda di Indonesia menjelang abad ke-20 didorong oleh suatu keinginan mempersempit pengaruh pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam waktu itu yang berkembang di kalangan orang-orang Jawa (kecuali Yogyakarta). Terutama setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda mendapat laporan dari Van den Berg bahwa jumlah pendidikan tradisional mencapai 14.929 buah dengan jumlah murid mencapai 222.663 orang. Empat perlima dari

jumlah tersebut dapat dikategorikan pesantren (M.T. Arifin, 1987:192).

Selain motif tersebut di atas yang bersifat politis, tentu saja motif ekonomi dan keagamaan berdiri di belakangnya. Oleh karenanya, untuk mempersempit pengaruh pesantren di dalam masyarakat Jawa perlu segera dilakukan penyelenggaraan pendidikan yang sudah berbeda dengannya.

Sudah dipastikan dengan melihat hal tersebut dapat dicatat bahwa di dalam masyarakat Jawa terutama akhir abad ke-19 telah ada dua sistem pendidikan.

Dalam perkembangannya, pendidikan kolonial merupakan suatu rangkaian dengan penyelenggaraan pendidikan sejak masa V.O.C., akan tetapi perbedaannya terletak pada motif penyelenggaraan sekolah. Sekolah pertama yang didirikan V.O.C., di Ambon tahun 1607 untuk anak-anak Indonesia karena belum ada anak-anak Belanda. Tujuannya adalah untuk melenyapkan pengaruh ajaran Kristen Katolik yang dikembangkan oleh Portugis dengan menyebarkan ajaran Kristen Protestan (S. Nasution, 1987:4). Karena motif penyelenggaraan berdasarkan semangat keagamaan, maka pelajaran yang diberikan berkisar tentang *katekismus*, agama, membaca, menulis dan bernyanyi. Karenanya pula, dalam pengajaran tugas guru adalah memupuk rasa takut terhadap Tuhan, mengajarkan dasar-dasar agama Kristen, mengajar anak berdo'a, bernyanyi, pergi ke Gereja, mematuhi orang tua, penguasa dan guru (S. Nasution, 1987 : 5).

Kemudian setelah V.O.C. bubar tahun 1816, persoalan pendidikan dipegang oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dalam penanganan pendidikan ini lebih ditekankan pada motif ekonomis dan politik. Apalagi pengaruh aliran “*Aufklärung*” yang cukup besar bagi kebijakan kolonial Belanda sampai tahun 1891, sehingga di Indonesia sekitar akhir abad ke-19 ada dua corak pendidikan yang mempunyai pesantren yang di dalamnya di dominasi oleh pendidikan keshalehan berdasarkan agama Islam dan pendidikan kolonial yang di dalamnya lebih didominasi oleh prinsip ekonomis dan politis, sehingga pada pelaksanaan pengajarannya pun dititik-beratkan pada persiapan untuk menjadi pegawai pemerintahan kolonial baik di kantor maupun di gereja (M.T. Arifin, 1987:191). Pendidikan ini menjadi sekuler sejak kolonialis menyatakan secara terang-terangan bahwa pengajaran agama tidak diajarkan di sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Meskipun pada nyatanya mereka membela pengajaran untuk orang-orang Kristen.

1. Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dalam Pendidikan

Sekolah pertama yang didirikan Belanda adalah sekolah yang didirikan tahun 1817 di Batavia. Sedangkan sekolah untuk anak-anak pribumi didirikan pada tahun 1849 di Jawa. Setelah pendirian sekolah bagi orang Belanda di Jakarta, segera diikuti oleh pembukaan sekolah

di kota-kota lain di Jawa. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Prinsip yang digunakan dan dijadikan pegangan tercantum di Statuta 1818, bahwa sekolah-sekolah harus dibuka di tiap tempat bila diperlukan oleh penduduk Belanda dan diizinkan oleh keadaan atau secara lebih rinci dijelaskan, bila jumlah murid mencapai 20 di Jawa atau 15 di luar Jawa. Prinsip seperti ini terlihat pada akhir abad ke-19 bahwa hampir tercapai taraf pendidikan bagi anak-anak Belanda di seluruh Indonesia. Anak-anak tak mampu dibebaskan dari bayaran uang sekolah (S. Nasution, 1987:9). Dan berdasarkan Statuta 1818 antara lain menyatakan bahwa, “pemerintahan hendaknya membuat peraturan yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi anak bumiputera. Pemerintah memberi kesempatan bagi anak bumiputera untuk mendapatkan pendidikan pada sekolah Belanda” (S. Nasution, 1987 : 10).

Meskipun Belanda memberi suatu kebebasan seperti ini, tidak berarti pemerintah hanya berkewajiban membuat peraturan. Selain itu, anak-anak bumiputera yang akan masuk di sekolah Belanda dikenakan beberapa syarat yang memberatkan seperti melihat latar belakang keluarga calon dilihat dari pendapatan, jabatan (status sosial) dalam masyarakat dan kemampuan untuk membayar uang sekolah yang jumlahnya besar. Dan syarat yang paling memberatkan dan menyulitkan adalah calon

murid harus menguasai bahasa Belanda dengan lancar untuk dapat mengikuti pelajaran yang lainnya dengan baik karena menggunakan bahasa Belanda. (M.T. Arifin, 1987:194), sehingga pada tahun 1847, menurut laporan kepala Komisi Pendidikan hanya 37 anak-anak yang bukan Kristen yang masuk sekolah Belanda di antara 1700 murid. Namun Gubernur Jenderal mengemukakan kebijaksanaan, sesuai dengan advis Dewan Hindia Belanda agar jangan menerima anak Cina dan bumi-putera tanpa rundingan pemerintah (S. Nasution, 1987 : 10).

Memang cukup ironis, bila kebijakan dalam pendidikan yang diterapkan Hindia Belanda dihubungkan dengan gerakan liberalisme yang terjadi di negaranya sebagai akibat dari revolusi Perancis. Kaum liberalis ini menghendaki suasana cerah, sehingga abad ini kadang disebut sebagai abad pencerahan. Ciri-ciri *Aufklarung* ini antara lain :

- a) Percaya pada nalar
- b) Percaya pada sifat baik manusia dan kesempurnaannya.
- c) Menuju ke arah perikemanusiaan
- d) Menjunjung tinggi akal sehat
- e) Toleransi beragama
- f) Kebebasan memilih sendiri agama yang akan dianutnya sesuai dengan batin dan hati nuraninya.

- g) Kemerdekaan dan kebebasan pribadi, sehingga paham ini memperjuangkan dengan gigih mengenai hak-hak asasi manusia terhadap absolutisme negara atau pemerintah (M. Said, 1981:13)

Bahkan dalam pendidikannya, Belanda yang dipengaruhi oleh aliran *Aufklärung* atau pencerahan itu memegang prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Pemerintah kolonial berusaha tidak memihak salah satu agama.
- b) Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan penjajah.
- c) Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.
- d) Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elite-sosial (penjilat penjajah) Belanda.
- e) Pengetahuan dan kebudayaan Barat dijadikan dasar pendidikannya (M. Said, 1981:11).

Dari prinsip inilah nampak dilakukannya politik pecah belah dan adu domba, termasuk diskriminasi sosial berdasarkan strata. Juga sikap ketergantungan menjadi pencari kerja dan bukan pencipta lapangan pekerjaan atau berwiraswasta, meskipun dengan gaji yang rendah atau pegawai murahan.

Keironisan lainnya nampak sekali dari cita-cita yang dikehendaki oleh gerakan ini. Cita-cita tersebut adalah menghendaki kebebasan manusia dalam berbagai hal, lepas dari keterikatan geraja dan mengembangkan ilmu pengetahuan umum kepada seluruh masyarakat.

Bila antara kebijakan Belanda yang tertuang dalam prinsip-prinsip pendidikan itu dihubungkan, maka di sana akan ditemukan keganjilan. Hal tersebut sangat nampak sekali dari adanya usaha differensiasi (pemisahan) di antara kaum pribumi dari golongan berada dengan golongan melarat. Keadaan seperti ini terus bertahan sampai menjelang lahirnya politik etis. Akan tetapi, dalam hal ini pun tidak bisa menutup mata, bahwa pemerintahan Hindia Belanda masih sempat menyediakan dana untuk pendidikan rakyat pribumi waktu itu. Berdasarkan keputusan Raja Belanda tertanggal 30 September 1848 nomor 95 kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch (pencipta "*Cultur stelsel*"), ia memberi wewenang untuk menyediakan biaya f. 25.000,- setahun bagi pendirian sekolah-sekolah bumiputera di pulau Jawa. Tahun 1883, jumlah tersebut menjadi f. 400.000,- masih untuk pulau Jawa saja, sedangkan untuk seluruh Hindia Belanda sebesar f. 1.196.000,- (f.=*florin; golden* =rupiah belanda) (M.Said, 1981: 14).

Pendidikan yang dikembangkan Belanda ini diperkuat sesudah tahun 1850, yaitu pemerintah Belanda mengumumkan peraturan baru

pada tahun 1854 dalam bentuk konstitusi dan administratif. Salah satunya mencantumkan masalah pendidikan. Peraturan ini menyatakan bahwa Gubernur Jendral harus mendorong pembangunan sekolah bagi kaum pribumi (M.T. Arifin, 1987:195), maka berdasarkan kebutuhan terhadap pendidikan ini, Raja Belanda mengeluarkan keputusan tertanggal 28 September 1892 yang termuat dalam lembaran negara (*Staatsblad*) nomor 125 tahun 1893, terjadi reorganisasi kebijakan pendidikan dasar untuk bumiputera sebagai berikut:

- a. Sekolah dasar kelas satu (*De Eerste Klasse School*) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan atau kaum priyayi lainnya. Didirikan di ibu kota keresidenan, kabupaten, kewedanaan atau yang sederajat dan di kota-kota pusat perdagangan dan kerajinan atau di tempat-tempat yang dipandang perlu. Pendidikan sekolah ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan dan perusahaan. Bahasa pengantarnya semula bahasa daerah dan Melayu, tetapi kemudian diubah sama sekali menjadi bahasa Belanda pada tahun 1914.
- b. Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Tweede Klasse School*) adalah sekolah bagi anak-anak bumiputera pada umumnya, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat umumnya (M. Said, 1981:14).

Perlu jadi catatan, bahwa Sekolah Kelas Satu yang tadinya hanya untuk rakyat pribumi kelas atas, dalam perkembangannya kemudian menjadi ELS (*Europesche Lager School*) untuk anak-anak belanda di Indonesia dan anak-anak bangsawan; dan HIS (*Holandsch Islandsche School*) untuk anak-anak tokoh bumiputra, anak-anak pegawai negeri (*amtenar* yang bergaji sekurang-kurangnya f. 75,- sebulan atau bertitel Raden). Sekolah ini lama belajarnya 7 tahun. Sementara Sekolah Kelas Dua baru terlaksana pendiriannya pada tahun 1907.

Untuk mendidik para guru sekolah di atas, tahun 1852 pemerintah Belanda mendirikan Sekolah Guru (*Kweek School*) di Surakarta. Sekolah ini kemudian berkembang karena menarik para putra priyayi.

Sampai tahun 1871 kebijaksanaan pemerintah kolonial tentang pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jumlah sekolah guru perlu ditambah.
- b. Sekolah-sekolah tingkat dasar terutama ditunjukkan untuk mendidik anak-anak bangsawan, tetapi juga anak-anak orang kebanyakan.
- c. Pengajaran dengan menggunakan bahasa daerah setempat atau bahasa Melayu.
- d. Pelajaran-pelajaran dasar antara lain: membaca, menulis dan berhitung.
- e. Pelajaran pilihan, antara lain: berhitung ilmu

- bumi, sejarah, ilmu hayat pertanian, menggambar, menyanyi dan bahasa Belanda.
- f. Biaya sekolah secara keseluruhan, dikurangi penerimaan yang diperoleh sekolah, ditanggung pemerintah.
 - g. Agama tidak diajarkan sebagai mata pelajaran pada sekolah pemerintah (M.T. Arifin, 1987:197).

Memasuki abad ke-20, pendidikan di Indonesia dalam perkembangannya dibagi dalam tiga fase. Sampai tahun 1915, pendidikan barat dianggap sangat penting bagi pribumi; kemudian timbul suatu reaksi yang menghendaki agar pendidikan bagi pribumi tidak melepaskan mereka dari kebudayaan aslinya. Selanjutnya timbul fase pengurangan pendidikan Barat yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, sejalan dengan keinginan mengadakan penghematan dalam bidang pendidikan. (Aqib Suminto 1985:46)

Fase pertama dimulai dari 1900 sampai tahun 1915. Pada fase ini kaum kolonial Belanda merasa yakin terhadap pentingnya pendidikan Barat bagi kaum pribumi, walaupun ada sekolah desa yang didirikan oleh Van Heutz, pendidikan Barat tetap mendapat perhatian. Waktu itu kebijakan pendidikan kolonial dipengaruhi oleh politik yang berkembang, yaitu politik etis. Politik etika atau politik asosiasi ini menghendaki adanya per-

baik sarana dan prasarana bagi kaum yang tertindas beberapa abad oleh Belanda. Oleh karenanya Belanda mulai memperhatikan persoalan irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Meskipun motif sebenarnya dari politik ini adalah usaha melangsungkan kolonialismenya di Indonesia (Mansur Suryanegara, 1995:218).

Pemerintah Belanda merasa yakin bahwa dengan pendidikan Barat yang diberikan kepada rakyat pribumi dapat menggeser posisi pesantren yang keadaannya sangat sederhana dibanding pendidikan yang diselenggarakannya. Hal demikian dikuatkan Snouck Hurgronje bahwa pendidikan Barat diformulasikan untuk menghancurkan pendidikan Islam dan ia begitu yakin bahwa pendidikan Barat mampu bersaing dengan pendidikan Islam (pesantren) (Aqib Suminto, 1985:49). Tetapi rupanya ia tidak memperhitungkan bahwa Islam dengan umatnya sanggup menghadapi tantangan tersebut. Atau bahkan dengan kesederhanaan pendidikan Islam di sana mengandung kekuatan. Hal ini juga pernah dikatakan oleh G.K. Niemann (1823–1905), seorang bangsa Belanda yang menaruh perhatian terhadap Islam di Indonesia, bahwa: “sangat mungkin bahwa segala kesederhanaan yang terdapat dalam agama Islam itu justru merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup yang langgeng”. (Fijfer, 1985: 102).

Selain dengan cara *westernisasi* pendidikan bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam

Indonesia, Belanda juga melancarkan ordonansi terhadap guru. Ordonansi mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah Belanda. Setelah keluar ordonansi pertama tahun 1905, kemudian keluar ordonansi kedua tahun 1925 yang mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol sekaligus pembatas gerak langkah para pengajar (guru) agama Islam di bumiputra.

Fase kedua dimulai tahun 1915 sampai dengan 1927. Sedangkan fase ketiga tahun 1927 sampai tahun 1942. Dalam kedua fase tersebut ditandai dengan munculnya reaksi dari berbagai kalangan baik dari golongan nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara dan Moh. Syafe'i ataupun dari golongan Islam. Namun yang jelas pada masa ini pemerintah Belanda berhasil mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi.

2. Tujuan Pendidikan Kolonial Belanda.

Kedatangan para kolonialis ke Indonesia (Hindia Belanda) pada mulanya hanya merupakan motif ekonomi, namun kenyataan sejarah menjadi lain ketika kolonial merasa kersan tinggal di Indonesia. Hal ini mendorong mereka untuk memikirkan bagaimana mereka dapat tinggal selamanya di negeri orang dengan dapat mengeruk kekayaan yang melimpah di

negara jajahannya. Oleh karenanya para penjajah baik V.O.C. atau pun yang lainnya menerapkan politik eksploitasi, yaitu dengan mengembangkan kekuasaannya di negeri ini. Termasuk dalam menetapkan kebijakan pendidikan di daerah jajahannya.

Oleh karenanya kebijakan pendidikan lebih banyak didasari oleh dorongan politis, maka keperluan yang berhubungan dengan pendidikan di negara jajahan diusahakan untuk dapat mencapai maksud jajahannya itu sendiri. Hal ini pernah diutarakan oleh P.J.A. Indenburg (Direktur Pendidikan dan Agama) dalam suratnya kepada Tjarda van Starckenborg Stachouwer (Gubernur Jendral), tanggal 27 Pebruari 1940 nomor 46, bahwa :

“Pemerintahan tidak bertugas memberi pimpinan, tetapi mengatur konsekwensi-konsekwensi sosial, mencegas ekses-ekses dan sistem pendidikan tidak dijadikan alat dalam politik untuk mencapai tujuan politik itu sendiri”.

Selanjutnya ia mengatakan :

“Perbedaan aspek dalam sistem pendidikan di negeri ini dengan di negeri Belanda menetapkan sikap pemerintahan di Hindia Belanda terhadap masalah ini. Di negara Belanda pemerintah dapat menyerahkan masalah pendidikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Tetapi disini pemerintah tidak dapat dengan begitu saja menganut pendirian bahwa pen-

didikan akan dengan sendirinya mengikuti turun naiknya kemampuan masyarakat di bidang spiritual dan materiil. Sebagai contoh praktis dikemukakan bahwa di negeri Belanda intensitas penyediaan pendidikan dapat menyesuaikan diri sama sekali kepada keadaan keuangan dalam negara dan masyarakat. Tetapi di sini menurut Indenburg cara yang demikian tidak sewajarnya untuk dapat diikuti dengan begitu saja, karena penambahan atau pengurangan macam-macam sekolah harus mengikuti garis-garis politik kolonial. Menurut pendapatnya sudah bertahun-tahun lamanya kurang secara prinsipil diperhatikan pengarahannya kebijaksanaan pendidikan kemasa depan. Yang dimaksudkannya (dimaksudkannya, pen.) bukan isi pendidikan untuk berbagai keperluan kelompok sosial dan rasial, tetapi bagaimana cara mengatur penyediaan sekolah-sekolah untuk pendidikan itu, dan cara mengutamakan bagian-bagian yang mana dalam sistem pendidikan pada masa tertentu dalam hubungan umum dengan tujuan pemerintah” (S.L. van der Wal, 1977 : 264)

Dari hal tersebut di atas sangat nampak bahwa bagaimana pun kebijakan seorang penjahat dalam apa pun, termasuk dalam pendidikan tiada lain hanya merupakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan politiknya. Bukti lain mengatakan, yaitu dengan melihat kebijakan yang diterapkan di negaranya sendiri yang lebih cenderung memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan secara murni, tanpa ada dorongan politis, tetapi di negara

orang (daerah jajahannya) lebih ditekan pada dorongan itu.

Saifudin Zuhri (1981:532) mengatakan bahwa dalam pikiran para penjajah melekat pikiran-pikiran politikus curang Machiavelli. Ajaran Machiavelli ini antara lain:

- a. Agama sangat perlu bagi tiap pemerintah kolonial.
- b. Agama harus dijadikan alat untuk menaklukkan penduduk setempat dan bukan membudayakannya.
- c. Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibantu.
- d. Jangan menepati janji kepada penduduk bila hanya merugikan pemerintah.
- e. Untuk mencapai tujuan sesuatu dapat menghalalkan semua cara.

Karena kebijakan pendidikan tidak murni atas dasar kepentingan pendidikan, maka dapat terlihat secara umum ciri-ciri pendidikan yang dihasilkan Belanda, antara lain: (1) *Gradualisme* yang nampak antara penyediaan pendidikan bagi anak Indonesia dan Eropa, (2) *Dualisme* dalam pendidikan dengan menekankan kontras yang tajam antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi, (3) kontrol sentral yang ketat dan kuat, (4) keterbatasan tujuan sekolah pribumi, yang peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam

perkembangan pendidikan, (5) prinsip *konkordansi* yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda dan (6) tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi (S. Nasution, 1987 : 20)

Dengan dasar-dasar seperti inilah pendidikan di Hindia Belanda disusun, dan dengan mengacu dari ini juga tujuan pendidikan kolonial bagi rakyat bumi putra ditetapkan.

Selama penjajahan Belanda, tujuan pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu, *Pertama*, tujuan pendidikan yang didasarkan atas kepentingan penyebaran agama Kristen Protestan guna menghapus pengaruh pendidikan agama Kristen Katolik yang dibawa oleh orang Spanyol dan Portugis ke wilayah Indonesia bagian Timur; *kedua*, tujuan pendidikan yang didasarkan kepentingan membedakan ras keturunan Belanda dan rakyat biasa, sehingga anak-anak keturunan Belanda dapat melanjutkan sekolahnya lebih tinggi di negeri Belanda; *Ketiga*, tujuan pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan terhadap tenaga murahan, oleh karenanya tujuan pendidikannya pun berusaha untuk mencetak tenaga-tenaga murahan (Ary H. Gunawan, 1986:42-45).

Akan tetapi, menurut M. Said (1981:21) tujuan pendidikan dibagi menjadi dua bagian yaitu: tujuan pendidikan sebelum tahun 1900

dan tujuan pendidikan sesudah tahun 1900. *Pertama*, tujuan pendidikan sebelum 1900 adalah untuk membentuk kelas elite, sedangkan *kedua*, tujuan pendidikan sesudah tahun 1900 adalah selain untuk membentuk kelas elite dan untuk menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendahan atau buruh kasar.

Terlepas dari pengklasifikasian tujuan seperti di atas tadi, yang jelas tujuan pendidikan selama masa kolonial tidak tegas dinyatakan, tapi dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan antara lain adalah untuk kepentingan kaum Belanda, di samping ada sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administratif, tenaga teknik, tenaga pertanian.

3. Kurikulum Pendidikan Kolonial Belanda

Sebagaimana halnya pendidikan, kurikulum pendidikan kolonial sebenarnya secara tegas tidak disebutkan, namun dalam tulisan ini ada beberapa catatan tentang kurikulum yang digunakan oleh pendidik yang diselenggarakan oleh kolonial sebagaimana yang dijelaskan oleh S. Nasution dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Indonesia* (kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum pendidikan untuk anak-anak pribumi) seperti HIS (*Holands Islands School*), Sekolah Kelas Dua (baik Sekolah Desa, Sekolah Sumbangan atau pun Sekolah Standar), MULO (*Meer Unitgebreed Lager Onderwijs*) dan

AMS (*Algemene Middelbare School*). Sementara ELS (*Europese Lagere School*) dan HCS (*Holland Chinese School*) tidak termasuk kategori sekolah untuk anak pribumi.

Isi kurikulum yang dijelaskan oleh S. Nasution dalam bukunya itu adalah :

a. Kurikulum Sekolah Kelas Dua

Menurut Statuta 1893 program Sekolah Kelas Dua terdiri dari pelajaran membaca, menulis dalam bahasa melayu dan berhitung. Selain itu diajarkan pula pendidikan jasmani dan menggambar, sedangkan pengajaran agama tidak boleh diajarkan walaupun pengajaran agama itu dapat dilakukan di luar kelas.

Khususnya Sekolah Desa (*Volkschool*) mempunyai kurikulum tersendiri, seperti di sekolah Desa di Aceh kurikulumnya adalah sebagai berikut :

- Kelas I Membaca, menulis bahasa melayu dengan huruf latin, latihan bercakap-cakap dan berhitung dari 1 sampai dengan 20.
- Kelas II Membaca dan menulis dengan huruf latin dan Arab, dikte dalam dua bahasa itu.
- Kelas III Pengulangan materi kelas II ditambah dengan berhitung di atas 100 dan pecahan sederhana.

**b. Kurikulum Holads Islandse School
(HIS)**

Kurikulum yang diajarkan di HIS ini sama halnya dengan yang diajarkan di ELS dan HCS, yaitu terdiri dari membaca, menulis nerhitung bahasa Belanda, Sejarah dan ilmu bumi, akan tetapi, di HIS diajarkan pula menulis bahasa daerah dalam aksara latin dan bahasa Melayu dalam tulisan Arab dan Latin.

Tahun 1915, pelajaran sejarah tidak diajarkan karena dianggap sensitif dari segi politik, sedangkan pelajaran bernyanyi dan menggambar tidak diajarkan karena tidak adanya guru yang kompeten di bidangnya.

**c. Kurikulum Meer Unigebreid Leger
Onderwija (MULO)**

Pada dasarnya sekolah ini merupakan sekolah dasar dengan program yang diperluas. Kurikulumnya adalah sebagai berikut :

MATA PELAJARAN DI MULO

Mata Pelajaran	Kelas		
	I	II	II
Membaca	3	3	3
Bahasa Belanda	5	4	4
Menulis (vokasional)			
Berhitung dan Matematika	8	9	7
Sejarah (Belanda dan Jajahan)	1	1	2
Sejarah (Dunia)	1	1	1
Geografi	3	3	3
Ilmu Alam	3	3	4
Bahasa Perancis	2	4	4
Bahasa Inggris	4	4	3
Bahasa Jerman	4	3	4
Menggambar	2	2	5
	36	36	36

(S. Nasution, 1987:124)

Dalam pendidikan tingkat MULO ini, kelihatannya pendidikan program bahasa lebih mendominasi seperti bahasa Perancis, Inggris, Belanda dan Jerman. Bahkan jumlah jam pelajaran setengahnya untuk pengajaran bahasa, sementara pengajaran lainnya sisa waktu dari pelajaran bahasa.

d. Kurikulum Algemene Middelbere School (AMS)

Sekolah ini dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian A yang terdiri atas A I dan A II dan bagian B. bagian A I khusus studi klasik Timur dan A II studi klasik Barat. Sedangkan bagian B khusus mempelajari fisika dan matematika.

Secara umum, pengajaran yang diberikan untuk seluruh bagian adalah sebagai berikut: Bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Inggris, sejarah, geografi, undang undang negara, matematika, botani, zoologi dan pendidikan jasmani.

Mata pelajaran khusus untuk AMS bagian A I (studi klasik Timur), meliputi: bahasa Jawa, arkeologi, etnologi Indonesia, fisika kimia, menggambar tangan dan bahasa Jerman, sedangkan bahasa Perancis dijadikan elektif. AMS bagian AII (studi klasik Barat) menyajikan pelajaran sama dengan bagian A I, hanya bahasa jawa dan arkhaelogi diganti dengan bahasa Latin dan tata buku. Sedangkan bagian B memusatkan pada matematika dan fisika menyajikan pelajaran fisika, kimia, matematika, kosmografi, gambar garis dan bahasa Jerman (S. Nasution, 1987:139).

Jika kita melihat kurikulum pengajaran yang disajikan dalam sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Belanda, nampaknya ada satu kepincangan materi. Hal ini berdasarkan pada kebutuhan manusia terhadap nilai-nilai spiritual, namun pada program peng-

ajaran itu sama sekali tidak terdapat, bahkan sebagaimana dijelaskan di atas, program pengajaran keagamaan (Islam) tidak boleh diadakan. Padahal mayoritas anak-anak pribumi yang masuk sekolah di sekolah-sekolah itu adalah umat Islam.

-----&&&-----

BAB IV

PERANAN MUHAMMADIYAH DALAM MENGINTEGRASIKAN DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA

A. Latar Belakang Lahirnya Muhammadiyah

PEMBAHARUAN pemikiran Islam di Indonesia sebenarnya telah ada sejak awal abad ke-19, terutama di Sumatra Barat dan di Jawa. Pembaharuan ini pada umumnya berkisar pada gerakan pendidikan sosial dan gerakan politik, namun yang menjadi sasaran pembaharuan tetap masalah keagamaan. Dan tampaknya dua bidang ini menjadi objek pembaharuan waktu itu sangat tepat. Hal ini dapat dimengerti karena pendidikan yang diselenggarakan rakyat pribumi pada umumnya masih bersipat tradisional dan berada di pedesaan. Tetapi sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial kondisinya jauh lebih baik dari lembaga yang diselenggarakan pribumi, umat Islam. Kondisi pendidikan seperti ini tidak akan mampu menyaingi pendidikan kolonial yang lebih modern. Sementara dalam bidang politik, kepertaian yang memiliki semangat Islam dianggap perlu karena umat Islam menginginkan penjajahan Belanda

segera angkat kaki dari Indonesia (Fachry Ali 1986:66).

Di Jawa, organisasi pertama yang mewujudkan cita-cita pembaharuan dan menentukan adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu yang dikelola oleh masyarakat Arab-Indonesia yang prihatin terhadap situasi pendidikan Islam yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Kendatipun lembaga pendidikan yang didirikan itu pada umumnya lebih peruntukkan bagi kalangan masyarakat Arab sendiri, namun, tidak bisa tidak, kehadirannya memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam. Organisasi tersebut adalah *Al Jam'iyah al-Khairiyah* (kemudian dikenal dengan sebutan Jamiat Khaer) didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta (Dadan Wildan, 1995:19). Setelah berdirinya Jamiat Khaer, kemudian disusul oleh organisasi Islam pembaharu lainnya, seperti Sarikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Persatuan Oemat Islam (1912) dan Persatuan Islam (1923).

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi pembaharuan lahir tanggal 18 Dzulhijjah 1330 Hijriyah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara etimologis berasal dari kata "Muhammad" yaitu nama Rasulullah SAW, yang diberi tambahan *Ya nisbat (h)* dan *ta marbutbah* yang berarti mengikuti Nabi Muhammad (Ensiklopedi Islam, 1992:275). Atau organisasi diberi nama Muhammadiyah dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pendukung organi-

sasi ini adalah umat Muhammad, dan yang dijadikan asas perjuangannya adalah Islam. Tujuannya adalah untuk memahami dan melaksanakan agama Islam sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah, agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan Islam. Selanjutnya, ajaran ini akan memberi napas bagi kemajuan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya (Djarnawi Hadikusuma, 1978:7).

Antara kelahiran Muhammadiyah dengan kehidupan awal perjuangan K.H. Ahmad Dahlan di Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, untuk mengetahui akar masalah tentang kelahiran Muhammadiyah terlebih dahulu harus diketahui perjuangan Ahmad Dahlan dalam merintis organisasi Islam tersebut di Indonesia.

Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan Muhamad Darwis, anak dari seorang Kyai Haji Abubakar, khatib di mesjid sultan di kota itu. Ia tidak pernah masuk sekolah formal, tetapi ia belajar menulis dari bapaknya, kemudian belajar dari kyai-kyai lainnya. Tahun 1890 ia melaksanakan ibadah haji ke Mekah, dan tinggal di sana selama dua tahun sambil belajar kepada Syekh Ahmad Khatib.

Sebelum mendirikan pergerakan Muhammadiyah, ia pernah membuat kejutan di kalangan orang-orang kraton, yaitu dengan keberaniannya mengubah kiblat shalat mesjid yang sebelumnya hanya sekedar menghadap ke Barat (Deliar Noer 1995:85). Karena itu A. Dahlan dikucilkan oleh

masyarakat karena dianggap menentang kebiasaan lamanya. Pada tahun 1898, Ahmad Dahlan memelopori musyawarah Alim Ulama di Yogyakarta. Musyawarah ini kelak (tahun 1922) memberikan inspirasi kepada kyai Dahlan untuk membentuk Musyawarah Ulama. Selanjutnya tahun 1927, Musyawarah Ulama ini mendorong dibentuknya Majelis Tarjih yang konsepsi program dan fungsinya disusun oleh suatu tim (komisi) yang diketahui oleh Kyai Mas Mansur (Abdu Munir Mulkhan, 1990 : 17).

Sebagai seorang ulama yang komit terhadap ilmunya, Ahmad Dahlan mempunyai prinsip bahwa Islam itu harus diamalkan. Dan hal ini ia terapkan dalam metode pengajaran terhadap murid-muridnya, yaitu kalau mengajarkan salah satu ayat (surat al-Maun, contohnya) ia berikan secara berulang-ulang sampai muridnya paham betul terhadap makna ayat itu, kemudian setelah faham, muridnya langsung diajaknya untuk memberi makanan kepada fakir miskin, membangun rumah untuk mereka dan sebagainya (Prodjokusumo, 1990 : 14).

Dalam hal lain, Ahmad Dahlan melihat bahwa keadaan umat Islam sudah jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Islam yang ada di sekelilingnya hanya merupakan Islam *sinkretik*, yaitu Islam yang telah bercampur dengan adat kebiasaan agama Hindu dan Budha dan nilai paganistik lainnya yang sudah mengental dalam diri masyarakat. Karenanya tidak aneh kalau Herry J. Benda (1980:31) menga-

takan bahwa Islam di tanah Jawa untuk jangka panjang masih tetap bersifat kurang murni dibanding dengan daerah lainnya. Bagi Dahlan keadaan seperti ini perlu ditangani secara hati-hati, karenanya dalam dakwahnya Dahlan menggunakan yang akomodatif dan rasionalistik.

Dahlan melihat bahwa umat Islam waktu itu dalam keadaan kemunduran. Karenanya Dahlan punya pemikiran bahwa kunci persoalan untuk meningkatkan kemajuan umat Islam adalah pemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di masyarakat (Abdul Munir Mulkhan, 1990:65). Kaitannya dengan ini, Dahlan pernah menyampaikan pesan “Menjadilah Insinyur, guru, master, dan kembalilah berjuang dalam Muhammadiyah”.

Sebagai realisasi dari yang dicita-citakannya, ia mendirikan sekolah yang pertama secara formal yakni Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah di rumahnya sendiri dalam ruangan tamunya yang berukuran 2,5 x 6 meter. Sekolah ini dikelola secara modern.

Tahun 1909, Ahmad Dahlan menjadi anggota Budi Utomo. Dalam penggerakan ini, Ahmad Dahlan berusaha memanfaatkan kesempatan, yaitu memberi pengajaran keagamaan di kalangan anggota-anggotanya. Dan ia meraih sukses atas usahanya itu. Selanjutnya, karena menjadi dekatnya persahabatan antara K.H. Ahmad Dahlan dengan anggota Budi Utomo, diantara mereka ada yang mengusulkan supaya Dahlan membentuk sebuah

pergerakan dalam sebuah wadah. Maka tepatnya tanggal 18 Nopember 1912, Muhammadiyah secara resmi didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan.

Supaya menjadi lebih jelas, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan Muhammadiyah lahir di tengah-tengah masyarakat Islam tradisional dalam satu sisi dan masyarakat kolonial dalam sisi lain. Faktor penyebab lahirnya Muhammadiyah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor intern

Yang dimaksud dengan faktor intern adalah keadaan yang ada dalam diri umat Islam sendiri (Ensiklopedi Nasional, 1988:789). Faktor-faktor intern ini antara lain :

- a. Adanya praktek kehidupan umat Islam yang dianggap telah bercampur dengan ajaran-ajaran lain sehingga mengakibatkan Islam tidak murni. Menurut Peacock (1986:38) pencampuran ini sebagai akibat dari ajaran kebathinan, Hindu-Budha, feodalisme, dan kolonialisme, keadaan seperti ini mengakibatkan keruntuhan akhlak dalam masyarakat.
- b. Dari keadaan seperti ini mengakibatkan pula sikap taklid buta, berpikir dogmatis dan hidup dalam fanatisme yang sempit. Kehidupan Islam tradisional ini pula diwarnai oleh konservatisme, formalisme dan tradisionalisme.

- c. Adanya lembaga pendidikan agama Islam dipandang kurang efektif. Pesantren yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah, pada masa itu dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dan pada waktu itu pola pendidikan terpecah antara pendidikan pesantren yang mengutamakan pendidikan keagamaan semata dengan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sekuler. Ini mengakibatkan kesenjangan intelektual antara kaum santri dengan kaum priyayi.
- d. Kemiskinan menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam, yang sebagian besar petani dan buruh. Sedangkan orang kaya hanya memperhatikan dirinya sendiri, dan bahkan banyak ulama lupa mengingatkan umatnya untuk membayarkan zakat bagi si kaya, sehingga hak-hak fakir miskin terabaikan.

2. Faktor ekstern

Yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar Islam. faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Usaha mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar Islam. yang dimaksud disini adalah mencegah masuknya pengaruh budaya-budaya Barat yang akan merusak citra Islam. karena tidak sedikit kaum pelajar Indonesia lupa akan situasi

asal dan bangsanya sendiri. Selain itu *kristening politiek* yang dilancarkan oleh gubernur Indenburg cukup membahayakan akidah umat Islam. politik ini menginginkan agar rakyat Indonesia menjadi kaum nasrani (L Stoddard, 1966:306). Mereka dalam usahanya banyak mendirikan sekoalah-sekolah yang mempunyai misi Katolik dan Protestan yang sekolahnya dibiayai oleh Pemerintah Belanda.

- b. Pengaruh dan dorongan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Dahlan sebagai seorang yang gemar menelaah dan menafsirkan al-Qur'an. Sehingga ia banyak membaca tafsir *al-Manar* Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Maka tidaklah berlebihan, dalam beberapa hal K.H. Ahmad Dahlan mendapat dorongan dari padanya. Dan apa yang dicita-citakannya serta yang menjadi renungannya dengan membandingkan tafsir itu seolah-oleh mendapatkan kawan yang seiring-sejalan dan mendapat bantuan moril (Mustafa Kamal, 1976:31).

Melihat keadaan umat Islam yang demikian, Ahmad Dahlan juga didorong oleh pemahaman terhadap surat Ali Imron ayat 104 bermaksud membuat sebuah wadah sebagai sarana *amar ma'ruf naby munkar*. Karena menurutnya, agar tujuan dapat dicapai, maka mutlak adanya suatu sarana yang

efektif guna mencapai tujuan tersebut (Djarnawi Hadikusuma, 1978:7)

B. Amal Usaha Muhammadiyah

Berdirinya Muhammadiyah tanggal 18 Nopember 1912 itu bukan berarti secara sah pula Muhammadiyah diakui keberadaannya oleh Belanda. Akan tetapi, pemerintah kolonial baru mengakuinya secara resmi pada tahun 1914. Itupun atas perjuangan berat yang dihadapi K.H. Ahmad Dahlan yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah. Pengakuan pemerintah Hindia Belanda atas Muhammadiyah tercantum dalam *Gouvernement Besluit* No. 81 (surat keputusan Hindia Belanda), tertanggal 22 Agustus 1914. Surat pengakuan atas berdirinya Muhammadiyah diizinkan hanya untuk daerah Yogyakarta, serta berlaku selama 29 tahun. Pengakuan ini kemudian diperbaharui tahun 1920 melalui *Gouvernement Besluit* No. 40 tertanggal 16 Agustus 1920, yang mengizinkan Muhammadiyah memperluas gerakannya se-Ke-residenan Yogyakarta. Kemudian ini diubah lagi melalui *Gouvernement Besluit* No. 36 tertanggal 2 September 1921, yang mengizinkan Muhammadiyah mengembangkan gerakannya di luar Yogyakarta. Jika masa berlakunya izin telah habis yang dibatasi selama 29 tahun, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Namun, sebelum masa berlaku habis, Belanda telah terusir dari Indonesia (Ensiklopedi Islam, 1992:277). Dan

demikian, Muhammadiyah menunjukan organisasi pertama yang mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda.

Pada masa berdirinya, Muhammadiyah bertujuan untuk “Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw kepada penduduk bumi-putera, di dalam residensi Yogyakarta” dan “Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya” (Mustafa Kamal, dkk., 1976:31). Akan tetapi, setelah Muhammadiyah membuka beberapa cabang di wilayah Hindia Belanda (Indonesia), maka rumusan tujuan disempurnakan menjadi: “Memajukan dan mengembangkan pengajaran dan pelajaran Agama Islam di Hindai Belanda” dan “Memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan Agama Islam kepada sekutu-sekutunya” (Mustafa Kamal, dkk., 1976:31).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu sebab berdirinya Muhammadiyah karena mendapat dorongan dari pembaharuan yang terjadi di dunia Islam, yang terutama pengaruh Abduh ke dalam pemikiran Dahlan, karenanya gerak langkah Muhammadiyah tidak terlalu jauh dari misi gerakan salafnya Abduh, yaitu :

- a. Mensucikan agama Islam dari pengaruh yang salah dan kebid’ahan.
- b. Membaharui pendidikan yang lebih tinggi bagi kaum muslimin.
- c. Memperbaharui rumusan ajaran Islam menurut alam pikiran modern.
- d. Mengadakan pembelaan terhadap pengaruh

Barat dan Kristen (H.A.R. Gibb, 1992:58).

Oleh sebab itu, usaha-usaha Muhammadiyah dalam perjalanannya tidak terlepas dari pemikiran di atas.

Selama masa pendudukan kolonial Belanda, Muhammadiyah telah banyak memberikan sumbangan yang besar bagi perjuangan bangsa Indonesia baik bidang keagamaan, pendidikan, politik, dan bidang sisial lainnya. Namun, bidang-bidang yang menjadi garapan Muhammadiyah ini, semuanya berpangkal pada pembaharuan Islam.

1. Bidang Keagamaan

Bidang ini merupakan pangkal dan dasar dalam usaha Muhammadiyah. Dalam keagamaan lebih ditekankan pada pemurnian ajaran Islam yang telah bercampur dengan ajaran yang lain. Tentang hal ini, Muhammadiyah menjadikan putusan *Mu'tamar Khusus Tarjih* di Solo tahun 1929, yaitu '*aqoidoel-Iman* sebagai landasan pemurnian dalam Islam. Isi '*aqoidoel-Iman* ini adalah menyatakan kedudukan Allah sebagai Tuhan dari kehidupan. Maksudnya, menurut sumber ajaran keagamaan yang diyakini Muhammadiyah, segala sesuatu berasal dari Allah (M.T. Arifin, 1987:141).

Dari keyakinan seperti ini, Muhammadiyah memandang segala peraturan yang datangnya bukan atas landasan tauhid kepada Allah dan tidak mencontoh kepada utusannya (Nabi Muhammad SAW), maka amal itu tertolak, seperti upacara

selamatan Tujuh Bulanan bagi wanita hamil, penghormatan yang berlebihan terhadap tokoh ulama seperti selamatan sambil mohon berkah kepada Syekh Abdul Qodir Jaelani dan Syekh Saman yang dikenal dengan *manakiban*, membaca surat yasin dan bermacam-macam dzikir yang dikhususkan malam jum'at, Ziarah kubur kepada leluhur dalam waktu-waktu tertentu sambil memohon berkah atasnya, tahlilan atas kematian seseorang pada hari ke-3, 7, 40, 100, 1000 dan *mendak*.

Selain itu, dalam rangka melangsungkan konsep pengembangan hukum di kalangan Muhammadiyah, tahun 1927 Muhammadiyah membentuk badan resmi yang menangani masalah keagamaan yang disebut *Majlis Tarjih*. Sisi lain, Muhammadiyah juga peka terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan organisasinya, yaitu dengan membentuk wadah (perkumpulan) yang dikhususkan untuk; para wanita, yang kemudian disebut *Aisyiah*, *Nasyitul Aisyiah*, *Pemuda Muhammadiyah*, *Hiżbul Wathan* (Kepanduan Muhammadiyah). Selanjutnya disusul pula dengan adanya *Majlis Pustaka*, *Tapak Suci* dan sebagainya.

Nakamura (1983:112) menjelaskan bahwa Muhammadiyah juga sangat berperan dalam membenahi pemungutan serta distribusi harta zakat. Sebelumnya zakat biasanya dikumpulkan oleh *modin*, *naib* dan penghulu yang hasilnya dibagikan di antara mereka sendiri. Tetapi melihat hal itu Muhammadiyah bangkit kemudian membetulkan praktek zakat yang dianjurkan oleh Al-qur'an dan

Hadits Nabi baik kadar pengeluaran zakat atau pun orang yang berhak menerimanya.

Hal lain yang paling mencolok dari gerakan keagamaan di kalangan Muhammadiyah adalah adanya sikap untuk kembali kepada sumber Islam yang Murni, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi serta menolak secara tegas terhadap kepercayaan *bid'ah*, *Khurafat* dan *tabayul*. Selain itu Muhammadiyah memelopori akan pengembangan *ijtihad* serta menolak *taqlid*.

2. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan ini, Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dengannya. Karena yang pertama dan yang utama pembaharuan Islam Muhammadiyah ini adalah di bidang pendidikan. Karena dengan cara ini dapat memajukan rakyat pribumi dari ketinggalan. Senada dengan ini, Nakamura (1983:102) mengatakan: "Dalam pandangan Muhammadiyah tentang Islam yang benar, pendidikan agama adalah suatu keharusan; adalah merupakan kewajiban bagi orang Islam untuk terus mempelajari ajaran Tuhan sejak kanak-kanak sampai meninggal".

Karya Muhammadiyah dalam pendidikan banyak sekali. Dan ini merupakan salah satu keberhasilan Dahlan yang dengan gigih memperjuangkannya, sehingga setahun sebelum Ahmad Dahlan meninggal, Muhammadiyah telah memiliki 8 jenis sekolah yang dikelola secara modern dengan jumlah guru 73 orang, siswa 1.019 orang (Abdul Munir

Mulkhan, 1986 : 23). Berdasarkan data dari kamus Ensiklopedi Nasional (1972:382), hingga tahun 1925 jumlah guru menjadi 119 orang dan murid mencapai 4.000 orang.

Penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yang dikelola secara modern ini, kadang menyaingi sekolah yang didirikan oleh kolonial. Seperti di Kotagede Yogyakarta, sekolah Muhammadiyah lebih terkenal dibanding sekolah yang diselenggarakan pemerintah, bahkan kalau mendengar sekolah Muhammadiyah praktis sinonim dengan sekolah modern (Nakamura, 1983:110). Kemoderanan yang dimaksud adalah penggunaan sarana pendidikannya sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu penggunaan bangku, papan tulis, tempat duduk (*dingklik*; kursi berkaki empat dari kayu dengan tempat duduk panjang) dan sistem pengajaran secara klasikal (Abdul Munir M, 1986:19).

Selain itu, Muhammadiyah melakukan *co-educasi* (percampuran) antara murid laki-laki dan perempuan bahkan Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan khusus untuk wanita. Padahal waktu itu pendidikan Islam untuk wanita di Jawa khususnya belum ada. Seperti diceritakan Snouck Hurgronje, bahwa: “Saya tidak pernah mendengar bahwa di pesantren daerah priangan ada gadis tinggal di dalamnya” (Fijfer, 1987:19). Cara-cara yang ditempuh oleh Muhammadiyah inilah yang waktu itu belum dikenal dalam kalangan santri.

Akan tetapi, dari sekian uraian di atas yang terpokok dari kegiatan Muhammadiyah di bidang pendidikan, sebagaimana diceritakan Mustafa Kamal (1976:38) bahwa Muhammadiyah berhasil memadukan pendidikan antara pesantren dengan pendidikan pemerintah, yaitu dengan:

- a. Mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan pendidikan keagamaan di dalamnya, dan
- b. Mendirikan madrasah-madrasah yang di dalamnya diberikan pendidikan umum.

3. Bidang Sosial

Tobroni dan Syamsul Arifin (1994:175) menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan amal. Gerakan ini mendorong pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat terutama menyantuni kaum yang lemah (fakir miskin dan yatim) termasuk pelayanan kesehatan. Hal senada dikatakan pula oleh Mitsio Nakamura (1983:102) bahwa: “Muhammadiyah menekankan perlunya kegiatan kesejahteraan sesama manusia dalam bentuk rumah sakit, klinik, rumah yatim dan lain-lain sebagai pelaksanaan kewajiban orang Islam.”

Memang benar apa yang dikatakan oleh Nakamura dan Tobroni di atas, karena dalam prakteknya Muhammadiyah banyak menghasilkan karya dalam kegiatan-kegiatan sosial. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga sosial yang telah dihasilkan oleh Muhammadiyah, sehingga ada yang mengatakan bahwa Muham-

madiyah merupakan sebuah organisasi keagamaan. Yang mengatakan seperti ini salah satunya adalah Nakamura. Akan tetapi, hal ini rupanya secara tegas dikatakan bahwa Muhammadiyah bukan sekedar organisasi sosial semata tetapi merupakan organisasi keagamaan yang memberi ilham dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Lebih jelas dikatakan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah ke-14 tahun 1985, Bab I, pasal I, disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan bersumber pada al-Quran dan Sunnah.

Bentuk nyata kegiatan sosial Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- a. Muhammadiyah mendirikan lembaga penolong kesengsaraan umum. Didirikan tahun 1918 oleh Haji Sudja dan kawan-kawannya. Pada mulanya, lembaga ini diadakan untuk membantu para korban letusan Gunung Kelud di Jawa Timur. Tetapi tahun 1921, lembaga ini secara resmi berada di bawah naungan Muhammadiyah.
- b. Mendirikan rumah-rumah yatim piatu dan fakir miskin. Kerja nyata seperti ini merupakan wujud nyata atas makna yang dikandung oleh surat al-Ma'un dan tidak lagi sekedar hanya bicara di podium.
- c. Mendirikan rumah sakit dan balai pengobatan untuk rakyat pribumi. Rumah sakit yang didirikan Muhammadiyah merupakan rumah sakit pertama yang dikelola secara modern oleh dan

untuk rakyat pribumi.

- d. Mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan dan toko buku. Termasuk penerbitan majalah Muhammadiyah yang sampai sekarang masih terbit.
- e. Pengusahaan bantuan dana hari tua (pensiunan)
- f. Memberi bimbingan hidup dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntunan ilahi (Mustafa Kamal, 1976 : 38-39).

Amin Abdullah (1995:22) menambahkan bahwa Muhammadiyah mendorong dan memprakarsai semangat kewiraswastaan, kemandirian dan kerja keras serta etos kerja lainnya yang bersifat sosial ekonomi, yaitu dengan adanya sentral-sentral industri batik yang dikelola oleh anggota-anggota Muhammadiyah.

4. Bidang politik

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang berdasarkan pada al-Quran dan sunnah Nabi. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, dan menurut Ahmad Dahlan, Muhammadiyah tidak mungkin menjadi organisasi politik. Akan tetapi, Muhammadiyah sadar bahwa agama Islam mengatur segenap persoalan kehidupan manusia di dunia, maka dengan sendirinya segala hal yang berhubungan dengan persoalan dunia menjadi garapannya, tak terkecuali masalah politik.

Sejarah membuktikan bahwa K.H. Ahmad Dahlan pernah memasuki organisasi Budi Utomo, bahkan mempunyai pengaruh di dalamnya, juga Ahmad Dahlan pernah masuk menjadi anggota Sarekat Islam. Tetapi sikap Ahmad Dahlan seperti ini, nampaknya lebih didorong oleh misi dakwahnya untuk mengenalkan Islam modern pada tokoh-tokoh Budi Utomo yang secara kultural bercorak Jawa, tetapi secara intelektual telah menyerap ide-ide Barat (Syafi'i Ma'arif, 1995:10).

Dr. Bekker pernah mengatakan bahwa: "... kalau-kalau Muhammadiyah lama kelamaan menginjak lapangan politik (Abdul Munir, 1985:19). Hal ini senada dikatakan pula oleh Bosquet, seorang kebangsaan Perancis yang mengamati penjajahan di Indonesia, memperhatikan bahwa Muhammadiyah bagi kolonial sangat membahayakan. Dia mengatakan :

Di dalam lapangan politik, Muhammadiyah adalah netral dalam arti ia menolak untuk mengambil bagian secara resmi. Sasarannya yang menonjol adalah menyebarkan kebudayaan Islam. Karena alasan yang melulu seperti ini, berbeda dengan kelompok nasionalis, Muhammadiyah diperlukan begitu baik oleh penguasa. Meskipun demikian akan sangat salah mengira dari hal ini bahwa anggota-anggotanya tidak mempunyai kecenderungan politik (Mitsuo Nakamura, 1983 : 110).

Boleh jadi apa yang dikatakan Bosquet di atas memang benar, akan tetapi bukan berarti Muham-

madiyah secara resmi masuk pada sebuah partai politik atau membuat partai sendiri. Dan hal itu bukan pula berarti Muhammadiyah terjun langsung ke dalam politik praktis (*low Politics*), akan tetapi Muhammadiyah hanya berpolitik di bawah payung amal shaleh. Itu pun politik yang dipayungnya bukan politik praktis, tetapi *Hight Politics*, atau politik yang tidak diwarnai dengan konflik pertentangan (Amin Rais, 1995:35).

Nampaknya, amal usaha Muhammadiyah yang telah disebutkan itu bukan berarti hanya seperti itu, tetapi masih banyak lagi yang lainnya, namun amal yang telah diuraikan itu merupakan hal-hal yang pokok saja. Mukti Ali (1987:181) menyimpulkan bahwa amalan-amalan Muhammadiyah dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu :

- a. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang datangnya bukan dari Islam.
- b. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern.
- c. Reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan
- d. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar.

C. Usaha-usaha Muhammadiyah dalam Mengintegrasikan Dualisme Pendidikan

1. Merumuskan Tujuan Pendidikan Islam

Ahmad Tafsir (1994:46) menyebutkan bahwa dasar kehidupan adalah pandangan hidup, dengan mengutip T.S. Eliot dia mengatakan bahwa pendidikan itu dalam tujuannya harus diambil dari pandangan hidup seseorang. Jika pandangan hidupnya Islam, maka tujuan pendidikannya pun harus diambil dari Islam. Begitu pula Muhammadiyah sebagai organisasi reformasi dengan tokohnya Ahmad Dahlan.

Kalau begitu, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah bagaimana pandangan Ahmad Dahlan terhadap pendidikan Islam. Abdul Munir Mulkhan (1993:146-147) menyebutkan beberapa pokok pikiran Dahlan tentang pendidikan, antara lain:

- a. Daya kritis, sikap terbuka, akal sehat dan hati yang suci merupakan jalan untuk mencapai pengetahuan tertinggi mengenai kesatuan hidup.
- b. Sikap kritis terhadap segala tradisi adalah langkah awal mencapai kesatuan hidup.
- c. Akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia.
- d. Logika atau manthiq adalah pendidikan tertinggi bagi akal.
- e. Kecerdasan adalah kesediaan menerima dan memahami pikiran yang baik dan kebijaksanaan.

- f. Kekuatan seseorang ditentukan oleh kesediaan mengakui kebenaran orang lain.

Nampaknya pandangan Dahlan seperti ini merupakan usaha kreatif untuk membuka suasana baru terhadap kerangka pikir yang beku dan diwarnai oleh ketertutupan ijtihad, khususnya dalam pendidikan yang menyelimuti kaum muslimin waktu itu, ia melihat bahwa pendidikan pesantren dan pendidikan gubernemen yang bertolak belakang tidak dapat mengintegrasikan aqidah dengan intelektual dalam diri anak atau tidak dapat membentuk anak yang ulama-intelektual atau intelektual-ulama. Karena itu, Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam harus diarahkan pada tiga persoalan, yaitu :

- a. Pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha untuk menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan intelektual, antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dengan akhirat.
- c. Pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. (M.T. Arifin 1987:206).

2. Pendidikan moral

Pendidikan moral merupakan *practical-philosophy* atau *bikmah amaliyah*. Pendidikan ini menurut Muhammadiyah sangat penting, karena watak dan kelakuan manusia mempunyai pengaruh yang besar atas perkembangan masyarakat dalam segala aspeknya serta menentukan corak dan kondisi sosial (M.T. Arifin, 1987:206). Dan nampaknya Muhammadiyah tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak akan terlepas dari kondisi sosial yang sedang berlaku. Karena itu, manusia perlu mempelajari watak dan karakter manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan tahu siapa dirinya, lebih lanjut ia akan berusaha memperbaiki watak dan kelakuannya serta mempelajari sistem pembentukan watak pada manusia. Pada sisi yang lainnya bisa jadi manusia (muslim) mengajak yang lainnya untuk berbuat atau mengajak kepada perbuatan yang karim (mulia).

3. Pendidikan Individu yang Utuh

Seperti telah dijelaskan dalam bab III, bahwa di Indonesia pada awal abad ke 20 telah dipakai kurikulum dan sasaran pendidikan yang dualisme. Sistem pendidikan kolonial hanya mengajarkan tulis, baca dan keterampilan serta ingin menjauhkan murid dari agama Islam dan dari budaya bangsa Indonesia, diperuntukkan bagi kalangan elit-pribumi Jawa di satu pihak. Sementara pen-

didikan pesantren lebih cenderung mengajarkan hal-hal yang langsung terkait dengan keagamaan, bahkan keagamaan yang telah bercampur dengan kepercayaan yang bersifat sinkretik dan mempertahankan tradisi pendahulunya.

Adanya dualisme ini, melahirkan bentuk masyarakat yang timpang intelegensinya. Karena itu, Muhammadiyah berusaha mengatasi ketimpangan ini dengan cara menggunakan aqidah tauhid sebagai dasar sebagai dasar untuk mengintegrasikannya. Karenanya dalam pendidikan, tauhid merupakan falsafahnya, yaitu dasar aktivitas berpikir yang teratur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan (Omar Mohammad, 1979: 31). Dengan dasar ini, maka pendidikan rohani, keyakinan, perasaan serta keakhiratan akan berkeselimbangan dengan pendidikan jasmani, intelektualitas, pemikiran dan hal-hal bersifat duniawi.

Cara yang ditempuh oleh Muhammadiyah seperti ini merupakan usaha membentuk manusia yang diharapkan al-Qur'an, yaitu adanya keseimbangan orientasi hidup antara yang bersifat keakhiratan dan keduniaan.

Usaha menghilangkan ketimpangan intelegensia sebagai proses dari pendidikan merupakan suatu pendekatan untuk memahami Islam secara *kaffah* (komprehensif, menyeluruh) (Q.S. 2:208), sekaligus menjadi penengah (*Wasathan*) (Q.S. 2:143) antara pendidikan pesantren dengan pendidikan

gubernemen. Usaha untuk mencapainya itu hanya dapat dicapai dengan keuletan.

Falsafah yang dipakai adalah falsafah pendidikan Islam yang memiliki beberapa unsur dan syarat :

- 1) Falsafah pendidikan Islam itu sesuai dengan spirit Islam.
- 2) Falsafah pendidikan itu berkaitan dengan realitas masyarakat dan kebudayaan serta sistem sosial, ekonomi dan politiknya
- 3) Bersifat terbuka terhadap segala pengalaman kemanusiaan
- 4) Pembinaannya haruslah didasarkan atas hasil dan pengalaman yang lama dan berhasil atas kajian yang mendalam dan luas terhadap berbagai-bagai faktor dan aspek-aspek kehidupan serta terhadap pelbagai ilmu, cabang pengetahuan dan pengalaman kemanusiaan.
- 5) Harus bersifat universal yang mengambil ukuran pelbagai faktor: spiritual, budaya, sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan psikologi yang akan mempengaruhi proses dan usaha-usaha pendidikan.
- 6) Oleh karena sumbernya bermacam-macam, maka pengambilan ilmu harus selektif. Dipilih yang penting dan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 7) Terbebas dari segala pertentangan dan perlawanan antara prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasarnya, dan diantara prinsip-prinsip ini serta pelaksanaannya

pada pendidikan penerapan.

- 8) Didasarkan atas pemikiran yang sehat dan mendalam serta mempunyai klasifikasi yang jelas.
- 9) Penentuan terakhir dilaksanakan melalui kerja sama kolektif antara warga civitas akademika.
- 10) Bersifat dinamik (Omar Muhammad, 1979: 47-53).

Dengan dasar falsafah pendidikan itu Muhammadiyah berusaha mengatasi ketimpangan yang ada dengan menggali Islam secara kaffah (komprehensif)

4. Pendidikan Kemasyarakatan

Dahlan memandang bahwa salah satu ciri pendidikan yang efektif dan efisien adalah pendidikan yang mampu menjawab persoalan-persoalan hidup. Oleh karenanya, pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan atas kebutuhan-kebutuhan yang menyelimuti manusia. Yang hidup di tengah masyarakat lainnya, terutama keadaan masyarakat Jawa waktu itu yang sengsara dan melarat.

Untuk mengurangi beban yang begitu berat, Muhammadiyah dengan pendidikannya berusaha untuk memberi kesadaran kepada masyarakat untuk saling membantu sesamanya. Larena itu, pendidikan sosial kemasyarakatan sangat penting untuk dapat mencapai tujuan itu (M.T. Arifin, 1987:121), tetapi dengan cara modern, yaitu

dengan cara diorganisasikan, seperti pendirian sekolah, rumah-rumah anak yatim dan fakir miskin (ibid, 1987:121).

Ketiga elemen sasaran pendidikan yang dicetuskan oleh K.H. Ahmad Dahlan itu, merupakan gagasan yang sangat penting dalam reformulasi (pembentukan) pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan keagamaan. Maka konsekuensinya bagi Muhammadiyah adalah adanya perumusan tujuan pendidikan secara khusus. Tujuan pendidikan Muhammadiyah pada mulanya nampak dari ucapan Ahmad Dahlan sebagai berikut “*Dadijo kjai kemadjoean, dja kesel anggonmu njamboet gave kango Moehammadijah*” (M.T. Arifin, 1987: 212). Gagasan ini, menurut Arifin (1987 :213) mengandung pengertian bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah mengharapkan lahirnya :

- 1) Manusia yang alim dalam ilmu agama;
- 2) Yang berpandangan luas, dengan memiliki pengetahuan umum;
- 3) Siap berjuang mengabdikan untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan pada masyarakat.

Tujuan pendidikan ini pada tahun 1936 disempurnakan dalam “Rumus Betawi” sebagai berikut :

“...Maka buat erste periode Moehammadijah membangoen pergoeroean-pergoeroean itoe dengan berdasar tiga: (1) Menggiring anak-anak Indonesia mendjadi orang Islam jang bekobar-kobar semangatnj; (2) Berbadan sehat,

bekerja; (3) Hidoep tangannja mentjari rizqi sendiri, sehingga kesemoenja itoe memberi faedah jang besar dan berharga badannja dan djoega hidup bersama” (M.T. Arifin, 1987 : 213).

Dari rumusan tujuan itu, penulis melihat adanya usaha untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan ukhrawi dengan kehidupan duniawi yang dirumuskan secara operasional.

Tujuan pendidikan Islam pada prinsipnya otentik dengan tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia tiada lain adalah ingin bahagia. Kebahagiaan akan dapat diraih tatkala kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Jadi, tujuan pendidikan Islam harus diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Kebutuhan hidup pada dasarnya menyangkut hakekat dirinya sebagai unsur materi dan non-materi, artinya kebutuhan manusia itu tidak terlepas dari dua unsur tadi. Selain itu, kebutuhan hidup manusia erat kaitannya dengan posisi atau keberadaanya di muka bumi. Dalam konsep al-Qur'an, keberadaan manusia di bumi adalah sebagai hamba (Q.S. 51:56) dan sebagai *khalifah* (Q.S. 2:30). Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah supaya manusia menjadi hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi, seperti disebutkan oleh Quraish Shihab (1992: 173), bahwa tujuan pendidikan yang diinginkan al-Qur'an adalah membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan Khalifah-Nya”.

Kendati tujuan pendidikan Islam yang diharapkan seperti itu, namun secara prinsip bahwa tujuan pendidikan Islam itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana maksud Allah menciptakannya.

Omar Mohammad (1979:436-443) menjelaskan secara rinci, bahwa ciri-ciri tujuan pendidikan Islam dan prinsip yang mendasarinya adalah :

- 1) Tujuan pendidikan Islam itu harus menyentuh seluruh dimensi kehidupan.
- 2) Adanya keseimbangan berbagai persoalan kehidupan dan sederhana.
- 3) Memberi jawaban yang jelas dan tegas kepada jiwa dan akal manusia. Masalah serta segala tantangan.
- 4) Prinsip menjaga perbedaan perseorangan
- 5) Prinsip dinamisme dan menerima perubahan dan perkembangan dalam rangka metode-metode keseluruhan yang terdapat dalam agama.

Dengan menggunakan kerangka ini, penulis melihat tujuan pendidikan Muhammadiyah nampaknya mengarah kepada hal tadi, yaitu mencapai keseimbangan hidup yang terintegrasi antara hamba Allah dan khalifah-Nya, meskipun dalam hal lain tersebut terlihat kesederhanaanya. Akan tetapi, dari hal itu menunjukkan Muhammadiyah berada di antara dua sistem pendidikan, sebagai penengah (*wasathan*), yaitu pendidikan pesantren yang lebih berorientasi pada makna keagamaan yang normatif dan pendidikan gubernemen yang

lebih berorientasi pada dunia dan melahirkan sikap sekuler.

Dengan cara ini, diharapkan pendidikan Islam menurut Muhammadiyah dapat melahirkan manusia yang utuh dalam pandangannya sekaligus melahirkan aksi sebagai perwujudan dari ibadah, yang menurut An-Nahlawy (1992:163) bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat.

5. Merumuskan Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan merupakan suatu gambaran dari falsafah hidup yang dianut oleh seseorang, lembaga atau negara. Dari falsafah ini kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Dengan kata lain falsafah hidup dan tujuan pendidikan merupakan asas filosofis suatu kurikulum (S. Nasution, 1986:22). Konsekuensi dari hal itu adalah apabila ada perbedaan dalam falsafah hidup yang dianut, maka dengan sendirinya akan melahirkan tujuan pendidikan yang berbeda, selanjutnya akan melahirkan perbedaan dalam perumusan kurikulum. Jadi, rencana pengajaran (kurikulum) merupakan suatu rangkaian yang tidak dipisah dengan falsafah hidup dan tujuan pendidikan.

Muhammadiyah memandang kurikulum yang mesti diperhatikan untuk pendidikan Islam, sebagaimana prasaran Ahmad Dahlan dalam Kong-

res Besar Islam ke-1 tahun 1921, adalah sebagai berikut :

- a. Penyebaran Islam dan Ilmu Pengetahuan adalah kewajiban setiap muslim.
- b. Seorang muslim wajib memiliki sifat belajar dan mengajar sekaligus.
- c. Pendidikan adalah merupakan kebutuhan umat, oleh karena itu perlu disusun suatu sistem dan asas pendidikan dan pengajaran Islam.
- d. Isi pendidikan Islam adalah pengajaran Islam yang bersumber Al-Qur'an di samping belajar membaca, berhitung, menulis, ilmu bumi dan menggambar.
- e. Garis besar isi al-Qur'an adalah: ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan manusia dalam penentuan nasibnya, musyawarah, pembuktian dan penjelasan kebenaran al-Qur'an dengan akal, perlu kerja sama antara agama, kebudayaan dan kemajuan, perubahan kehidupan ditentukan oleh hukum kausal, pengendalian nafsu dan kehendak, demokratisasi dan liberalisasi kemerdekaan berfikir, perkembangan kehidupan duniawi bersifat progresif sebagai bagian dari peran aktif manusia, perbaikan akhlak dan budi pekerti dan bimbingan bagi seluruh umat manusia (Abdul Munir Mulkhan, 1993:147).

Jika diamati dari pandangan ini dalam kaitannya dengan kurikulum, nampaknya ada usaha penggalan Islam secara integral, yaitu dengan menyaji-

kan konsep-konsep yang langsung diambil dari sumber pokoknya, yaitu al-Qur'an. Konsekuensi dari pandangan ini terhadap kurikulum pendidikan Muhammadiyah adalah adanya suatu usaha perumusan kurikulum bentuk baru yang dapat mengintegrasikan diantara dua kurikulum yang berbeda yaitu kurikulum pesantren yang hanya menyajikan jenis-jenis pengetahuan yang bersifat pengalihan nilai-nilai yang sudah berlaku sebelumnya, keterampilan untuk dapat membaca huruf Arab tanpa baris dan praktek-praktek ibadah seperti shalat, wudhu, memandikan mayat, pengajian untuk orang yang meninggal dan sebagainya. Dan kurikulum pendidikan kolonial yang hanya menyajikan jenis-jenis pengetahuan seperti membaca, menulis dan berhitung, juga diberikan pelajaran yang bersifat keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan lapangan yang dipersiapkan pemerintah.

Adanya dualisme kurikulum ini, menurut Soeyoso (1993:81) pangkalnya karena adanya dikotomi *fikrah umat*, yaitu adanya pemisahan sistem pemikiran yang menjadi manajemen pikiran yang berfungsi untuk mentransformasikan informasi menjadi suatu hasil pikiran baik berupa gagasan-gagasan, ilmu teknologi atau sistem dalam diri umat Islam. Disamping itu karena ada anggapan dari kalangan santri bahwa segala sesuatu yang berasal dari Barat yang kafir hukumnya haram untuk ditiru, termasuk dalam persoalan kurikulum

yang ditolak (tanpa pertimbangan yang logis) untuk dimasukkan ke dalam kurikulum Islam.

Gagasan Muhammadiyah dalam mempebaharui kurikulum pendidikan Islam tidak terlepas dari misi pembaharuannya dalam pemikiran di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Dengan misinya seperti ini, pada masa kolonial Belanda Muhammadiyah telah berhasil mendirikan sekolah dan madrasah yang jumlahnya banyak.

Model sekolah umum yang telah didirikan oleh Muhammadiyah antara lain: *HIS met de Qur'an* (kemudian diubah menjadi HIS Muhammadiyah), *Kweekschool*, *MULO* (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) Taman Kanak-kanak *Bustanul Athfal*, *HIK Muhammadiyah* (*Hollandsch Inlandsche Kweekschool*) (M.T. Arifin, 1987:218). Sekolah ini diterapkan pelajaran sistem Barat, akan tetapi dalam kurikulumnya diajarkan pendidikan agama, dengan perbandingan sekitar 10-15 persen untuk pendidikan agama dibanding keseluruhan kurikulum. Namun bersamaan dengan hal itu diselenggarakan kegiatan keagamaan secara khusus sebagai keseimbangan, seperti *Mubalighin*, *Wusta Mu'alimin Zuama* dan *Zaima*.

Sedangkan model pendidikan madrasah yang telah didirikan pertama kali adalah sekolah menengah yang dinamai *Al-Qismul Arqo*, didirikan pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1920 sekolah ini diubah menjadi pondok Muhammadiyah kemudian diganti lagi menjadi sekolah guru (*Kweekschool*) yang berfungsi untuk menyiap-

kan tenaga pengajar di sekolah dasar (M.T. Arifin, 1987:219).

Pengubahan dari madrasah menjadi sekolah umum seperti ini sebenarnya tidak terlalu drastis karena madrasah sebenarnya sudah dikenalkan dengan peralatan yang digunakan di sekolah umum, hanya kurikulumnya mengalami perubahan yaitu yang tadinya pendidikan keagamaan diberikan sebanyak 60 persen menjadi 40 persen.

Madrasah lainnya yang berhasil didirikan adalah *Mu'alimin* dan *Mu'alimat*. Sekolah ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pengadaan guru keagamaan dan ke-Muhammadiyah. *Mu'alimin* (untuk laki-laki) dan *Mu'alimat* untuk perempuan menggunakan kurikulum komposisinya tidak seragam, seperti yang dilaporkan Amir Hamzah, bahwa kurikulumnya kadang 50:50 persen, 30:70, bahkan ada 90:10 persen (M.T. Arifin, 1987:220).

Adapun madrasah model pesantren, Muhammadiyah tidak secara resmi pernah mendirikan, namun pendidikan mula-mula dikembangkan oleh Dahlan embrionya dari pesantren yang telah ada sebelumnya, namun dilihat dari teknis pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pesantren Muhammadiyah dengan pesantren tradisional berbeda baik dalam metode, bahan pengajaran, pengasuh dan hubungan guru-murid (M.T. Arifin, 1987:222-223). Dalam pesantren inilah yang kemudian menjadi embrio madrasah Muhammadiyah.

Adanya klasifikasi model sekolah yang dikembangkan Muhammadiyah ini adalah karena masalah

penggunaan kurikulumnya, namun bagi Muhammadiyah adanya pengajaran pendidikan umum dan pendidikan agama bagi anak adalah suatu yang sangat penting yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang dimaksud yaitu terwujudnya manusia yang utuh baik sebagai hamba Allah ataupun sebagai khalifah di muka bumi sekaligus.

Suatu kurikulum dalam pendidikan Islam dapat memenuhi kebutuhan manusia secara utuh, harus memenuhi dasar-dasar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, antara lain: dasar agama, dasar falsafah, dasar psikologis dan dasar sosial (Omar Mohammad, 1979:524-532). Dasar agama menempatkan Al-Qur'an dan Hadist yang mengajarkan prinsip-prinsip aqidah, muamalat, ibadah dan hubungan yang berlaku dalam masyarakat. Dasar falsafah, artinya watak pendidikan Islam harus memperoleh wujudnya dari wahyu Allah dan bimbingan Nabi serta hasil pemikiran para cendikia muslim. Dasar psikologis, artinya suatu kurikulum harus memperhatikan perkembangan siswa baik emosi, intelektual, bahasa, sosial dan sebagainya. Dasar sosial, artinya suatu kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan dimensi-dimensi sosial yang terjadi.

Adapun Abdurrahman An Nahlawy (1992:273-277) menyebutkan ciri-ciri kurikulum yang Islami, antara lain:

- a. Sistem dan perkembangan kurikulum hendaknya selaras dan dengan fitrah insani sehingga memiliki peluang untuk menyucikannya,

menjaganya dari penyimpangan dan menyelamatkannya.

- b. Kurikulum dimaksud hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu ikhlas, taat dan beribadah kepada Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan sosial.
- c. Pentahapan serta pengkhususan kurikulum hendaknya memperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik maupun unitas atau ke-khas-annya.
- d. Kurikulum hendaknya memelihara segala kebutuhan nyata kehidupan masyarakat, sambil tetap bertopang pada jiwa dan cita ideal Islaminya.
- e. Struktur organisasi kurikulum harus terarah pada pola islami.
- f. Hendaknya kurikulum realistik, dalam arti dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi.
- g. Hendaknya metode pendidikan dalam kurikulum bersifat luwes
- h. Hendaknya kurikulum itu efektif, dalam arti dapat menyampaikan dan menggugah perangkat nilai edukatif yang melahirkan tingkah laku yang positif serta meninggalkan dampak efektif (sikap) yang positif pula dalam jiwa generasi muda.
- i. Kurikulum hendaknya memperhatikan perkembangan siswa.
- j. Hendaknya kurikulum memperhatikan aspek-aspek tingkah laku amaliyah Islami, seperti

pendidikan untuk berjihad dan menyebarkan dakwah Islamiyah, serta membangun masyarakat muslim di lingkungan sekolah.

Dengan menggunakan kerangka ini, meskipun sebagian besar termasuk kerangka ilmu (bukan filsafat), setidaknya ada beberapa hal pokok yang tersirat bahwa kurikulum pendidikan Islam ditegakkan atas dasar prinsip pencapaian tujuan manusia seutuhnya baik untuk kehidupan di dunia ataupun diakhirat, seperti tertera dalam firman Allah dan sering dijadikan do'a oleh kaum muslimin yaitu yang artinya: "*Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka*" (Depag, 1971:49).

Muhammadiyah meletakkan prinsip seperti ini untuk mencapai tujuannya pendidikannya yang tertera dalam kurikulum pendidikannya baik model atau pun model madrasah. Dan dari hal itu terlihat adanya keseimbangan materi pengajaran antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang pada waktu itu sedang mengalami keterpisahan di pesantren dan di sekolah gubernemen.

-----&&&-----

PENUTUP

DARI uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, dapat diambil kesimpulan umum tentang dualisme pendidikan dan usaha Muhammadiyah dalam mengintegrasikannya, antara lain:

1. Dualisme pendidikan di Indonesia pada masa Belanda disebabkan oleh pihak pesantren yang tidak mau kompromi dengan Belanda, dan pihak pemerintah Belanda yang tidak menginginkan rakyat kecil menjadi orang-orang pandai yang membahayakan mereka, tapi pemerintah hanya mengajarkan kepada anak-anak dari kalangan elit, seperti kaum priyayi, bangsawan dan anak dari pegawai pemerintah.

Dualisme yang paling mencolok antara pesantren dan pendidikan gubernemen yaitu dalam tujuan dan kurikulum pendidikan. Tujuan di pesantren didasarkan atas kepentingan untuk mentransfer pengetahuan keagamaan yang telah ada dari ulama terdahulu dan anak dapat beribadah kepada Allah, sehingga kurikulum hanya menyangkut pengajaran keagamaan.

Sedangkan pendidikan gubernemen tujuannya didasarkan atas kepentingan politik, yaitu untuk menciptakan tenaga kerja murahan untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik yang didirikannya, sehingga dapat mengeruk keuntungannya sebesar mungkin. Dan kurikulum pengajarannya hanya mengajarkan menulis, membaca dan berhitung tanpa ada pengajaran agama.

2. Usaha-usaha Muhammadiyah dalam mengintegrasikan dualisme pendidikan, yaitu dengan cara:
 - a. Merumuskan tujuan pendidikan Islam. Perumusan tujuan pendidikan ini didasarkan atas kebutuhan manusia hidup di dunia yang bersifat immaterial. Tujuan ini dianggap suatu usaha akomodasi dari tujuan pesantren yang berorientasi pada kepentingan akhirat semata dan bertujuan pendidikan gubernemen yang hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja.
 - b. Merumuskan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Muhammadiyah berorientasi pada kehidupan untuk di akhirat dan dunia. Dan usaha ini merupakan usaha akomodasi atas kurikulum pesantren yang hanya mengajarkan pengajaran keagamaan yang berorientasi akhirat saja dan kurikulum pendidikan gubernemen yang hanya menyajikan pengajaran yang berorientasi dunia saja.

Jadi, Muhammadiyah mencoba mengintegrasikan dualisme penyelenggaraan pendidikan, sehingga Muhammadiyah menjadi sintesis dari pendidikan pesantren tradisional dan pendidikan gubernemen.

-----&&&-----